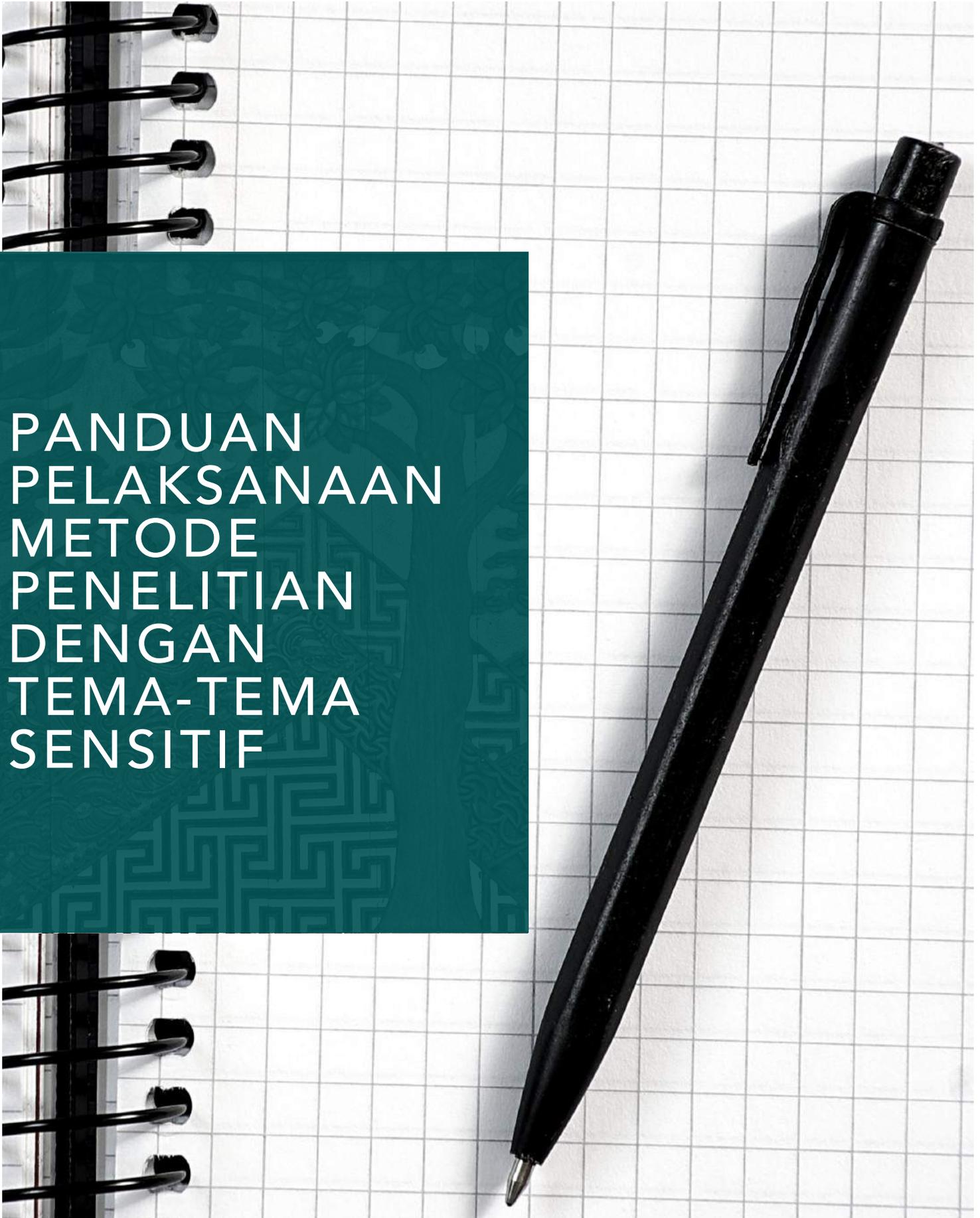


Arya Fernandes  
Beltsazar Krisetya  
Edbert Gani Suryahudaya  
Medelina K. Hendytio

Noory Okthariza  
Philips J. Vermonte  
Vidhyandika D. Perkasa



CENTRE FOR  
STRATEGIC AND  
INTERNATIONAL  
STUDIES



# PANDUAN PELAKSANAAN METODE PENELITIAN DENGAN TEMA-TEMA SENSITIF

# GUIDELINES



## PANDUAN PELAKSANAAN METODE PENELITIAN DENGAN TEMA-TEMA SENSITIF



CENTRE FOR  
STRATEGIC AND  
INTERNATIONAL  
STUDIES

A Survey Guideline by CSIS  
Indonesia

Tim penulis:

Arya Fernandes

Beltsazar Krisetya

Edbert Gani Suryahudaya

Medelina K. Hendytio

Noory Okthariza

Philips J. Vermonte

Vidhyandika D. Perkasa

Staf Pendukung:

Amelinda Bonita Leonard

© 2020 CSIS Indonesia

All rights reserved

*Suggested Citation*

Fernandes, Arya., & Perkasa, Vidhyandika D. (eds.).  
2020. "Panduan Pelaksanaan Survei Opini Publik  
dengan Tema-Tema Sensitif." Jakarta: CSIS  
Indonesia.

The CSIS Research Paper is a means by which members of the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) research community can quickly disseminate their research findings and encourage exchanges of ideas.

# Daftar Isi

## **Bab 1: Penelitian dan Isu Sensitif: Definisi, Pilihan dan Tantangan Secara Metodologis**

Vidhyandika D. Perkasa

<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>Dilema dan Pilihan Metodologis</b>	<b>3</b>
<b>Fokus dari Panduan Praktis</b>	<b>5</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>10</b>

## **Bab 2: Mendesain Penelitian Kuantitatif**

Philips J. Vermonte dan Noory Okthariza

<b>Identifikasi Problem dan Pertanyaan Penelitian</b>	<b>12</b>
<b>Penggunaan Teori dan/atau Hipotesis</b>	<b>14</b>
<b>Operasionalisasi Konsep dan Hubungan Antarvariabel</b>	<b>15</b>
<b>Pengambilan dan Penggunaan data</b>	<b>17</b>
<b>Analisis Deskriptif dan Analisis Kausal</b>	<b>18</b>
<b>Implikasi Penelitian</b>	<b>20</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>21</b>

## **Bab 3: Pelaksanaan Survei dengan Isu-Isu yang Sensitif**

Arya Fernandes

<b>Pendahuluan</b>	<b>22</b>
<b>Survei dengan Isu Sensitif</b>	<b>23</b>
<b>Pelaksanaan Survei</b>	<b>24</b>
<b>Pembuatan Kuesioner</b>	<b>25</b>
<b>Pengumpulan Data</b>	<b>27</b>
<b>Wawancara dan Penulisan Laporan</b>	<b>31</b>
<b>Penutup</b>	<b>33</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>34</b>

## **Bab 4: Menganalisis Data Kuantitatif**

Vidhyandika D. Perkasa

<b>Pendahuluan</b>	<b>35</b>
<b>Berbagai Format Analisis Data</b>	<b>36</b>
<b>Statistik dalam Analisis Data Kuantitatif</b>	<b>44</b>
<b>Potensi Error dalam Analisis Data Kuantitatif</b>	<b>45</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>49</b>

# Daftar Isi

## **Bab 5: Pengelolaan Data yang Transparan, Akuntabel dan Terpadu**

Edbert Gani Suryahudaya

<b>Pendahuluan</b>	50
<b>Landasan Tata Kelola Data</b>	50
<b>Data, Informasi, Pengetahuan</b>	51
<b>Prinsip Data Terbuka dan Satu Data</b>	53
<b>Penyelenggaraan</b>	55
<b>Kewenangan dan Kriteria Wali Data</b>	57
<b>Isu Sensitif Terkait Data</b>	58
<b>Penutup</b>	59
<b>Daftar Pustaka</b>	60

## **Bab 6: Beberapa Contoh Riset Sensitif dan Tantangannya**

Medelina K. Hendytio dan Beltsazar Krisetya

<b>Pendahuluan</b>	61
<b>Identifikasi Sensitivitas Isu dalam Riset</b>	61
<b>Mengatasi Tantangan</b>	70
<b>Meningkatkan Keabsahan Data dan Bukti</b>	72
<b>Penutup</b>	73
<b>Daftar Pustaka</b>	75

## **Bab 7: Tantangan dan Pengalaman Survei Opini Publik di Indonesia**

Arya Fernandes

<b>Tantangan Internal</b>	83
<b>Peningkatan Literasi Survei</b>	84
<b>Inovasi Survei Kebijakan</b>	84
<b>Penutup</b>	85
<b>Daftar Pustaka</b>	86

# Bab 1

## Penelitian dan Isu Sensitif: Definisi, Pilihan dan Tantangan Secara Metodologis

Vidhyandika D Perkasa

### Pendahuluan

Investigasi dalam penelitian sosial seringkali berhubungan dengan berbagai macam isu, data dan perspektif yang berdampak pada 'perasaan, cara pandang, perilaku dan nilai-nilai' yang dianut oleh subyek yang terlibat dari penelitian tersebut. Disinilah signifikansi dari suatu isu ataupun topik yang secara metodologis dinilai sebagai suatu hal yang 'sensitif'.

Tidak ada definisi yang tunggal tentang isu sensitif. Konsep sensitif dilihat sebagai suatu hal yang natural atau umum sehingga terkadang sulit untuk didefinisikan tetapi bernaung dalam suatu ruang luas untuk beragam interpretasi (Condomines dan Hennequin, 2014). Meskipun demikian, definisi dari penelitian yang sensitif akan tergantung atau dipengaruhi oleh konteks, norma kultural maupun nilai-nilai yang dianut pada suatu masyarakat setempat.

Apapun itu definisinya, isu atau penelitian sensitif perlu dilakukan para peneliti agar pemahaman mereka meningkat terkait beragam isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat saat ini. Alasan untuk menghindar melakukan penelitian isu sensitif dapat dilihat sebagai suatu 'penghindaran dari tanggung-jawab' (*evasion of responsibility*), atau seperti yang dikatakan oleh Sieber dan Stanley (dalam Dickson-Swift, James dan Liamputtong, 2009):

...'*Sensitive research addresses some of society's most pressing social issues and policy questions. Although ignoring the ethical issues in sensitive research is not a responsible approach to science, shying away from controversial topics, simply because they are controversial, is also an avoidance of responsibility*'.

Menurut Raymond Lee (dalam McCosker, Barnard dan Gerber, 2001) terdapat tiga hal yang menghasilkan suatu kepedulian terhadap isu sensitif dari perspektif akademis. *Pertama*, isu-isu yang dilihat sebagai suatu hal yang privat, membuat stress, dan bersifat sakral seperti masalah terkait seksualitas, kematian atau praktek-praktek agama. Hal ini sering diistilahkan dengan *intrusive threat*.

*Kedua*, isu sensitif seringkali akan mengakibatkan ketakutan atau stigmatisasi dan diistilahkan sebagai *threat of sanction*. Sebagai contohnya adalah studi dengan pecandu narkoba atau dengan teroris. *Ketiga*, isu sensitif juga dikaitkan dengan ancaman politik atau *political threat* dimana peneliti mempelajari isu-isu yang kontroversial yang berpotensi menghasilkan konflik sosial yang mengancam dirinya maupun subyek penelitiannya. Berdasarkan penjelasan di atas dan kalau dielaborasi

lebih lanjut, penelitian sensitive dapat didefinisikan sebagai suatu ‘studi dimana akan muncul implikasi atau konsekuensi baik itu secara langsung pada peserta dalam penelitian atau pada individu-individu yang direpresentasikan dalam penelitian ini (Dickson-Swift, James dan Liamputtong, 2009). Definisi lain dari Ahlberg (1999) melihat penelitian sensitif sebagai suatu studi yang mengandung resiko dari suatu konsekuensi sosial yang tidak diharapkan (*unwelcome*) sebelumnya atau ada resiko secara fisik bagi subyek atau individu yang terlibat dalam penelitian ini.

Pada dasarnya, semua penelitian sosial dapat mengandung suatu hal sensitif dan semua penelitian tentu akan ada dampaknya. Hanya saja ada beberapa jenis penelitian yang akan membawa konsekuensi yang lebih ‘membahayakan’ daripada penelitian yang lain. Dengan demikian, kata kunci dari isu sensitif terkait dengan topik yang taboo, ‘*emotion-laden*’ dan ‘*fear-provoking*’ (Condomines dan Hennequin, 2014), ‘*intimate, discreditable, dan incriminating*’ (Renzetti dan Lee dalam Dickson-Swift, James dan Liamputtong, 2009). Penelitian sensitif sering dikaitkan juga dengan kesedihan, stigma sosial, perilaku atau opini yang mengandung sanksi sosial atau hal yang illegal. Penelitian sensitif juga mengandung potensi yang mengarah ke stress secara fisik, emosional dan secara psikologis (Rodriguez, 2018).

Bila kita melakukan konsepsualisasi terhadap topik yang dinilai sensitif, ada daftar panjang dimana beberapa sudah disebutkan di atas, seperti penelitian terkait korupsi, agama dan minoritas, migrasi, rasisme, perilaku menyimpang seperti narkoba, LGBT dan paedofilia, etnis, pemerkosaan dan pelecehan seksual, konflik, terorisme, bunuh diri, dan penyakit kanker.

Tantangan sekaligus kritikan terhadap penelitian sensitif sering dihadapkan pada fokus yang dianggap terlalu bias terhadap urusan ‘etika’ (*ethical*) seperti permasalahan terkait dampak secara emosional dan rasa takut yang bisa dialami subyek penelitian maupun peneliti sendiri karena terlibat dalam penelitian sensitif ini:

*....’although aware of some of the potential problems related to the sensitivity of the topic and the vulnerability of the subjects, I was admittedly very naïve about the actual sensitivity and how the study activities would influence both the subjects and myself’ (Cowless, dalam Dickson-Swift, James dan Liamputtong, 2009)*

Kathleen Cowless (dalam Dickson-Swift, James dan Liamputtong, 2009) selanjutnya mengungkapkan bahaya dari bias secara etika:

*....’When the qualitative researcher delves into the private worlds and experiences of subjects, sometimes evoking strong emotional responses and sometimes pursuing thoughts that might otherwise never be revealed, consideration of the common ethical issues may not be enough.’*

Menurut Cowless, ada bahaya dari fokus yang terlalu sempit pada masalah etika, meskipun penting, akan melupakan hal-hal lain krusial lainnya terkait penelitian sensitif yang juga perlu diperhatikan. Selain masalah etika, aspek (implikasi) metodologi juga perlu diperhatikan. Kita perlu melakukan suatu refleksi metodologis (*methodological*

*reflection*) untuk menentukan jenis metodologi apa yang paling tepat untuk diterapkan untuk penelitian sensitif ini.

Menurut Brannen (1988), 'membiarkan topik penelitian untuk berkembang secara gradual dengan istilahnya sendiri merupakan strategi teoritis dan sekaligus secara metodologis.' Brennan juga mengungkapkan bahwa bila kita meneliti suatu isu yang sensitif penting untuk tidak berprasangka buruk terkait isu penelitian dengan memberinya label atau mendefinisikan batas terlalu dekat. Lebih baik subyek penelitian mendefinisikan masalah menurut terminologi mereka.

## Dilema dan Pilihan Metodologis

Dilema secara metodologis ini pasti dijumpai bila melakukan penelitian dengan isu-isu sensitif. Dilema pertama ini terkait dengan akses ke sumber informasi yang biasanya tidak mudah dikeluarkan, misalnya oleh sebuah perusahaan karena sifatnya yang rahasia. Disini diperlukan '*gate-keepers*' untuk dapat menjembatani kepentingan peneliti dan 'pemilik' data. Dilema kedua berhubungan dengan cara membangun relasi inter-personal antara peneliti dengan responden. Peneliti harus melakukan suatu 'proses intrusion' karena memerlukan data primer yang tidak tersedia dalam literatur-literatur terkait tema yang diteliti. Tantangan untuk membangun relasi inter-personal ini adalah membangun rasa percaya sehingga jawaban 'jujur' dari responden akan bisa diungkap.

Biasanya dalam penelitian sensitif, responden akan 'memainkan sebuah peran' agar dalam tampilan luarnya bisa meminimalisasi perilakunya yang menyimpang (*back and front stage*) atau seperti yang dikemukakan oleh Goffman sebagai suatu dramaturgi (Goffman, 1959). Proses membangun hubungan interpersonal memakan waktu yang lama dan peneliti akan melakukan suatu penelitian observasi terlibat (*participation observation*) dan proses wawancara akan dilakukan secara berulang dengan individu yang sama (Condomines dan Hennequin, 2014). Tak kalah penting dalam hal ini, peneliti harus bisa mengantisipasi segala dampak dari penelitian yang dilakukannya agar tidak 'membahayakan' eksistensi dari subyek penelitiannya maupun dirinya sendiri sebagai peneliti.

Secara umum, ada pilihan metodologis terkait penelitian sensitif ini. Peneliti harus mempertimbangkan tema penelitian sensitifnya lebih cocok dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, dilakukan secara tatap muka atau melalui 'on-line'. Pilihan terkait kualitatif atau kuantitatif juga bergantung pada tipe dari jenis pertanyaan yang akan ditanyakan. Masing-masing jenis metodologi ada kelebihan maupun kekurangannya.

Sebagai contohnya, metodologi kuantitatif seringkali dianggap kurang memadai untuk isu-isu sensitif karena proses pengumpulan data dapat dipengaruhi oleh respons yang minim dari responden. Hal ini terkait dengan informasi yang bersifat sensitif yang ditanyakan oleh surveyor secara tatap muka sehingga responden cenderung enggan untuk menjawab karena belum terbangun rasa percaya.



Surveyor biasanya hanya menjalankan instruksi dari peneliti sehingga cenderung tidak memiliki 'sense' terhadap pengetahuan dan konteks yang sama seperti yang dimiliki oleh peneliti. Melalui survei sulit juga bagi surveyor untuk 'membaca' dan responden untuk 'mengakui' perilakunya yang menyimpang sehingga yang terjadi adalah 'underestimation' dari perilakunya tersebut (*front stage*). Sebagai dampaknya adalah jawaban dari responden yang cenderung tidak jujur. Dengan demikian, secara umum, responden akan menghindari dari survei yang mengandung pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Disini yang menjadi tantangannya adalah bagaimana memformulasikan dan mengemas pertanyaan-pertanyaan dalam survei yang mengandung informasi sensitif tetapi dapat 'disamarkan' (*disguised*) sehingga tidak 'terbaca' oleh subyek penelitian.

Biasanya, kelemahan dari pendekatan kuantitatif ini dapat diantisipasi menggunakan survei berbasis teknologi seperti *SurveyMonkey* dimana responden tidak bisa menghindari untuk tidak menjawab pertanyaan sensitif. Hanya saja ada masalah ketersediaan responden untuk berpartisipasi dalam survei dan juga masalah akan muncul bila literasi teknologi responden rendah atau akses ke perangkat teknologi juga masih rendah. Ada permasalahan 'kejujuran' juga dalam menjawab suatu pertanyaan dengan memakai cara ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi berperan penting dalam penggalan informasi yang bersifat sensitif. Melalui wawancara telepon, subyek penelitian tidak perlu menampakkan atau bisa merahasiakan figur dan identitasnya sehingga akan lebih terbuka mengungkap informasi atau pengalaman yang dianggap sensitif. Melalui cara seperti ini, proses menilai (*judgement*) antara peneliti dengan subyek penelitian cenderung tidak akan terjadi. Keuntungan lain dari cara online ini adalah kemampuannya untuk menjangkau lebih banyak informan atau responden. Kelemahan dari penggalan data secara online atau dengan menggunakan komputer seringkali dikaitkan dengan cara untuk melindungi data dan identitas responden karena internet merupakan domain publik yang bisa diretas atau diakses oleh siapapun (Rodriguez, 2018).

Sedangkan pendekatan kualitatif memiliki kelemahan karena tidak bisa menghasilkan hasil yang dapat digeneralisasi meskipun diakui bahwa pendekatan tersebut paling cocok untuk diterapkan untuk meneliti isu-isu yang sensitif karena pengetahuan dan realitas hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mengalaminya (Elam dan Fenton dalam Rodriguez, 2018). Kelemahan lain dari pendekatan kualitatif adalah waktu lama yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan karena hal ini terkait dengan bagaimana peneliti membangun kepercayaan dan legitimasi di tengah masyarakat.

Terlepas dari kelemahannya, keuntungan dari pendekatan kualitatif dimana proses pengumpulan informasi dilakukan secara tatap muka akan bisa terbangun hubungan yang didasari rasa percaya antara peneliti dengan subyek penelitian. Ada kemungkinan ditengah wawancara subyek penelitian akan merasakan stress. Disini, peneliti dapat menenangkan subyek penelitian.

Selain itu melalui wawancara tatap-muka, peneliti dapat merasakan emosi dari subyek penelitian dengan mengobservasi bahasa tubuhnya. Keuntungan lain dari wawancara tatap-muka dengan pilihan pendekatan kualitatif adalah peneliti dapat terus melalui proses penyelidikan (*probing*) sehingga informasi yang di dapat akan lebih kaya dan mendalam. Terlepas dari keuntungan dari wawancara tatap muka, kelemahannya adalah potensi terjadinya stigmatisasi, proses menilai (*judgement*) dan rasa malu yang harus dirasakan oleh subyek penelitian karena merasa sebagai '*social deviant*' (Rodriguez, 2018) dalam konteks penelitian ini.

Dengan melihat adanya kelemahan di masing-masing pendekatan maupun metodologi, maka penelitian sensitif cenderung dilakukan dengan menggunakan metodologi campuran (*mixed methods*) yaitu suatu metodologi yang menggabungkan antara elemen dari metodologi kuantitatif maupun kualitatif. Dengan metodologi campuran ini peneliti akan dapat jawaban pada sebuah pertanyaan penelitian yang kompleks.

Selain itu, metodologi ini dianggap efektif karena responden atau informan diberi pilihan untuk mengikuti wawancara secara kualitatif atau melalui pengumpulan data kuantitatif secara *online* atau menggunakan keduanya (Rodriguez, 2018). Keuntungan lain menggunakan metodologi campuran dalam penelitian sensitif juga terkait dengan proses validasi informasi. Peneliti dapat membandingkan hasil survei dengan informasi yang di dapat secara langsung dari wawancara tatap muka (*cross comparison*).

Menurut Creswell dan Plano Clark (dalam Condomines dan Hennequin, 2014) ada enam rancangan metodologi campuran yang menggabungkan elemen dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Keenam rancangan tersebut adalah: (a) Rancangan *Convergent Parallel*; (b) Rancangan *Explanatory Sequential Quantitative*; (c) Rancangan *Explanatory Sequential Qualitative*; (d) Rancangan *Embedded*; (e) Rancangan *Transformative*; dan (f) Rancangan *Multiphase*. Dalam rancangan *parallel*, misalnya akan dimulai dengan pengumpulan dan analisis data secara kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan lalu akan dilakukan perbandingan dan cara menyambungkan data, lalu dilakukan proses interpretasi dan akan menghasilkan penjelasan triangulasi dan komplemen data. Metodologi campuran ini juga memungkinkan kita melakukan kuantifikasi dari data kualitatif.

## Fokus dari Panduan Praktis

Melihat pembahasan di atas dapat diidentifikasi kompleksitas baik secara etika maupun metodologi dalam upaya melakukan penelitian dengan isu-isu sensitif. Para pembuat kebijakan juga tidak dapat menghindar dari penelitian yang melibatkan isu-isu sensitif ini. Buku ini ingin memberikan panduan praktis terkait cara melakukan penelitian dengan isu-isu sensitif dengan penekanan pada pendekatan atau metodologi secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada dasarnya menekankan pada pengukuran secara obyektif dan analisis secara statistik, matematis atau angka dari data-data yang dikoleksi melalui *polling* dan survei. Penelitian kuantitatif mengutamakan pengumpulan data numerikal dan berupaya mengeneralisasikannya kepada beberapa kelompok orang untuk menerangkan suatu fenomena yang khusus.

Di **Bab 1** yang berjudul **Penelitian dan Isu Sensitif: Definisi, Pilihan dan Tantangan Secara Metodologis** yang ditulis oleh Vidhyandika D. Perkasa dijelaskan apa yang didefinisikan sebagai penelitian dan isu sensitif. Definisi isu sensitif sangat beragam dan multi-interpretatif yang sangat dipengaruhi oleh konteks kultural, norma maupun nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Salah satu permasalahan mendasar dari wacana tentang penelitian sensitif terletak pada fokusnya yang bias 'etika'- terlalu memperdulikan dampak emosional dan secara fisik dari subyek penelitian maupun peneliti kalau terlibat dalam penelitian semacam ini. Satu faktor penting yang cenderung diabaikan dalam wacana penelitian sensitif adalah pilihan metodologis. Perlu dilakukan suatu refleksi metodologis untuk memilih jenis metodologi yang paling tepat untuk melakukan penelitian sensitif, apakah itu kuantitatif, kualitatif atau gabungan antara keduanya. Masing-masing pilihan metodologi memiliki tantangannya tersendiri.

Di **Bab 2** yang berjudul **Mendesain Penelitian Kuantitatif** yang ditulis oleh Philips J. Vermonte dan Noory Okthariza menguraikan tentang dasar-dasar membuat desain penelitian kuantitatif. Terlepas dari seberapa sensitif isu yang diangkat, desain penelitian perlu mengacu pada dimensi-dimensi penelitian yang sudah baku. Hal ini diperlukan guna menilai keabsahan atau validasi dari desain penelitian yang digunakan. Dimensi-dimensi ini meliputi (1) identifikasi *problem* dan pertanyaan penelitian, (2) teori dan hipotesis, (3) operasionalisasi konsep dan penjelasan hubungan antar-variabel, (4) pengambilan dan pengumpulan data, (5) analisis deskriptif dan kausal, dan (6) penjelasan tentang implikasi penelitian. Bab ini mengulas secara detail keenam dimensi di atas. Tetapi karena tulisan ini secara spesifik bertujuan menjawab apa saja tantangan melakukan penelitian dengan topik-topik sensitif, maka desain penelitian perlu dirancang sedemikian rupa agar bisa menangkap hal tersebut. Kami berpendapat bahwa sensitifitas topik dalam penelitian kuantitatif bergantung dari sejauh mana kita bisa menurunkan konsep-konsep/topik-topik yang sensitif ke dalam indikator atau variabel-variabel yang bisa diukur. Ini diperlukan karena memungkinkan peneliti mengkuantifikasi fenomena sensitif yang menjadi objek penelitian. Dengan begitu, peneliti perlu memikirkan apa *proxy* yang akurat dalam menerangkan fenomena penelitian. Sedapat mungkin *proxy* ini memiliki referensi literatur yang kuat. Turunan konsep/topik sensitif ini bisa dilakukan lewat misalnya kuesioner-kuesioner dalam survei atau bisa juga dengan mencatat frekuensi kejadian/fenomena yang ingin ditelisik baik secara objektif (misalnya lewat laporan kliping koran dan sumber-sumber sekunder lain) maupun subjektif (lewat penilaian pribadi peneliti).

Di **Bab 3** yang berjudul **Pelaksanaan Survei dengan Isu Sensitif** yang ditulis oleh Arya Fernandes menjelaskan bagaimana peneliti mempersiapkan pelaksanaan survei opini publik, mulai dari mempersiapkan kuesioner, memastikan proses pengumpulan data yang tepat serta mengelola pelaksanaan survei yang efisien dan tertib. Dalam pembuatan kuesioner, peneliti perlu memperhatikan kejelasan pertanyaan dalam kuesioner sehingga akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan survei seperti akurasi data dan tingkat *response rate*. Dalam survei dengan tema-tema sensitif, sebaiknya peneliti menempatkan pertanyaan yang bernuansa sensitif di akhir

pertanyaan agar tidak mempengaruhi fokus dari responden. Sementara dalam pemilihan metode pengumpulan data, dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya desain penelitian yang telah ditetapkan, ketersediaan dana, ruang lingkup, jangka waktu dan tujuan penelitian. Bagian ini juga menjelaskan model-model pengumpulan data dalam penelitian survei opini publik beserta kelebihan dan kekurangannya.

Di **Bab 4** yang berjudul **Menganalisis Data Kuantitatif** yang ditulis oleh Vidhyandika D. Perkasa menjelaskan bagaimana menganalisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah suatu proses untuk menginspeksi, membersihkan, mentransformasi suatu model untuk memunculkan informasi yang penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan serta menawarkan kesimpulan. Penelitian kuantitatif yang mengandung isu sensitif juga perlu untuk memikirkan bagaimana cara untuk memotret substansi yang dianggap sensitif, misalnya penelitian tentang korupsi, radikalisme, dan politik identitas ke dalam instrumen kuantitatif tersebut, misalnya dalam kuesioner. Beberapa pilihan menganalisis data kuantitatif yang akan dijelaskan adalah melalui 'analisis frekuensi, tabulasi silang, dan perbandingan signifikansi.'

Di **Bab 5** yang berjudul **Pengelolaan Data yang Transparan, Akuntabel dan Terpadu** yang ditulis oleh Edbert Gani Suryahudaya dan Vidhyandika D Perkasa menjelaskan soal manajemen data di institusi pemerintah, menggunakan pendekatan dan semangat data terbuka. Keterbukaan data publik menjadi salah satu tonggak utama dalam isu transparansi, yang merupakan ciri khas dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk membangun keterbukaan data yang baik, setidaknya ada dua tantangan utama. Tantangan pertama ialah soal membangun perspektif yang tepat soal keterbukaan data itu sendiri. Data terbuka masih menjadi konsep baru yang belum banyak dipahami dengan baik oleh birokrasi di Indonesia. Kondisi ini ditambah masih berlakunya kecenderungan untuk membatasi akses informasi kepada masyarakat. Sehingga data terbuka merupakan titik ekstrem baru yang memerlukan sosialisasi secara mendalam.

Tantangan kedua berhubungan dengan membangun infrastruktur data yang baik. Untuk itu dalam tulisan ini disediakan beberapa rekomendasi susunan langkah-langkah untuk membantu pembaca dari institusi pemerintah dalam membangun infrastruktur datanya, mulai dari tahap awal hingga akhir. Sebagian besar rekomendasi kebijakan dari tulisan ini disadur dari beberapa komponen penting di peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Panduan yang lebih mudah dipahami dari aturan perundangan mungkin dapat membantu untuk memahami sistem yang ingin dibangun. Kedua tantangan ini berkaitan erat dengan isu sensitif dalam riset internal maupun kajian yang dilakukan oleh pemerintah. Sensitifitas isu dimulai dari sensitifitas data. Ketika kepentingan untuk membatasi data bersinggungan dengan kepentingan keterbukaan, akan terjadi konflik yang seringkali membatasi ruang perbaikan. Secara garis besar, dalam konteks manajemen data perlu dipikirkan bagaimana melindungi identitas responden, bagaimana data yang dianggap sebagai suatu hal yang sensitif perlu dijaga dan dilindungi agar tidak dengan mudah terekspos ke publik melalui teknologi internet, serta perlu suatu teknik untuk mengekspos data sensitif ke publik

untuk kepentingan ilmiah agar tidak menyimpulkan *distress* ke subyek penelitian, peneliti dan masyarakat secara umum.

Di **Bab 6** yang berjudul **Beberapa Contoh Riset Sensitif dan Tantangannya** yang ditulis oleh Medelina K. Hendytio dan Beltsazar A. Krisetya memberikan contoh-contoh riset isu sensitif serta tantangan penelitian yang kerap muncul. Bab ini berargumen bahwa sensitivitas penelitian bervariasi, ditentukan oleh topik yang diangkat. Sebagai contohnya, bab ini memberikan ilustrasi kategorisasi topik berdasarkan sensitivitasnya (rendah, sedang, dan tinggi). Misalnya, penelitian mengenai korupsi pejabat tinggi negara cenderung lebih sensitif dibandingkan dengan topik replikasi inovasi pelayanan publik. Pendekatan khusus diperlukan untuk meminimalisasi kemungkinan peneliti dan kelompok terkait mendapatkan konsekuensi negatif dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hasil penelitian.

Ada tiga contoh riset yang disajikan, yaitu rekrutmen ASN dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), persepsi masyarakat mengenai korupsi, serta keterlibatan perempuan dalam proses radikalisme. Dalam contoh riset rekrutmen ASN dan JPT, sensitivitas isu ada pada kesiapan birokrasi terhadap sistem baru, praktik KKN, dan diskriminasi gender. Pembelajaran yang dapat dipetik adalah triangulasi wawancara mendalam dengan beragam pemangku kepentingan seperti peserta seleksi, panitia seleksi, dan KASN untuk verifikasi informasi. Dalam riset persepsi masyarakat terhadap korupsi, sensitivitas isu ada pada keragu-raguan narasumber menceritakan pengalaman pribadi mereka dengan praktik korupsi. Sedangkan dalam riset radikalisme di kalangan perempuan, tantangannya adalah kesulitan mencari narasumber perempuan yang masih aktif bergabung dengan kelompok radikal. Beberapa pendekatan alternatif dipakai, seperti mencari narasumber mantan anggota kelompok radikal, menggunakan pendekatan *radical milieu*, dan rekrutmen asisten lokal yang dapat membantu peneliti di lapangan dan meningkatkan kepercayaan dari narasumber.

Penulis menerangkan dua tantangan yang kerap muncul. Pertama, dalam wawancara narasumber, yang dapat diatasi dengan memastikan langkah-langkah pra-wawancara, wawancara, dan pasca wawancara dilakukan untuk meningkatkan rasa saling percaya narasumber. Kedua, dalam meningkatkan keabsahan data riset isu sensitif yang informasinya memang cenderung tidak lengkap atau malah bertentangan. Hal ini dapat diatasi dengan triangulasi dan meningkatkan keragaman sumber data maupun metode penelitian.

Di **Bab 7** yang berjudul **Tantangan dan Pengalaman Melaksanakan Survei Opini Publik di Indonesia** yang ditulis oleh Arya Fernandes menjelaskan bagaimana peranan survei dalam proses demokratisasi di Indonesia dan belakangan semakin sering digunakan untuk melihat respons dan dukungan publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan—sehingga proses pengambilan kebijakan menjadi lebih terukur dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pertumbuhan lembaga survei di Indonesia didukung oleh munculnya kebijakan-kebijakan inovatif, seperti regulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mewajibkan keikutsertaan lembaga survei dalam asosiasi profesi serta pendaftaran lembaga survei di KPU untuk bisa ikut dalam merilis



hasil survei dan hitung cepat pada masa pemilu. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana tantangan-tantangan internal yang dihadapi lembaga survei seperti tuntutan untuk menjaga profesionalitas, independensi serta kesediaan untuk berbagi-pakai data. Sementara, tantangan eksternal, di antaranya masih panjangnya proses perizinan pelaksanaan survei, literasi publik yang masih rendah di tingkat publik dan media massa dan penerapan standarisasi publikasi hasil survei. Selain itu, dalam pengembangan kapasitas ke depan, lembaga survei perlu juga memperkuat survei-survei kebijakan publik.

## Daftar Pustaka

Ahlberg, Nora. 1999. Methodological Choice and the Study of Sensitive Issues.

Berangere, Condomines dan Emilie Hennequin. 2014. Studying Sensitive Issues: The Contributions of a Mixed Approach. RIMHE-Management and Human Enterprise RI/Vol 2 No 14. November/December 2014.

Brannen, J.1988. 'Research Note: The Study of Sensitive Subjects', The Sociological Review, Vol 36, hal 552-563.

Dickson-Swift, Virginia, Erica Lyn James dan Pranee Liamputtong (2009). Undertaking Sensitive Research in the Health and Social Sciences: Managing Boundaries, Emotions and Risks. Cambridge University Press

Goffman, Erving. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday

McCosker, Heather, Alan Barnard dan Rod Gerber. 2001. Undertaking Sensitive Research: Issues and Strategies for Meeting the Safety Needs of All Participants. FQS: Forum Qualitative Social Research Vol 2 No 1 Art 22 February 2001

Rodriguez, Leonor. 2018. Methodological Challenges of Sensitive Topic Research with Adolescents

## Bab 2

# Mendesain Penelitian Kuantitatif

Philips J. Vermonte dan Noory Okhtariza

Desain penelitian pada dasarnya adalah sebuah *prosedur*, yakni cara-cara yang terencana dan sistematis yang dipandu oleh metode atau kaidah-kaidah ilmiah tertentu dalam mendekati problem penelitian. Suatu penelitian yang baik selalu diawali oleh desain penelitian yang kuat. Desain penelitian akan menjadi semacam pegangan peneliti dalam melakukan proses penelitian lanjutan, yang biasanya meliputi pemilihan kasus, pengumpulan dan pengolahan data, menentukan teknik analisis, dan menuliskan laporan akhir. Hal ini dikarenakan desain penelitian akan membantu peneliti mempunyai *framework* alias kerangka kerja. Dengan cara ini, potensi kebingungan yang bisa saja dialami peneliti dalam tahap-tahap tertentu penelitian bisa diminimalisir. Tanpa kerangka kerja yang baik dan teruji, potensi penelitian berjalan tanpa arah yang jelas sangat mungkin terjadi.

Tentu saja dalam perjalanannya jarang sekali ditemukan desain penelitian yang sempurna. Proses menjalani penelitian itu sendiri terkadang tidak linear, dalam pengertian akan ada revisi dan penyesuaian yang diperlukan seiring waktu. Perubahan-perubahan ini terjadi karena banyak hal; mulai dari teori yang tidak sesuai, akurasi data yang buruk, hubungan antarvariabel yang kurang meyakinkan, atau bahkan ketidakjelasan problem atau dependen variabel yang ingin dijelaskan. Dalam banyak kasus, potensi munculnya persoalan-persoalan ini bisa diredam manakala peneliti melakukan *testing* atau *pilot project* sebelum penelitian sesungguhnya dimulai. Dengan cara ini, peneliti akan mendapatkan *sense* lapangan terkait visibilitas desain penelitian yang ia miliki, sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan.

Akan tetapi persoalannya tidak semua peneliti memiliki kemewahan melakukan *testing* (uji-coba). Keterbatasan waktu dan sumber daya finansial bisa menjadi penghalang dilakukannya studi awal. Ketiadaan studi ini berpotensi memunculkan kesalahan-kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Untuk itu sangat dihimbau kepada para peneliti agar tidak tergesa-gesa melakukan studi lapangan (jika memang studi lapangan atau *fieldwork* itu dibutuhkan) sebelum mereka yakin telah memiliki fondasi desain penelitian yang solid.

Penjelasan di bawah ini akan menguraikan secara lebih terperinci langkah-langkah menyusun desain penelitian. Secara lebih khusus, desain penelitian yang kami susun ditujukan untuk melakukan studi kuantitatif dengan topik yang sensitif. Berbeda dengan studi kualitatif yang biasanya berfokus pada *single case study*, studi kuantitatif biasanya mencoba menjelaskan *large-n* fenomena dengan tujuan menciptakan generalisasi. Dalam tulisan ini akan terlihat bahwa sekalipun topik yang diangkat dalam penelitian bersifat sensitif, tetapi desain penelitian perlu tetap mengacu pada dimensi-

dimensi penelitian yang sudah baku. Hal ini diperlukan guna mengukur keabsahan atau validitas dari desain penelitian yang digunakan. Sensitifitas topik dalam penelitian kuantitatif bergantung dari sejauh mana kita bisa menurunkan konsep-konsep/topik-topik yang sensitif ke dalam indikator atau variabel-variabel yang bisa diukur. Ini karena upaya ini memungkinkan peneliti bisa mengkuantifikasi fenomena sensitif yang menjadi objek penelitian. Dengan begitu, peneliti perlu memikirkan secara cermat apa *proxy* yang akurat dalam menerangkan fenomena penelitian.

Di bawah ini itu kami membagi desain penelitian kuantitatif ke dalam penjelasan yang lebih terperinci. Ada enam dimensi pokok desain penelitian yang meliputi: (1) identifikasi *problem* dan pertanyaan penelitian, (2) teori dan hipotesis, (3) operasionalisasi konsep dan penjelasan hubungan antarvariabel, (4) pengambilan dan pengumpulan data, (5) analisis deskriptif dan kausal, dan (6) penjelasan tentang implikasi penelitian.

### Identifikasi *problem* dan pertanyaan penelitian

Pemilihan *problem* biasanya selalu berbarengan dengan penentuan topik penelitian. Topik bersifat umum dan bisa mencakup apa saja. Sementara *problem*, yakni sekelumit persoalan yang ingin ditelisik lebih jauh, sifatnya lebih fokus dan spesifik. Pemilihan topik tidak dengan sendirinya menghadirkan suatu *problem* penelitian. Dan kejelasan tentang *problem* pada dasarnya adalah hal yang membedakan sebuah penelitian dengan reportase jurnalistik. Ini karena setiap *problem* biasanya mengandung asumsi dan mungkin proposisi-proposisi teoritis tertentu. Karena itu setiap peneliti perlu mengalokasikan waktu khusus untuk menentukan *problem* penelitian yang menarik.

Sayangnya, tidak ada panduan baku yang menjelaskan apa itu “*problem* yang menarik.” Peneliti bisa peroleh inspirasi dari mana saja; gap diantara literatur, *outlier* dari suatu trend umum, perbedaan (atau kesamaan) yang mencolok dari dua atau lebih kasus yang punya banyak kesamaan (dan perbedaan), atau bisa juga menjelaskan fenomena stabilitas tertentu yang terjadi dalam kurun waktu panjang. Selain itu, *problem* juga bisa berasal dari suatu *outcome* sebuah proses sosial yang dinamis. Misalnya, mengapa Orde Baru tumbang setelah berkuasa lebih dari 30 tahun? Mengapa konservatisme agama lebih kental di kota-kota besar?

Seberapa sensitif *problem* penelitian sebetulnya bukan menjadi bagian pokok dalam desain penelitian. Ini karena istilah “sensitif” itu sendiri lebih merupakan kata sifat, tetapi bukan bagian dari metode. Sedangkan penelitian dalam dirinya sendiri bersifat netral. Metode penelitian itu sendiri tak memiliki relevansi dengan implikasi praktis penelitian. *Problem* sensitifitas penelitian lebih merupakan implikasi, bukan prosedur kaidah akademik. Misalnya, jika penelitian yang dilaksanakan oleh Litbang suatu kementerian berusaha mengungkap derajat perilaku korupsi dalam birokrasi, maka implikasi penelitian bisa jadi menimbulkan dilema etika atau mungkin konflik kepentingan dalam kementerian tertentu. Penelitian seperti ini bisa menimbulkan

pertanyaan seperti seberapa *reliable* hasil penelitian yang dilakukan oleh internal birokrasi? Apakah penelitian bisa dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan? Dua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berdimensi praktis. Tetapi cara kita menentukan *problem* penelitian yang sensitif tetap perlu mengacu pada kaidah-kaidah penelitian yang sudah baku.

Di sisi lain, pertanyaan penelitian adalah langkah lanjutan setelah *problem* dirumuskan. Pertanyaan penelitian memiliki posisi yang amat sentral dalam sebuah penelitian. Ini disebabkan fungsi dari pertanyaan penelitian itu sendiri sebagai ‘pemandu jalan’ para peneliti. Kesalahan mengajukan pertanyaan penelitian bisa berakibat fatal, yakni kekeliruan memahami fenomena yang ingin dijelaskan.

Karena fungsinya adalah menjelaskan fenomena, maka elemen dasar di dalam pertanyaan penelitian adalah keberadaan dependen variabel, yakni suatu nilai atau kondisi yang eksistensinya bergantung dari satu atau lebih variabel lain. Dependen variabel ini lah yang nantinya menjadi ‘tujuan pembuktian’ peneliti yang dilakukan lewat argumentasi-argumentasi tertulis yang diturunkan dari teori dan data.

Dalam merumuskan pertanyaan penelitian, selain menyarankan agar pertanyaan penelitian memiliki bobot yang terkait dengan isu-isu yang dianggap penting oleh kaum akademisi. King et al (1994) menyarankan agar setiap peneliti menempatkan pertanyaan mereka dalam konteks literatur yang ada. Hal ini untuk memastikan sumbangan akademik kita pada literatur yang kita pilih, sekaligus juga memastikan bahwa penelitian memiliki pijakan akademik yang kokoh. Pertanyaan penelitian yang tidak dipandu studi literatur biasanya akan diabaikan komunitas akademik karena dianggap bukan suatu penelitian serius.

Agar lebih mengkonkritkan hubungan antara *problem* dan pertanyaan penelitian, perhatikan contoh berikut:

**Tabel 1: Perumusan Topik dan *Problem* Penelitian untuk Tema Reformasi Birokrasi**

Perumusan Topik	Reformasi birokrasi (topik) itu sulit dilakukan di Indonesia, tetapi kita percaya bahwa hal itu perlu terus didorong
<i>Problem 1</i>	Tingkat kedalaman reformasi birokrasi di institusi pemerintah, baik itu di tingkat pusat dan daerah, di kementerian, lembaga, dan dinas-dinas bervariasi
<i>Problem 2</i>	Ada institusi yang relatif berhasil melakukan perubahan dan lebih banyak lagi yang gagal. Sama halnya, ada institusi yang relatif cepat melakukan perubahan dan ada yang membutuhkan waktu lama

### Problem 3

Ada juga institusi yang melakukan reorganisasi secara parsial, ada yang secara menyeluruh, dan ada yang sifatnya temporer dan ada yang permanen

Identifikasi terhadap problem-problem di atas, bisa menjadi studi yang menarik untuk merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya variasi reformasi birokrasi di level kementerian di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan reformasi birokrasi itu berhasil? Dan apa faktor penghambatnya?

### Penggunaan teori dan/atau hipotesis

Jika pertanyaan penelitian adalah pemandu jalan, maka teori dan hipotesis adalah lampu penerangnya. Teori memberikan kita perspektif, sementara hipotesis membantu kita memilah-milah mana informasi yang esensial dan mana yang bisa diabaikan. Pemahaman akan teori akan sangat membantu manakala peneliti dihadapkan pada timbunan data dan informasi. Tanpa panduan teori dan hipotesis, peneliti bisa terjebak dalam deskripsi yang berkepanjangan.

Penggunaan teori berbeda dengan studi literatur. Studi literatur bertujuan membawa kita pada *research frontier* tentang riset-riset terdahulu yang bertema sama. Studi literatur penting dilakukan untuk meyakinkan komunitas ilmuwan bahwa kita tidak sedang mengulang hal yang sudah pernah dilakukan ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Studi literatur yang sistematis seharusnya membawa kita pada *gap* penelitian yang unik, yang merupakan hal yang orisinal dari penelitian. Dari sini baru lah peneliti bisa menempatkan studinya dalam literatur yang spesifik.

Dalam memilih teori, pilihlah teori yang bisa difalsifikasi atau dibuktikan salah (King et al, 1994). Teori yang tidak bisa difalsifikasi menyalahi kodrat dasar ilmu pengetahuan yang bersifat dialektis. Saran praktis dari ilmuwan terkait bagaimana falsifikasi dilakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan seperti ini: "Kasus atau temuan seperti apa yang bisa membuktikan bahwa teori saya salah?" "Apa yang saya perlukan untuk membuktikan bahwa teori saya salah?" Jika kita tidak bisa menemukan jawaban atas pertanyaan ini, maka teori yang kita pilih tak bisa difalsifikasi.

Selain itu cukup sering ditemukan kasus dimana sebuah teori tidak bisa begitu saja cocok diterapkan pada konteks yang dipilih. Dengan data yang kita kumpulkan, misalnya kita menemukan sebuah teori yang cukup mapan ternyata kurang relevan dengan kasus penelitian. Dalam kasus seperti ini, revisi minor dari suatu teori diperbolehkan sejauh kita bisa membuktikannya lewat data-data empiris penelitian (King et al, 1994). Ambil contoh, dalam menjelaskan performa lembaga antikorupsi Indonesia KPK, Choi (2011) menjelaskan keberadaan dan kerja KPK yang efektif dalam

konteks *low-quality governance* yang korup di Indonesia. Dengan berpegang pada kajian-kajian desain institusi, Choi berargumen bahwa keberhasilan KPK lebih disebabkan karena interkoneksi tiga hal: derajat otonomi organisasi, mandat *superbody* yang dilekatkan lewat desain undang-undang, dan dukungan publik yang kuat.

Sekarang dari tiga faktor itu (otonomi, mandat, dan dukungan publik), kita mencoba menjelaskan variasi reformasi birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga. Kita secara hipotetis menemukan bahwa TNI ternyata lebih cepat mereformasi diri dibandingkan lembaga lain misalnya jika dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang dijabat oleh para politisi. Tetapi, atas dasar temuan penelitian, ternyata ada juga lembaga lain yang berhasil mereformasi diri karena kuatnya pengaruh aktor-aktor kunci di dalam kementerian, tidak semata-mata tiga hal tersebut di atas. Dari sini kita membuat teori Choi menjadi lebih restriktif dengan menambahkan faktor lain. Restriksi semacam ini diperbolehkan dalam konteks penelitian tetapi dengan syarat adanya dukungan data-data atau temuan yang memang memadai, dan bukan dari asumsi atau perkiraan peneliti belaka. Artinya, pembuktian suatu teori yang kurang relevan harus didukung oleh observasi tambahan, alih-alih mencocok-cocokkan teori dengan data yang ada.

### Operasionalisasi konsep dan hubungan antarvariabel

Operasionalisasi konsep terkait dengan definisi spesifik ide-ide pokok penelitian. Konsep harus dijelaskan secara presisi dan terbatas sehingga pembaca menjadi paham limitasi dari sebuah penelitian. Termasuk di dalam limitasi ini adalah apa saja hal-hal yang ingin dijelaskan oleh peneliti, apa saja yang tidak termasuk dalam cakupan penelitian, dan bagaimana dan apa definisi konsep yang dipakai. Dalam penelitian dengan topik sensitif, memberi definisi, atau bahkan memilih definisi dari berbagai *contested concept* bisa sangat membantu peneliti mendapatkan fokus pada objek penelitian sekaligus membantu memilah data-data yang relevan.

Ambil contoh apa itu definisi demokrasi. Ilmuwan seperti Joseph Schumpeter dan Adam Przeworski memahami demokrasi secara 'minimalis' yakni mekanisme pemilihan pemimpin lewat Pemilu yang kompetitif. Dengan definisi ini, jika ada pemimpin di suatu negara terpilih lewat Pemilu yang tidak kompetitif, misalnya karena ada partai yang menang Pemilu lewat kecurangan, maka itu tidak masuk dalam kategori dua penulis di atas. Tetapi ada juga ilmuwan yang memberi definisi demokrasi sebagai proses deliberasi publik dan partisipatori, atau yang menghubungkan pengertian demokrasi dengan *outcome* pembangunan ekonomi. Tiga definisi tersebut memiliki referensi literatur masing-masing. Dan semuanya berpulang kepada kita, apa dan mengapa kita mengambil definisi tertentu dan apa justifikasinya. Kejelasan tentang definisi konsep ini akan membuat pembaca memahami penjelasan peneliti dengan lebih baik.

Di sisi lain, hubungan antarvariabel menandakan proses keterkaitan, asosiasi, korelasi, bahkan kausalitas antara dua atau lebih variabel. Dalam tradisi riset kuantitatif, biasanya hubungan antarvariabel ini dapat dijelaskan secara lebih gamblang. Hal ini disebabkan kecenderungan penelitian kuantitatif yang biasa menjelaskan penelitiannya ke dalam model hubungan antarvariabel yang spesifik. Selain itu *nature* riset kuantitatif juga senantiasa mengkuantifikasi fenomena sosial apa pun; bagaimana perubahan nilai variabel *X* akan mempengaruhi variasi nilai *Y*. Riset ini juga bisa menjelaskan *average effect* dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga peneliti bisa menguraikan secara lebih presisi variabel mana yang memiliki efek paling kuat terhadap *Y*. Terakhir, riset kuantitatif juga relatif lebih mudah dalam melakukan uji hipotesis (*hypothesis testing*). Dengan cara ini suatu hipotesis bisa diturunkan ke dalam beberapa variabel untuk diuji apakah hipotesis diterima atau ditolak.

Dalam penelitian dengan topik sensitif, konsep perlu diturunkan ke dalam indikator-indikator atau variabel yang terukur. Seberapa “sensitif” isu yang diangkat pada dasarnya tergantung bagaimana peneliti bisa menemukan *proxy* yang tepat untuk mengukur fenomena yang ingin dijelaskan. Dengan cara ini, peneliti bisa mengkuantifikasi fenomena sensitif yang menjadi objek penelitian dan memungkinkan suatu pendekatan yang objektif dan netral terhadap topik sensitif yang diangkat. Tetapi dalam menentukan *proxy* ini, peneliti perlu berpegang pada referensi literatur yang kuat. Sebisa mungkin *proxy* mengikuti literatur yang relevan dan sudah teruji di bidangnya. Sedangkan turunan konsep/topik sensitif bisa dilakukan lewat misalnya kuesioner-kuesioner dalam survei atau bisa juga dengan mencatat frekuensi kejadian/fenomena yang ingin ditelisik baik secara objektif (misalnya lewat laporan kliping koran, sensus, dan sumber-sumber sekunder lain) maupun subjektif (lewat *judgment* pribadi peneliti).

Dalam tradisi riset kualitatif, hubungan antarvariabel juga bisa dijelaskan secara spesifik. Karena kecenderungan riset kualitatif bertumpu pada banyak narasi, maka keterkaitan antarvariabel kunci perlu dijelaskan dibagian-bagian awal penelitian agar membantu para pembaca supaya tidak kehilangan arah penelitian. Keuntungan menjelaskan hubungan antarvariabel dalam riset kualitatif adalah peneliti bisa menentukan objek observasi yang perlu dikejar dalam studi lapangan. Selain itu hubungan yang jelas terkait variabel-variabel juga bisa membantu peneliti menjelaskan mekanisme kausal suatu fenomena penelitian. Mekanisme kausal menjelaskan hubungan sebab akibat suatu fenomena dengan menekankan aspek temporalitas, *timing*, dan sekuens dari suatu peristiwa (Mahoney & Thelen, 2015). Penjelasan mekanisme kausal ini adalah kelebihan yang jarang dimiliki penelitian kuantitatif.

## Pengambilan dan penggunaan data

Sumber data penelitian bisa berasal dari banyak tempat dan terkadang juga bisa berasal dari sesuatu yang tak terduga sebelumnya. Misalnya data yang paling umum dipakai



adalah yang berasal dari wawancara, FGD, survei, sensus, kliping berita, *database* yang tersedia secara *online* dan sebagainya. Tetapi ada juga data yang datangnya dari observasi umum peneliti, gosip informan, kesan-kesan, atau informasi-informasi 'rahasia'. Untuk penelitian dengan topik sensitif, misalnya tentang jaringan terorisme, kondisi perempuan di wilayah konflik, dan kontroversi isu Papua merdeka – pengambilan data biasanya mensyaratkan peneliti mengambil sedikit risiko dengan mewawancarai narasumber yang terlibat dengan konflik. Selain itu di era digital ini kita juga mengenal istilah *Big Data*. *Big Data* pada dasarnya merujuk pada jumlah observasi yang amat banyak (bisa sampai jutaan) yang tersedia karena penggunaan internet dan teknologi sehingga memungkinkan kita mengumpulkan sekian banyak informasi secara sistematis. Pengolahan *Big Data* ini membutuhkan keahlian khusus dan juga perangkat komputer yang memadai.

Terkait dengan kepentingan penelitian, adalah sangat penting bagi peneliti untuk melaporkan bagaimana data dikumpulkan. Peneliti harus transparan menjelaskan proses pengumpulan data. Misalnya jika melakukan wawancara, harus dijelaskan apa latar belakang informannya dan berapa jumlahnya. Jika melakukan survei harus dijelaskan siapa respondennya, bagaimana penarikan sampelnya, berapa jumlah respondennya, dan berapa batas galatnya (*margin of error*). Jika melakukan kliping berita, harus disebutkan apa sumber korannya, perodesasinya, dan bagaimana teknik klasifikasi isu (jika ada) yang dilakukan. Dengan melaporkan secara transparan cara pengambilan data, pembaca bisa memberi penilaian tentang validitas data yang kita miliki. Selain itu pembaca juga bisa mengetahui kekurangan-kekurangan penelitian manakala peneliti terkendala kualitas data yang kurang baik. Dengan cara ini peneliti membuka kemungkinan pemberian masukan-masukan untuk perbaikan penelitiannya ke depan.

Kemampuan menjalankan penelitian dengan kualitas data yang kurang baik adalah tantangan yang sering dialami peneliti. Justru peneliti yang baik adalah yang bisa mengkontekstkan penelitian, sekaligus mengambil kesimpulan dari keterbatasan data. Cukup sering peneliti berhadapan dengan persoalan data ini. Misalnya, bagaimana menguji teori dan hipotesis dalam kondisi data yang minim dan kurang berkualitas. Sekali lagi dengan melaporkan data secara transparan dan melaporkan kekurangan-kekurangan, komunitas pembaca bisa memberi penilaian atas kelebihan dan kekurangan penelitian.

Data sebaiknya bisa direplikasi. Replikasi data mensyaratkan validitas, yakni suatu proses yang sama dan dilakukan berulang-ulang akan menghasilkan hasil yang sama. Replikasi memungkinkan peneliti lain mengevaluasi hasil penelitian kita; apakah ditemukan kelemahan-kelemahan atau justru konfirmasi lebih lanjut dari penelitian lain dari temuan yang kita dapatkan. Bahkan menurut King et al (1994) sekalipun tidak ada orang yang akan mereplikasi data penelitian kita, sebagai peneliti sikap kita terhadap data adalah dengan meyakini *seolah-olah* data ini akan direplikasi.

Langkah selanjutnya dari pengumpulan data adalah bagaimana menggunakan data. Dalam riset kualitatif hubungan antara pengumpulan dan penggunaan data ini terkadang bersifat timbal-balik. Tetapi dalam riset kuantitatif biasanya hubungan ini agak sequensial di mana peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu, melakukan *cleaning*, kemudian baru menentukan bagaimana data akan digunakan. Penggunaan data dalam hal ini harus dipandu oleh teori dan hipotesis penelitian. Dengan cara ini kita menghubungkan antara data dan teori; apakah data mengonfirmasi atau justru menolak teori/hipotesis. Cara praktis untuk melakukan ini adalah dengan bertanya; “Jenis data seperti apa yang saya harapkan untuk membuktikan bahwa teori/hipotesis saya benar/salah?” Dari sini peneliti akan dipandu dalam menentukan jenis dan jumlah observasi yang diperlukan.

### Analisis deskriptif dan analisis kausal

Bagian analisis termasuk langkah akhir dari penelitian. Analisis tidak akan bisa dimulai sebelum peneliti punya gambaran besar bagaimana keterkaitan antara problem, pertanyaan penelitian, teori dan hipotesis, hubungan antarvariabel, dan data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis yang sifatnya deduktif lebih sering ditemui dibandingkan penelitian kualitatif yang lebih bersifat induktif. Ini karena kecenderungan penelitian kuantitatif yang lebih sering mengembangkan desain penelitian yang memang bertujuan menguji hipotesis tertentu. Sedangkan kecenderungan umum pada penelitian kualitatif adalah membantah atau mengonfirmasi suatu teori lewat temuan, atau keunikan-keunikan kasus yang diangkat.

Dalam tulisan ini kami membedakan dua jenis analisis: analisis deskriptif dan analisis kausal. Analisis deskriptif berarti peneliti mencoba menjelaskan hal-hal partikular dari observasi untuk mendapatkan gambaran umum tentang *universe* suatu fenomena. Hal paling umum misalnya di dalam survei opini publik. Dari gambaran partikular yang peneliti dapatkan lewat survei, peneliti kemudian mencoba memahami persepsi populasi di suatu negara. Dalam riset kualitatif, usaha menjelaskan yang universal dari hal-hal partikular ini juga bisa ditemukan. Peneliti tidak jarang melakukan klasifikasi observasi untuk memudahkan analisis. Misalnya dengan membagi observasi ke dalam beberapa tipologi berdasarkan berdasarkan usia, ideologi, latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya.

Analisis deskriptif juga digunakan manakala peneliti ingin menggambarkan sejauh mana suatu konsep berlaku atau tidak berlaku dalam kasus yang diulas. Suatu konsep yang ditulis dengan argumen pendukung akan membantu peneliti melakukan klarifikasi. Atau sebaliknya, peneliti bisa juga mengawali deskripsi tentang suatu kondisi tertentu yang lalu kemudian dihubungkan dengan suatu proposisi teoritis sehingga peneliti bisa memberikan perspektifnya dalam melihat suatu fenomena. Jika deskripsi persoalan tidak ditempatkan dalam suatu konsep tertentu, atau suatu proposisi teoritis tertentu,

maka penelitian menjadi sulit dibedakan dengan karya jurnalistik. Deskripsi harus mengarah kepada suatu konseptualisasi, bukan deskripsi demi deskripsi belaka.

Selain itu penting membedakan analisis deskriptif yang bersifat sistematis dan non-sistematis (Coullier et al, 2010). Komponen sistematis dan non-sistematis mesti dibedakan karena dalam penelitian sering ditemukan hal yang bersifat kontinyu dan konstan, serta ada pula hal-hal yang bersifat acak (*random*). Menuliskan analisis deskriptif yang sistematis mirip dengan usaha melakukan klasifikasi seperti yang dijelaskan di awal di mana peneliti menyederhanakan informasi-informasi ke dalam gugus-gugus yang bersifat konseptual. Sedangkan menuliskan komponen non-sistematis berarti peneliti menjelaskan sifat keacakan (*randomness*) dari observasi yang tidak berasal dari aktivitas atau kejadian rutin sehari-hari. Contoh-contoh kejadian non-sistematis misalnya, pandemi Covid-19, krisis ekonomi 1998, kasus korupsi yang menimpa pejabat terkait, dan seterusnya. Penulis sebisa mungkin mengevaluasi hubungan antara komponen sistematis dan non-sistematis dalam penulisan laporan penelitiannya.

Di sisi lain, analisis kausal sering disebut juga analisis inferensial, yakni bagaimana peneliti menjelaskan hubungan sebab-akibat dari fenomena yang diteliti. Hubungan kausal tidak boleh diasumsikan begitu saja, melainkan harus dibuktikan lewat prosedur-prosedur ilmiah yang bisa diuji validitasnya lewat data, asumsi, dan teori. Jika prosedur inferensial sudah dilakukan, peneliti bisa dengan percaya diri menyatakan 'klaim kausal' dari fenomena yang ia teliti.

Klaim kausal hanya bisa dilakukan jika ada asumsi-asumsi yang diterima, dan asumsi ini harus melatarbelakangi penggunaan teori. King et al (1994) misalnya mengajukan setidaknya dua syarat yang harus dipenuhi untuk uji kausalitas; homogenitas unit (*unit homogeneity*) dan independensi kondisional (*conditional independence*). Homogenitas unit berkaitan dengan bagaimana fenomena yang diobservasi memiliki karakteristik yang sama dengan fenomena lain yang sudah ter jelaskan dalam riset-riset terdahulu atau yang setidaknya sudah dikuatkan oleh teori-teori yang mapan. Homegenitas unit memiliki asumsi bahwa dalam kondisi dependen dan independen variabel memiliki *value* yang sama, dan semua hal di luar variabel bersifat konstan, maka *outcome* dari dua kasus pasti akan serupa. Asumsi ini banyak digunakan sebagai dasar bagi studi komparatif yang mengklaim bahwa perbedaan dalam dependen variabel adalah hasil dari variasi *value* dari independen variabel. Dengan berpegang pada studi komparatif terdahulu dan panduan-panduan teori yang ada, *problem* homogenitas unit ini perlu dibuat transparan dengan cara menjelaskan seeksplicit mungkin karakteristik dari observasi yang diangkat.

Independensi kondisional adalah asumsi yang menyatakan bahwa nilai variabel dependen dan independen tidak saling bergantung satu sama lain, melainkan independen diantara keduanya. Diilustrasikan: A dan B adalah dua variabel yang sama-



sama membentuk *outcome* variabel dependen C. Tetapi nilai A bersifat independen dari nilai B dan tidak saling mempengaruhi. Dan C bukan lah nilai yang mempengaruhi A dan B melainkan sebaliknya. Karena jika hubungan kausal antara A B dan C terbalik, maka penelitian terjebak pada *endogeneity problem*.

### **Implikasi penelitian**

Langkah akhir dari desain penelitian adalah menuliskan apa implikasi penelitian kita. Implikasi penelitian bisa berarti banyak hal; pemahaman yang lebih baik atas referensi literatur, perbaikan dan penguatan literatur, saran dan agenda riset ke depan setelah bukti-bukti ditemukan, dan bisa juga menjelaskan implikasi yang bersifat praktis-kebijakan. Implikasi penelitian dituliskan di bagian akhir dan biasanya diawali dengan *restating problem* penelitian serta temuan-temuan pokoknya. Dari sana lah, terlihat apa kesimpulan dari penelitian ini.



## Daftar Pustaka

Brady, H. E., & Collier, D. (Eds.). (2010). Rethinking social inquiry: Diverse tools, shared standards. Rowman & Littlefield Publishers.

Choi, J. W. (2011). Measuring the performance of an anticorruption agency: The case of the KPK in Indonesia. *International Review of Public Administration*, 16(3), 45-63.

Fowler Jr, F. J. (2013). *Survey research methods*. Sage publications.

King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research*. Princeton university press.

Thelen, K., & Mahoney, J. (2015). Comparative-historical analysis in contemporary political science. *Advances in comparative-historical analysis*, 3-36.

## Bab 3

# Pelaksanaan Survei dengan Isu-Isu yang Sensitif

Arya Fernandes

### Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan beberapa aspek yang perlu diperhatikan ketika melakukan survei opini publik, terutama survei dengan isu-isu yang sensitif, mulai dari persiapan, perencanaan, pengumpulan data hingga penulisan laporan. Sebelum memulai survei, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan survei dan tujuan pelaksanaan survei. Check & Schutt (2012) menyebut survei sebagai proses pengumpulan informasi yang berasal dari sampel individu berdasarkan respons mereka terhadap pertanyaan. Survei berguna untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik, tindakan dan opini dari populasi besar (Pinsonneault & Kramer, 1993). Survei juga bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kecenderungan yang tengah terjadi (Isaach & Michael, 1997) dan memetakan kebutuhan, mengevaluasi serta mengetahui pengaruh atau dampak sesuatu (Salant & Dilman, 1994).

Survei berbeda dengan Sensus, yang mewawancarai semua unit di populasi. Dalam survei, peneliti mengambil sampel secara acak dari unit populasi yang sudah ditentukan. Populasi dalam survei dapat dibagi dua, yaitu *populasi target* (kumpulan elemen yang akan diteliti) dan *populasi survei* (populasi yang sudah diacak untuk diperoleh datanya) (Frankel, 2010). Peneliti dapat memilih diantara metode dan teknik penarikan sampel dalam survei. Secara umum dapat dikelompokkan pada dua metode utama, yaitu sampel yang probabilitas dan sampel yang non-probabilitas. Keunggulan sampel probabilitas adalah dapat menggeneralisasi temuan survei pada tingkat populasi. Dalam sampel probabilitas, semua unit di populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih secara acak sebagai responden.

Setelah menentukan model penarikan sampel yang dipilih, peneliti dapat menentukan berapa sampel yang akan diambil dalam survei. Penentuan ukuran sampel dipengaruhi oleh beberapa aspek di antaranya, tingkat presisi yang diinginkan (*significance level* dan *confidence interval*), kekuatan data (statistik) yang diinginkan, kemampuan peneliti untuk mengakses subjek penelitian, derajat populasi yang dapat distratifikasi, dan seleksi terhadap unit yang relevan untuk dianalisis (Glasow, 2005). Selain itu, desain sample juga dipengaruhi oleh ketersediaan dana dan ketersediaan kerangka populasi (Frankel, 2010). Jumlah sampel yang dipilih akan mempengaruhi berapa dana yang akan digunakan, semakin besar sampel, akan semakin besar dana survei. Penentuan jumlah sampel juga akan menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan survei.

Dalam metode penarikan sampel secara probabilitas, *simple random samples* adalah tipe dasar dalam pengambilan sampel. Bila data tersedia, peneliti juga dapat melakukan *systematic random sampling*. Namun, di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, survei dengan populasi besar di tingkat nasional, hampir tidak mungkin

melakukan *simple random samples* atau *systematic random sampling* karena tidak tersedianya data populasi secara lengkap, berupa nama, jenis kelamin, alamat dan sebagainya. Terdapat beberapa pilihan yang dapat dilakukan untuk menyiasati kondisi tersebut dan untuk meningkatkan efektivitas biaya dan pelaksanaan, diantaranya (1) *stratified sampling*; (b) *cluster sampling*; (c) *multistage sampling* (Frankel, 2010).

## Survei dengan Isu Sensitif

Setelah menentukan metode dan teknik penarikan sampel yang dipilih, peneliti dapat mengidentifikasi sejumlah hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan survei, terutama survei dengan isu-isu sensitif. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas data adalah desain instrumen yang terukur dan proses pengumpulan data di lapangan. Seringkali, kegagalan pelaksanaan survei dengan isu sensitif terjadi karena peneliti kadang menghadapi permasalahan-permasalahan, terutama dalam mendesain instrumen untuk isu-isu sensitif, dan mengumpulkan datanya.

Dari sisi pertanyaan, survei dengan isu-isu sensitif dapat dikelompokkan pada tiga kategori yaitu: (1) pertanyaan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan responden untuk menyampaikan secara terbuka; (2) pertanyaan yang secara sosial jawabannya dianggap kurang patut (*social (un)desirability*), dan (3) pertanyaan sensitif tentang *privacy* responden (Tourangeau, Rips, dan Rasinski (2000).

Kategori	Keterangan
Pertanyaan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan	Misalnya tentang apakah responden pernah mengkonsumsi sabu, narkoba atau lainnya
Pertanyaan yang dapat menimbulkan implikasi hukum bagi responden jika menjawab secara terbuka	Misalnya survei menanyakan terkait pengalaman responden (ASN) apakah pernah menerima sesuatu berupa barang/uang yang diberikan masyarakat dalam pengurusan izin. Atau pertanyaan untuk mengevaluasi kinerja pimpinan dalam kementerian tertentu.
Pertanyaan yang jawabannya dianggap <i>taboo</i> secara sosial	Misalnya pertanyaan terkait dukungan publik terhadap pernikahan beda agama
Pertanyaan tentang <i>privacy</i>	Misalnya terkait pilihan dalam Pilkada atau pemilihan umum, pendapatan, dll

Terhadap pertanyaan-pertanyaan sensitif, ada dua kemungkinan sikap responden yang bisa terjadi, diantaranya: menolak untuk menjawab (*unit nonresponse*) atau menolak untuk menjawab pertanyaan tertentu (*item nonresponse*) (Tourangeau, Rips, dan Rasinski, 2000). Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah responden tetap menjawab saat ditanyakan isu-isu sensitif, namun tidak memberikan jawaban secara jujur.

Survei dengan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif mengandung sejumlah tantangan terutama dalam mengatasi kemungkinan terjadinya *non-response rate* yang tinggi. Untuk mengatasi *non-response* dan *misreporting* dalam survei dengan pertanyaan sensitif, dapat dilakukan dua hal, yaitu: memanfaatkan perangkat komputer/tablet pada pertanyaan sensitif, mendesain pertanyaan yang membuat nyaman responden. Sejumlah studi merekomendasikan penggunaan aplikasi untuk mengurangi angka *non-response*, merumuskan *question wording* dengan baik, dan melatih pewawancara (Tourangeau dan Yan, 2007). Penggunaan metode CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) untuk mengurangi *social desirability bias* terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, dibandingkan survei 'tradisional' menggunakan kertas.

## Pelaksanaan Survei

Dalam pelaksanaan survei dengan tema sensitif, manajemen dan persiapan pelaksanaan survei menjadi penting untuk memastikan kualitas data yang baik dan tingkat *response rate* yang tinggi. Proses perencanaan survei dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu: perencanaan, pengembangan, manajemen dan pengumpulan data, dan penyajian data (Kennedy et. al, 2010).

Pada tahap awal, perencanaan survei meliputi penentuan tujuan survei, penyiapan proposal dan *review* proposal survei, ruang lingkup pekerjaan, anggaran pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan survei, dan penyajian hasil survei. Pada tahap perencanaan, peneliti perlu memastikan bahwa pelaksanaan survei sudah mendapatkan izin dari instansi terkait, misalnya Kementerian Dalam Negeri untuk tingkat pusat, atau instansi terkait di daerah.

Tujuan survei harus menjawab pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam pembuatan proposal setidaknya ada tiga aspek utama yang mesti dijelaskan, yaitu tujuan pelaksanaan survei dan keluran (*output*), ruang lingkup pekerjaan, biaya pelaksanaan, dan periode waktu. Sementara dalam ruang lingkup pekerjaan dapat dijelaskan bagaimana tugas masing-masing tim pelaksana dan proses pembuatan desain dan kerangka sampel, waktu wawancara dan proses analisis dan pembuatan laporan. Dalam proses pembuatan anggaran ditentukan oleh jumlah responden yang akan disurvei dan jangka waktu pelaksanaan survei. Sementara dalam pembuatan *timeline* dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis data.

Tahap kedua, pengembangan survei meliputi penyiapan kerangka dan desain sample, penentuan cara pengumpulan data, dan penyiapan kuesioner. Ketiga, pelaksanaan survei meliputi pembagian tugas diantara tim kerja, baik tim manajemen operasional, tim lapangan, tim data, pelaksanaan *training* bagi pewawancara, dan kendali mutu. Keempat, Penyiapan laporan akhir survei, yang meliputi *data entry*, *data cleaning*, analisis data dan pembuatan laporan.

Dalam penelitian kuantitatif seperti survei opini publik, persiapan yang matang dan terukur sebelum melakukan survei sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan survei. Persiapan tersebut diantaranya adalah memastikan kualitas dan

validitas instrumen/kuesioner, memastikan proses pengumpulan data yang tepat, serta mengelola pelaksanaan survei yang efisien dan tertib.

## Pembuatan Kuesioner

Dalam pelaksanaan survei, kuesioner memegang peranan penting untuk mengukur secara tepat persepsi, dukungan, kecenderungan atau perilaku masyarakat agar dapat mencerminkan pendapat populasi. Desain kuesioner yang mudah dimengerti dan sudah diuji coba dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan survei dan menentukan jumlah responden yang berhasil diwawancarai (*response rate*). Studi Taherdoost (2016) menunjukkan adanya hubungan antara desain kuesioner dengan kualitas survei, akurasi data, dan *response rate*. Selain itu, ketidakpahaman responden terhadap kuesioner juga mempengaruhi angka *non-response* dalam survei (Toepoel dan Schonlau, 2017). Untuk menghindari tingginya *nonresponse*, peneliti dapat mengadopsi model pertanyaan terutama untuk isu sensitif yang sudah *reliable* dan teruji.

Sebagian besar pendekatan yang digunakan dalam pembuatan kuesioner sebaiknya mempertimbangkan *conventional wisdom*. Krosnick dan Presser (2010) merangkum beberapa *conventional wisdom* yang perlu diperhatikan dalam membuat kuesioner, diantaranya:

1. Menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami (hindari penggunaan jargon, bahasa gaul, atau penjelasan teknis)
2. Menggunakan sintaksis atau tata bahasa yang sederhana
3. Menghindari kata yang bermakna ganda (ambigu)
4. Menggunakan kata yang spesifik dan konkret (hindari kata yang umum dan abstrak)
5. Buatlah respons (opsi jawaban) yang lengkap
6. Hindari pertanyaan yang bertujuan mengarahkan jawaban responden atau memaksa responden untuk menjawab
7. Tanyakanlah satu hal dalam satu pertanyaan (hindari menanyakan dua hal dalam satu pertanyaan sekaligus, atau disebut juga *double-barreled*)
8. Hindari pertanyaan yang saling menegasikan

Pembuatan kuesioner juga harus mempertimbangkan sejumlah aspek teknis lainnya, seperti menempatkan pertanyaan yang mudah dijawab pada bagian awal kuesioner untuk membangun *rapport* antara responden dan pewawancara. Peneliti sebaiknya mengajukan pertanyaan yang relevan dengan topik survei pada bagian awal wawancara dan melakukan pengelompokan pertanyaan berdasarkan topik yang sama, dari yang umum ke khusus. Bila peneliti mengajukan pertanyaan sensitif dalam survei sebaiknya ditempatkan pada bagian akhir kuesioner (Krosnick dan Presser, 2010).

Umumnya pertanyaan dikelompokkan pada pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) dan pertanyaan tertutup (*closed-ended questions*). Pertanyaan terbuka biasanya digunakan untuk mendapatkan jawaban alamiah dan mendapatkan banyak kemungkinan jawaban dari responden, misalnya untuk menanyakan pendapat responden tentang alasan memilih seseorang sebagai kepala daerah atau presiden atau

menanyakan masalah utama yang menurut responden tengah terjadi. Sebelum dianalisis, pertanyaan terbuka dikategorisasi terlebih dahulu berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam mendesain pertanyaan, peneliti biasanya juga mengkombinasikan antara pertanyaan tertutup dengan pertanyaan terbuka, misalnya menambahkan opsi jawaban “lainnya” untuk menanyakan persepsi masyarakat terhadap permasalahan utama yang tengah dihadapi masyarakat.

Dalam pertanyaan tertutup, peneliti dapat memilih di antara beberapa opsi dari skala pengukuran, apakah menggunakan 7 skala, 5 skala, 4 skala, 3 skala (trikotomi), atau 2 skala (dikotomi)—tergantung jenis pertanyaan yang dibuat. Misalnya untuk menanyakan persetujuan responden terhadap kebijakan tertentu, kepuasan atau frekuensi.

Skala Pengukuran	Contoh
7	Sangat setuju, setuju, cukup setuju, biasa saja, cukup tidak setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju
5	Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju
4	Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju
3	Setuju, netral, tidak setuju
2	Setuju, tidak setuju

Dalam membuat kuesioner juga harus dihindari pertanyaan yang dapat membingungkan responden atau menanyakan dua kondisi yang berbeda (Krosnick dan Presser, 2010). Misalnya: “Dalam 12 bulan terakhir, seberapa seringkah Anda bertemu atau berkonsultasi dengan dokter atau perawat?” Dalam pertanyaan tersebut terdapat dua kondisi yang berbeda, yaitu pertemuan langsung secara tatap muka dengan dokter atau perawat atau bisa berkonsultasi melalui telpon atau menggunakan *e-mail* dengan dokter atau perawat. Untuk mendapatkan jawaban yang jelas apakah yang ingin diketahui pertemuan langsung atau tidak langsung, atau apakah pertemuan dengan dokter atau perawat, sebaiknya dalam kasus ini dapat dibuat empat alternatif pertanyaan:

1. Dalam 12 bulan terakhir, seberapa seringkah Anda berkonsultasi dengan dokter secara tatap muka?
2. Dalam 12 bulan terakhir, seberapa seringkah Anda berkonsultasi dengan dokter melalui telpon?
3. Dalam 12 bulan terakhir, seberapa seringkah Anda berkonsultasi dengan perawat secara tatap muka?
4. Dalam 12 bulan terakhir, seberapa seringkah Anda berkonsultasi dengan perawat melalui telpon?

Secara teknis dan format, peneliti sebaiknya menghindari kuesioner yang terlalu panjang dan memiliki banyak pertanyaan karena akan mempengaruhi konsentrasi responden, *response rate* survei dan kualitas data. Banyaknya pertanyaan dapat membuat responden bosan, sehingga dikhawatirkan responden akan menjawab asal-asalan atau menjawab “tidak tahu” saat ditanyakan. Sebelum penelitian dilakukan, kuesioner yang telah dibuat sebaiknya diuji-coba (*pretest*) terlebih dahulu. Uji-coba dapat dilakukan di daerah yang akan dipilih menjadi sampel penelitian. Terdapat beberapa keuntungan dalam menguji kuesioner.

1. Secara teknis dapat mengevaluasi tingkat pemahaman pewawancara dan responden saat proses wawancara dan mengetahui berapa lama proses wawancara dilakukan, serta mengetahui apakah responden mengalami kesulitan untuk menjawab.
2. Secara materi, pengujian berguna untuk mengetahui reaksi responden saat diajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan sensitif.
3. Secara statistika, pengujian berguna untuk mengukur validitas dan reliabilitas dari instrumen yang telah dibuat.

Setelah dilakukan uji-coba, kuesioner dapat direvisi, ditambahkan atau dihapus pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan topik riset.

## Pengumpulan Data

Setelah memastikan kuesioner sudah sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti dapat merancang dan memilih model pengumpulan data. Dalam pelaksanaan survei, metode pengumpulan data yang baik sepenuhnya dipilih secara acak (*random*) dan mempertimbangkan keterwakilan dan keragaman populasi. Sampel juga harus dipilih secara proporsional berdasarkan distribusi unit populasi. Data yang dipilih secara acak menggunakan pendekatan probabilitas, dan menerapkan prinsip *proportional to size* dapat mewakili pendapat umum dan digeneralisasi pada level populasi.

Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dapat dilakukan menggunakan beberapa cara, diantaranya wawancara langsung dengan responden (*face to face*), survei *online*/internet survei, survei telepon atau mengolah data dari *big data*. Pemilihan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya, bagaimana desain penelitian dan teknik penarikan sampel yang dipilih, ketersediaan dana, ruang lingkup dan jangka waktu penelitian, dan tujuan penelitian.

Setiap metode pengumpulan data memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Bila peneliti ingin menggenerasi temuan pada tingkat populasi dapat menggunakan teknik sampling probabilitas (*probability*), karena semua unit dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Contoh penelitian yang bisa dilakukan misalnya untuk mendapatkan persepsi masyarakat secara nasional terkait efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, peneliti sebaiknya menggunakan survei opini publik secara tatap muka. Sementara, bila peneliti ingin melihat bagaimana kecenderungan atau persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah di media sosial, peneliti dapat menganalisis kecenderungan dan perilaku

pengguna *Facebook*, *Twitter* atau *Instagram* menggunakan *tool* analisis sosial media, seperti *netlytic* atau yang lainnya. Berikut beberapa penjelasan terkait metode pengumpulan data penelitian:

### A. Wawancara tatap muka

Sebelum data dikumpulkan melalui proses wawancara lapangan, tenaga lapangan wajib mengikuti pelatihan. Materi pelatihan bisa mencakup proses penarikan sampel, proses dan etika wawancara, kendali mutu serta tugas-tugas administrasi lainnya. Dalam pelatihan, lembaga pelaksana survei perlu melakukan simulasi wawancara (tanya-jawab) agar pewawancara dapat merasakan suasana di lapangan saat melakukan simulasi wawancara. Pemilihan pewawancara lapangan yang berpengalaman juga dapat dipertimbangkan untuk memudahkan proses wawancara di lapangan. Penelitian Couper dan Groves (1992) menunjukkan bahwa pewawancara yang berpengalaman berhasil mendapatkan *response rate* yang tinggi dibandingkan pewawancara yang tidak berpengalaman. Pengalaman merujuk pada masa kerja pewawancara dan jumlah keterlibatan dalam survei. Pelaksana survei sebaiknya menyiapkan buku panduan survei yang berisikan cara pemilihan sampel, proses wawancara dan etika penelitian.

Dalam kasus survei opini publik di Indonesia, tingkat *response rate* survei di pedesaan biasanya lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Di desa, responden lebih mudah dijumpai dan dapat menerima pewawancara dengan ramah. Sementara, di perkotaan dengan tingkat kesibukan dan kepadatan penduduk yang tinggi, responden sulit untuk ditemui dan kadang-kadang menolak untuk diwawancarai, dengan alasan sibuk atau tidak bersedia.

Dalam perkembangannya, terutama survei dalam kondisi Covid-19, untuk meningkatkan efisiensi biaya dan waktu survei, sejumlah peneliti menggabungkan dua atau lebih metode pengumpulan data (*mixed-mode*). Metode penggabungan tersebut meningkat dilakukan seiring semakin populernya penggunaan survei telepon dalam riset-riset karena meningkatnya jumlah pengguna telepon. Pendekatan ini, awalnya dilakukan dalam Survei Angkatan Kerja di Inggris (*the British Labour Force Survey*) pada tahun 1984. Dalam survei tersebut, peneliti mengumpulkan data awal secara tatap muka. Setelah survei tatap muka, peneliti lalu melakukan survei panel setiap empat bulan menggunakan telepon berdasarkan data responden yang sebelumnya telah diperoleh secara tatap muka (Wilson, Blackshaw, dan Norris, 1998 dalam de Leeuw, 2005).

Menurut de Leeuw (2005) terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan peneliti dalam menggabungkan metode pengumpulan data, yaitu;

- (1) Menggabungkan dua cara pengumpulan data dalam waktu yang bersamaan dan menggunakan sampel yang berbeda. Misalnya, menggunakan survei tatap muka dan survei telepon dalam waktu yang sama untuk sampel yang berbeda;
- (2) Menggunakan dua cara pengumpulan data yang berbeda pada sampel yang sama untuk sebagian pertanyaan. Misalnya, menggunakan *Computer-Assisted Self-Interviewing* (CASI) untuk pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Dalam

CASI, responden diminta untuk menjawab pertanyaan menggunakan perangkat komputer untuk menghindari terjadinya bias kepatutan sosial (*social desirability bias*) atau menjaga privasi responden;

- (3) Menggunakan cara pengumpulan data yang berbeda pada responden yang sama, dan dilakukan di waktu yang berbeda. Biasanya, cara ini dilakukan untuk survei *longitudinal* atau panel. Misalnya, peneliti ingin melakukan *follow-up* survei menggunakan telepon berdasarkan data yang didapatkan dari survei tatap muka, dan;
- (4) Menggunakan cara pengumpulan data yang berbeda untuk populasi yang berbeda. Biasanya metode ini digunakan untuk melihat komparasi atau keunikan pada situasi negara/regional yang berbeda dan tergantung pada *constraint* dan tradisi survei yang pada setiap negara serta ketersediaan kerangka sample (*sample frame*). Misalnya, pemilihan metode pengumpulan data untuk membedakan dukungan terhadap demokrasi di masa Covid-19 pada negara maju dan berkembang. Survei pada negara maju dengan tingkat kepemilikan nomor telepon di atas 99 persen dapat menggunakan survei telepon menggunakan pengacakan RDD (*Random-Digit Dialing*). Di negara maju dengan ketersediaan kerangka sampel yang detail dan lengkap, seperti nama dan alamat, peneliti dapat menggunakan survei dengan mengirimkan kuesioner ke alamat responden (*mail surveys*). Lalu responden mengirimkannya kembali setelah diisi. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia dengan kepemilikan telepon yang tidak merata, survei harus dilakukan secara tatap muka.

Beberapa lembaga survei di Indonesia sudah menggabungkan dua cara pengumpulan data saat melakukan survei di masa Pandemi Covid-19, karena adanya larangan melaksanakan survei tatap muka pada masa Darurat Nasional Covid-19. Sejumlah lembaga survei memanfaatkan *dataset* responden yang mereka miliki untuk melakukan survei menggunakan telepon. Keberhasilan *follow-up* survei tatap muka dengan survei telepon pada sampel yang sama ditentukan oleh ketersediaan nomor telepon responden dan kesediaan responden untuk diwawancarai kembali (*response rate*). Dalam pengalaman lembaga-lembaga survei di Indonesia yang melakukan survei pada rentang April-Juli 2020 (pada darurat pandemi), tingkat *response rate* bervariasi dari rata-rata 19 sampai 26 persen.<sup>1</sup>

Sebagai catatan, proses pengumpulan data menggunakan telepon juga memiliki keterbatasan karena peneliti tidak dapat menanyakan banyak pertanyaan. Pertanyaan yang terlalu panjang dapat membosankan atau mengganggu waktu responden. Selain

---

<sup>1</sup> Diolah dari laporan Survei SMRC, Indikator Politik Indonesia dan Charta Politika Indonesia dalam waktu survei April – Juli 2020. SMRC melakukan 6 kali survei, Indikator (2 kali) dan Charta Politika Indonesia (3 kali).

itu, survei telepon juga tidak dapat menggunakan kartu bantu berupa gambar ketika proses wawancara dilakukan.

## B. Telesurvei dan Internet Survei

Selain wawancara tatap muka, model pengumpulan data lainnya yang jamak digunakan adalah telesurvei. Di negara-negara dengan tingkat kepemilikan nomor telepon di atas 90 persen, metode ini paling umum ditemukan dalam riset-riset opini publik. Namun, bagi negara dengan tingkat pengguna nomor telepon yang masih rendah, telesurvei memiliki keterbatasan, seperti keterwakilan dari populasi yang tidak memiliki nomor telepon (*undercoverage*), tingginya *non-response*, atau hasil survei bias kelas menengah dan perkotaan. Untuk menghindari disproportionalitas data karena adanya *non-response*, peneliti dapat melakukan pembobotan (*weighting*) dan penyesuaian (*adjustment*) secara statistik (Nathan, 2001).

Dalam telesurvei, metode penarikan sampel tetap mengikuti kaidah pengacakan (*sampling*). Yang biasanya populer digunakan adalah *Random Digit Dialing* (RDD) yang mengacak sampel dari populasi pengguna telepon. Sementara ketika memilih responden dalam rumah tangga, peneliti dapat memilih diantara beberapa metode seperti Kish Method, *Last-birthday Method*, atau Toldahl Carter Methods (Nathan, 2001).

Di Indonesia, pelaksanaan telesurvei dapat menggunakan direktori buku telepon yang diterbitkan oleh *YellowPages*, sebuah anak perusahaan PT Telkom. Pemilihan responden dapat menggunakan penarikan sample acak sistematis (*systematic random sampling*) dari buku direktori. Sebagai contoh, telesurvei sering dilakukan oleh *Litbang Kompas* untuk melihat sikap dan perilaku masyarakat secara cepat di sejumlah kota di Indonesia. Dalam laporannya, *Kompas* menuliskan sejumlah keterbatasan (*disclaimer*), diantaranya survei tidak bermaksud untuk mewakili pendapat populasi secara nasional di 34 provinsi.

Meskipun dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengumpulan data, survei telepon mengandung sejumlah kelemahan terutama terbatasnya kepemilikan telepon kabel (*fixed line telephone*) dan terjadinya penurunan kepemilikan telepon. Laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Telekomunikasi Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan kepemilikan telepon kabel di rumah tangga sejak tahun 2015. Secara agregat pada level nasional, terdapat penurunan kepemilikan telepon kabel dari tahun ke tahun dalam rumah tangga dari 4,01 persen pada tahun 2015 menjadi 3,49 persen (2016), 3,23 persen (2017) dan 2,61 persen (2018). Bila diturunkan pada level provinsi, kepemilikan telepon kabel juga sangat timpang. Kepemilikan telepon di DKI Jakarta paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Padahal penduduk di Jakarta tidak sampai 5 persen, berbeda dengan Jawa Barat yang lebih dari 15 persen. Bila dibandingkan berdasarkan karakteristik desa dan kota juga terjadi ketimpangan. Rumah tangga yang berada di kota lebih tinggi tingkat kepemilikan telepon dibandingkan rumah tangga yang berada di desa (Lihat Tabel 1). Ketimpangan

kepemilikan pengguna telpon tersebut, membuat survei telpon tidak bisa mewakili pendapat umum populasi.

**Tabel 1: Tingkat Kepemilikan Telepon Kabel Tetap (*Fixed Line*) Rumah Tangga dari tahun 2015-2018 (%)**

Kategori	2015	2016	2017	2018
Desa	0,51	0,45	0,43	0,26
Kota	7,28	6,39	5,7	4,57

Peneliti juga dapat memanfaatkan *database* populasi pada segmen tertentu untuk melaksanakan telesurvei. Misalnya, bila peneliti ingin mengetahui persepsi pengguna jenis kartu kredit tertentu terhadap kemudahan transaksi keuangan secara digital, dapat memanfaatkan data nasabah yang telah menyatakan kesediaan untuk diwawancarai. Selain telesurvei, beberapa cara pengumpulan data lainnya yang dapat dilakukan adalah menggunakan internet survei. Saat ini terdapat beberapa aplikasi yang sudah menyediakan platform survei online, baik yang berbayar atau gratis, seperti *SurveyMonkey*, *SurveySparrow*, *Google Forms*, *SoGoSurvey*, dan lainnya. Meskipun proses pengumpulan data lebih cepat dan lebih murah dibandingkan survei tatap muka, telesurvei dan internet survei untuk saat ini belum dapat mewakili pendapat populasi secara nasional, karena bisa bias pada segmen, atau unit populasi tertentu.

## Wawancara dan Penulisan Laporan

Kualitas data survei salah satunya ditentukan bagaimana wawancara dilakukan. Apalagi survei dengan tema-tema yang sensitif, seperti korupsi, radikalisme, dan persepsi publik terhadap kelompok-kelompok intoleran. Sebelum wawancara lapangan, pewawancara perlu diberikan pelatihan singkat bagaimana melakukan proses pengacakan untuk memilih responden, teknik wawancara, dan kendali mutu survei. Pelatihan tersebut penting untuk memastikan bahwa pewawancara sudah memahami tujuan dan pertanyaan survei yang akan ditanyakan serta memiliki informasi bagaimana cara pendekatan kepada responden untuk diminta kesediaan menjadi responden.

Proses perkenalan yang kurang dari lima menit sebelum memulai wawancara akan menentukan tingkat kesediaan responden untuk diwawancarai. Minat responden terhadap survei biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti adanya kenyamanan responden dengan pewawancara, ketertarikan terhadap topik survei, ketersediaan waktu yang luang, atau keinginan untuk berpartisipasi dalam riset. Dalam perkenalan, pewawancara harus bisa membangun kepercayaan dan kenyamanan responden dengan memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan wawancara, serta bila memilih responden secara acak, harus disampaikan mengapa responden tersebut terpilih sebagai sampel (prosedur pemilihan sample), serta menjelaskan berapa lama waktu wawancara dilakukan. Studi Groves dan Couver (1994) menunjukkan proses interaksi pewawancara dan responden mempengaruhi tingkat partisipasi survei. Pewawancara yang berpengalaman dan mampu menjelaskan secara baik tujuan survei

lebih tinggi kemungkinan berhasil mendapatkan responden untuk diwawancarai dibandingkan yang belum berpengalaman.

Karena wawancara sifatnya sukarela, dalam proses permintaan kesediaan menjadi responden, pewawancara sebaiknya mengganti responden yang mengaku tengah sibuk, tidak bersedia atau tidak tertarik untuk diwawancarai dan memilih kembali responden baru sesuai dengan prosedur acak. Studi Couper (1997) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pernyataan responden saat diminta kesediaan menjadi responden dengan kualitas data yang dihasilkan. Temuan Couper menunjukkan responden yang menyampaikan “tidak tertarik” untuk diwawancarai memiliki angka *missing data* yang tinggi dibandingkan responden yang mengatakan “sedang sibuk”.

Pewawancara juga harus menjelaskan bahwa penelitian yang tengah dilakukan adalah penelitian resmi, dengan menunjukkan keabsahan penelitian tersebut. Pewawancara juga perlu menyampaikan bahwa data-data yang diperoleh dari penelitian tersebut dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Pewawancara tidak boleh memaksa responden untuk diwawancarai bila responden mengaku tidak bersedia diwawancarai karena akan mempengaruhi kualitas data.

Untuk mendapatkan data yang baik, pewawancara perlu meminta kesediaan responden untuk diwawancarai (*legal consent/informed consent*). Beberapa contoh *informed consent* adalah:

“Selamat pagi Bapak/Ibu, perkenalkan saya (sebutkan nama responden), adalah pewawancara lapangan dari lembaga (sebutkan nama lembaga). Saat ini saya ditugaskan mewawancarai Bapak/Ibu tentang Pendapat Masyarakat terkait Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19. Bapak/Ibu terpilih melalui prosedur pengacakan yang telah kami lakukan secara bertahap. Penelitian ini resmi dan mendapatkan persetujuan dari kantor Desa/Kelurahan serta Kementerian Dalam Negeri. Data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam survei ini kami jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apakah Bapak/Ibu bersedia kami wawancarai dalam 30-45 menit ke depan?”

Dalam proses wawancara, pewawancara harus menaati setiap protokol wawancara yang telah disiapkan, misalnya membacakan kuesioner sesuai dengan *wording* yang ada dalam pertanyaan, tidak melakukan *probing* atau mengarahkan jawaban responden, serta sebaiknya wawancara tidak didampingi oleh pihak ketiga yang dapat mempengaruhi jawaban responden. Pewawancara juga harus memperhatikan pola pertanyaan, misalnya pertanyaan dengan pola lompat, pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang harus ditanyakan dengan menggunakan kartu bantu.

Setelah proses pengumpulan data di lapangan, proses selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah proses kendali mutu wawancara yang bisa dilakukan dengan mendatangi kembali responden terpilih secara acak (*spotcheck*), atau dalam proses

pengumpulan data bisa dengan meminta enumerator untuk mengaktifkan fitur *GeoTagging* sehingga tim supervisor dapat mengetahui keberadaan enumerator. Kendali mutu setelah pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan memverifikasi atau memvalidasi data lapangan dengan menelpon kembali responden terpilih dan menanyakan serta mencocokkan sejumlah pertanyaan kunci, biasanya yang wajib dicocokkan adalah data demografi serta memvalidasi proses pengacakan. Setelah data lapangan selesai divalidasi, proses selanjutnya adalah data entry dan data cleaning serta pengolahan dan analisis data. Proses analisis data dan penulisan laporan secara mendalam akan dijelaskan di bagian lain dalam buku ini.

Secara singkat, dalam pembuatan laporan survei perlu diperhatikan beberapa aspek mendasar, terutama penjelasan terkait metodologi, proses penarikan sample, validasi sample dengan populasi untuk survei dengan metode probability sampling. Untuk metode tertentu, peneliti juga perlu menyampaikan *disclaimer* untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran. Dalam Kode Etik Survei dan Lembaga Survei Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) (2020), diatur standarisasi pelaporan survei yang harus memuat: (a) sumber dana; (b) tujuan studi; (c) populasi; (d) jumlah dan metode penarikan sampel; (e) langkah-langkah yang diambil guna memastikan bahwa desain sampel benar-benar dijalankan, (f) derajat sukses dan validasi sampel; (g) deskripsi atas prosedur perkiraan dan pembobotan; (h) teknik pengumpulan data; (i) deskripsi kualitas kontrol; (j) waktu pelaksanaan survei; (k) temuan lengkap; (l) salinan penuh kuesioner; (m) deskripsi atas jumlah sampel untuk setiap analisis; (n) deskripsi atas presisi dan perkiraan kesalahan, jika sampelnya adalah probabilitas; dan (o) pemberian akses kepada publik untuk mengetahui lebih lanjut.

## Penutup

Dalam bagian dijelaskan bahwa peneliti perlu mempersiapkan dengan baik proses perencanaan, persiapan, manajemen lapangan, dan kendali mutu terutama untuk survei-survei dengan isu sensitif. Pelaksanaan survei dengan tema sensitif secara umum cukup sama dengan survei lainnya, namun harus memberikan perhatian pada aspek pembuatan instrumen riset serta pengumpulan data lapangan.

## Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2018. "Statistik Telekomunikasi di Indonesia 2018." Jakarta: Indonesia.

Couper, Mick P. 1997. "Survey Introductions and Data Quality." *Public Opinion Quarterly*. Vol. 61: 317-338.

Couper, Mick., and Robert Groves. 1992. "The Role of the Interview in Survey Participation." *Survey Methodology*, Vol. 18 (2): 263-277.

De Leeuw, Edith D. 2005. "To Mix or Not to Mix Data Collection Modes in Surveys." *Journal of Official Statistics*, Vol. 21 (2): 233-255.

Frankel, Martin. 2010. "Sampling Theory", dalam Marsden, Peter V, and James D Wright. 2010. "[Handbook of Survey Research](#)". *Second Edition*. Bingley, UK: Emerald Group Publishing.

Glasow, Priscilla. 2005. "Fundamentals of Survey Research Methodology". The MITRE Corporation.

Groves, R. M., and M. P Couper. 1994. "Householders and Interviewers: The Anatomy of Pre-Interview Interactions." SMP Working Paper no. 11. Ann Arbor: University of Michigan, Survey Research Center.

Kennedy et. al, .2010. "Managing Survey Research Project" dalam Marsden, Peter V, and James D Wright. 2010. "[Handbook of Survey Research](#)". *Second Edition*. Bingley, UK: Emerald Group Publishing.

Krosnick, Jon. A., and Presser, Stanley. 2010. "Question and Questionnaire Design" dalam Marsden, Peter V, and James D Wright. 2010. "[Handbook of Survey Research](#)". *Second Edition*. Bingley, UK: Emerald Group Publishing.

Nathan, Gad. 2001. "Telesurvey Methodologies for Household Surveys – a Review and Some Thoughts for the Future." *Survey Methodology*, Vol. 27 (1): 7-31.

Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI). 2020. "Kode Etik Survei dan Lembaga Survei." Jakarta: Indonesia.

Tourangeau, R., & Yan, T. 2007. "Sensitive questions in surveys." *Psychological Bulletin*, 133 (5), 859–883. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.133.5.859>

# Bab 4

## Menganalisis Data Kuantitatif

Vidhyandika D Perkasa

### Pendahuluan

Penelitian kuantitatif pada dasarnya menekankan pada pengukuran secara obyektif dan analisis secara statistik, matematis atau angka dari data-data yang dikoleksi melalui polling dan survei. Penelitian kuantitatif mengutamakan pengumpulan data numerikal dan berupaya mengeneralisasikannya kepada beberapa kelompok orang untuk menerangkan suatu fenomena yang khusus. Di bagian sebelumnya sudah dijelaskan tentang pembuatan kuesioner, bagaimana mengumpulkan data kuantitatif, bagaimana melakukan proses kontrol terhadap data dan akhirnya bagaimana memproses data tersebut (Babbie, 2010).<sup>2</sup>

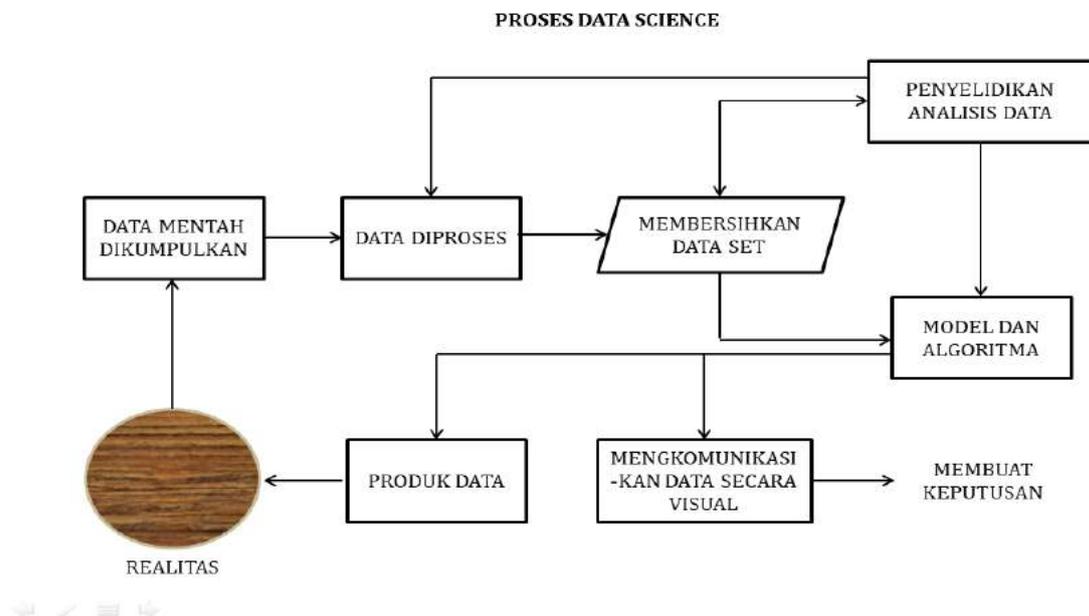
Di bagian ini akan dijelaskan bagaimana menganalisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah suatu proses untuk menginspeksi, membersihkan, mentransformasi suatu model untuk memunculkan informasi yang penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan serta menawarkan kesimpulan. Penelitian kuantitatif yang mengandung isu sensitif juga perlu untuk memikirkan bagaimana cara untuk memotret substansi yang dianggap sensitif, misalnya penelitian tentang korupsi, radikalisasi, dan politik identitas ke dalam instrumen kuantitatif tersebut, misalnya dalam kuesioner.

Sebagai pendukung untuk melakukan analisis data kuantitatif terkait isu-isu sensitif terkadang diperlukan suatu metode kombinasi yaitu antara kuantitatif dan kualitatif (*mixed methodology*), seperti yang sudah di terangkan di bab pertama dalam buku panduan ini. Kombinasi dari dua metodologi ini sering disebut sebagai 'analisis kuantitatif dari data kualitatif'.

---

<sup>2</sup> Earl R Babbie. 2010. *The Practice of Social Research*. 12<sup>th</sup> Ed. Belmont, CA: Wadsworth Cengage.

Grafik 1: Proses Data Science<sup>3</sup>



Setelah data diolah, diskusi dalam pembahasannya harus dilakukan secara kritis (*analytical*), logis dan komprehensif. Dalam proses analisis, data harus dapat diinterpretasi dengan baik, dan membandingkan serta membedakan hasilnya dengan pertanyaan penelitian. Selain itu, harus dipastikan apakah hasil analisis data tersebut mendukung atau menolak hipotesis awal yang sudah dikemukakan. Hasil analisis dari data kuantitatif harus bisa juga mendeskripsikan tren, perbandingan dari kelompok-kelompok serta hubungan antar variabel.

### Berbagai Format Analisis Data

Secara umum analisis data kuantitatif dapat memasukan satu atau beberapa pertimbangan di bawah ini:<sup>4</sup>

- Distribusi frekuensi dan ringkasan (*summary*) dari statistik
- Hubungan antar variabel
- Analisis sub-group
- Model-model statistik
- Mengeneralisasikan dari sampel ke populasi
- Analisis tren

<sup>3</sup> Anupama Pal. 2017. Quantitative Data Analysis and Representation. IJESC Vol 7 Issue No 3

<sup>4</sup> Module 4: Data, Analysis and Presentation, WHO on Behalf of the Special Program for Research and Training in Tropical Diseases 2014

Biasanya di dalam analisis kuantitatif variabel-variabel akan diklasifikasi berdasarkan tingkat pengukuran atau jenis data, sebagai contohnya adalah:

- Rasio misalnya berat anak, jumlah vaksinasi
- Interval (yang didasarkan pada 'equal intervals' yang sudah ditentukan), misalnya temperatur, pengukuran terhadap disabilitas
- Ordinal (ranks) misalnya fasilitas dan kualitas suatu pelayanan publik
- Nominal (kategori-kategori), misalnya nama desa/kelurahan

Di bagian ini akan dijelaskan beberapa format analisis data kuantitatif:

### A. Analisis Frekuensi

Salah satu format analisis data kuantitatif yang paling sederhana adalah analisis frekuensi. Dalam analisis frekuensi kita ingin mengetahui distribusi jawaban pada suatu pertanyaan. Pertanyaan di bawah ini diambil dari studi CSIS yang berjudul *Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia*. Fenomena korupsi dianggap sebagai suatu isu yang sensitif. Sebagai ilustrasi akan dicontohkan dengan pertanyaan di bawah ini:

*Apakah menurut Anda tingkat korupsi di Indonesia telah mengalami perubahan dalam kurun waktu dua tahun terakhir?*

1. *Menurun*
2. *Tidak berubah*
3. *Meningkat*

Melalui pertanyaan tersebut, kita ingin mengetahui berapa jumlah responden yang menjawab *menurun*, *tidak berubah* dan *meningkat* terhadap pertanyaan: apakah tingkat korupsi di Indonesia mengalami perubahan dalam kurun waktu dua tahun terakhir?.

Ukuran sampel total untuk survei ini adalah 3.900 responden. Jumlah ini terdiri dari 2.000 orang yang tersebar secara proporsional di 34 propinsi dan tambahan sebanyak 1.900 orang lain yang tersebar di lima propinsi yang dipilih secara khusus (Aceh, Banten, Papua, Riau, dan Sumatera Utara), dengan *oversampling* sebesar sebanyak 380 responden tambahan per propinsi. Propinsi-propinsi tersebut dipilih secara khusus karena merupakan prioritas bagi KPK.

Proses penarikan *sampling* yang digunakan untuk *sampling* tingkat nasional juga digunakan untuk propinsi-propinsi yang dilakukan *oversampling*. Dikarenakan jumlah penduduk yang besar, tiga propinsi lainnya secara otomatis memiliki N yang besar, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dengan demikian, di samping memberikan statistik secara nasional, survei ini secara statistik membandingkan data di delapan propinsi.

Populasi sasaran dalam survei ini adalah warga Indonesia berusia 19 tahun ke atas dan warga Indonesia di bawah 19 tahun yang telah menikah secara sah. Sampel dihimpun secara acak (*sampling* probabilitas) dengan menggunakan metode *sampling* acak dengan beberapa tahap (*multi-stage random sampling*) yang mempertimbangkan

proporsi antara keseluruhan ukuran sampel di masing-masing propinsi dan populasi secara keseluruhan. Pengumpulan sampel juga mempertimbangkan karakteristik lingkungan perkotaan dan pedesaan di masing-masing desa/kelurahan yang dipilih.

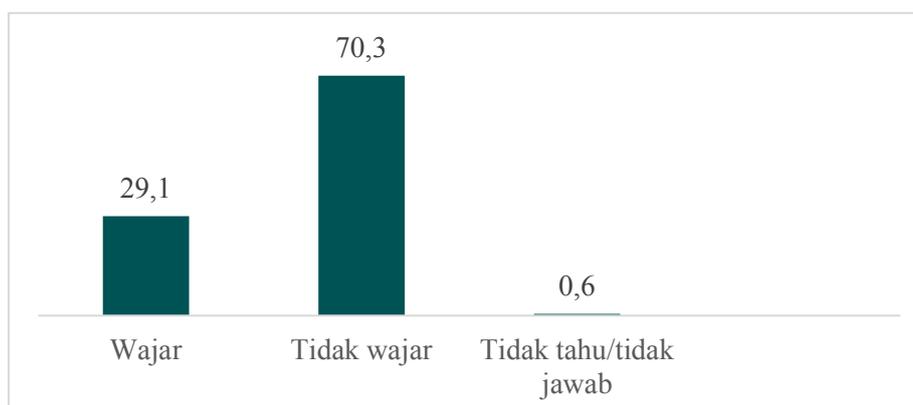
**Tabel 1: Pengukuran Frekuensi Sesuai dengan Value Label dan Persentase**

Value Label	Value	Frekuensi	Percent
Menurun	1	407	10.8
Tidak berubah	2	869	21.3
Meningkat	3	2624	66.4
Tidak tahu	4	-	-
Total		3.900	100%

*Value label* adalah pilihan dari jawaban dari suatu pertanyaan, sedangkan *value* adalah kode angka yang diterapkan di masing-masing jawaban tersebut sedangkan frekuensi adalah jumlah orang/responden yang telah memberikan jawaban, dan *percent* adalah persentase dari orang/responden yang telah memberikan jawaban pada masing-masing pilihan jawaban. Dari tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dinilai meningkat.

Agar menarik, seringkali hasil dari analisis data kuantitatif disajikan dalam bentuk grafik yang berwarna. Visualisasi dalam bentuk grafik akan memudahkan pembaca untuk memahami hasil dari data yang dianalisis.

**Grafik 2. Persepsi responden terhadap pemberin berupa barang/uang/hadiah untuk memperlancar urusan di kantor pemerintahan**



Dari grafik di atas, mudah terlihat bahwa sebagian besar responden berpendapat ada tren dari kenaikan tingkat korupsi di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Dalam hal ini sangat penting bahwa hasil dari suatu data kuantitatif yang telah dianalisis harus mudah

dipahami pembaca dan disinilah letak penting dari penggunaan suatu grafik, seperti yang ditestimonikan oleh Bob George dari Chaplin Hall Centre for Children:

*...”Kami berusaha untuk menggunakan grafik sebanyak mungkin. Kita sedang pada tahap di mana kita berusaha menggambarkan banyak hal sesederhana mungkin. Kami sedang tidak berusaha mendiskripsikan analisis yang kompleks yang kita lakukan melalui cara yang kompleks. Kami juga berusaha memakai bahasa yang sederhana. Tantangan terbesarnya adalah untuk mengungkapkan suatu hal secara sederhana agar semua orang mudah memahaminya”.*

#### (A) Tabulasi silang (Crosstabulation)<sup>5</sup>

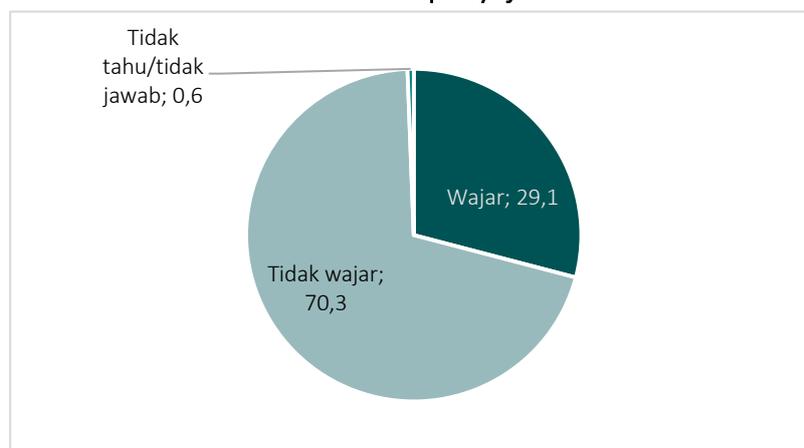
Selain analisis frekuensi, ada format lain untuk menganalisis data kuantitatif yaitu melalui tabulasi silang. Tabulasi silang merupakan suatu upaya untuk mempresentasikan data yang telah dikumpulkan untuk keperluan analisis. Tabulasi silang biasanya menyilangkan hasil dari suatu jawaban dari dua atau lebih pertanyaan yang berbeda. Suatu pertanyaan misalnya akan ditabulasi silang dengan variabel spasial (desa-kota), penghasilan atau pengeluaran, pekerjaan, jenis kelamin (laki-perempuan), kelompok umur, agama, provinsi dan lain sebagainya. Di sini data demografi dari responden menjadi penting.

Saya kembali akan mengambil contoh dari studi CSIS tentang fenomena korupsi di Indonesia. Ada pertanyaan tentang tingkat penerimaan atau toleransi terhadap korupsi sebagai berikut:

*Menurut pendapat Anda, apakah merupakan hal yang wajar bagi masyarakat Indonesia memberikan sesuatu (uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan/ketentuan) untuk memperlancar suatu proses pengurusan administrasi?*

1. Wajar
2. Tidak wajar

Grafik 3. Contoh penyajian data



<sup>5</sup> Analyzing Quantitative Data, Workbook 1

Dari hasil analisis di atas, sebagian besar penduduk atau 70,3 persen mengatakan tidak setuju memberikan sesuatu untuk memperlancar suatu urusan di kantor pemerintahan. Namun demikian, sekitar 29,1 persen merasa sebaliknya. Bila tingkat penerimaan terhadap korupsi diekstrapolasi dengan jumlah pemilih secara nasional, maka angka tersebut sama dengan 50 juta pemilih. Jawaban dari pertanyaan di atas bisa didalaminya dengan melakukan tabulasi silang, misalnya untuk mengetahui bagaimana pendapat orang yang tinggal di kota dan desa terkait sikap memberikan sesuatu untuk memperlancar suatu urusan.

**Tabel 2. Persepsi masyarakat terhadap praktek-praktek korupsi berdasarkan lingkungan tempat tinggal (%)**

Kategori	Wajar	Tidak wajar	Tidak tahu/ tidak jawab	Total
Desa	31,7%	67,8%	0,5%	100%
Kota	26,4%	72,8%	0,8%	100%

Dari 29,1 persen responden yang menganggap wajar pemberian berupa barang/uang/hadiah untuk memperlancar proses bila dianalisis berdasarkan karakter tempat tinggal, menunjukkan perbedaan kecenderungan. Data survei menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di daerah pedesaan sedikit lebih toleran terhadap praktik pemberian uang atau hadiah kepada pegawai pemerintahan daripada yang hidup di daerah perkotaan. Sekitar 31,7 persen responden di pedesaan mengatakan bahwa praktik tersebut dianggap wajar, sedangkan hanya 26,4 persen responden perkotaan yang mengatakan wajar.

Selain menganalisis berdasarkan desa-kota, tabulasi silang juga bisa dilakukan berdasarkan pengeluaran responden.

**Tabel 3. Persepsi masyarakat terhadap praktek korupsi berdasarkan tingkat pengeluaran**

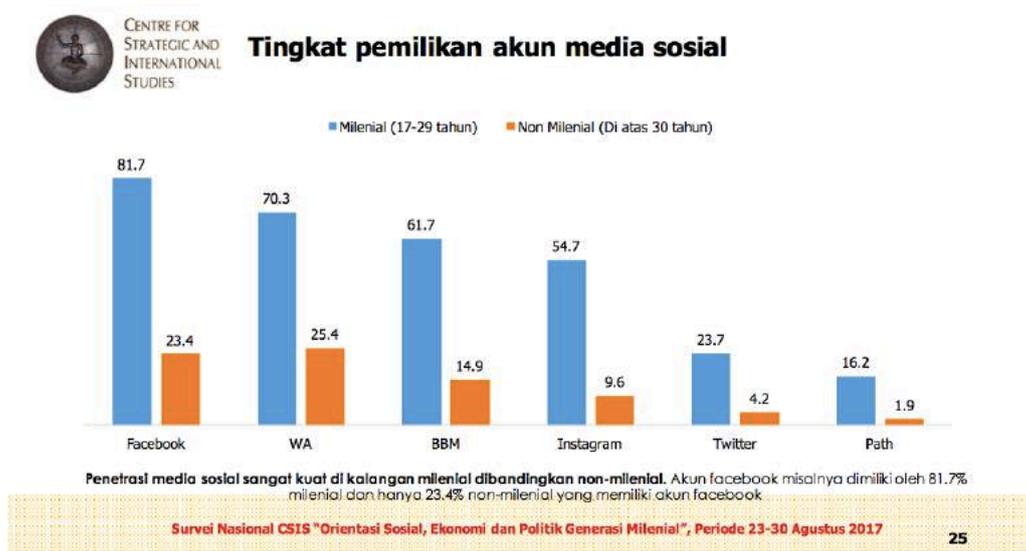
Kategori	Wajar	Tidak wajar	Tidak tahu/ tidak jawab	Total
Kurang dari Rp 1.000.000	31,4	67,9	0,7	100
Rp 1.000.000 - Rp 2.999.000	31,0	68,6	0,4	100
Rp 3.000.000 - Rp 5.999.000	24,3	75,0	0,7	100

Rp 6.000.000 - Rp 9.999.000	13,5	86,5	0,0	100
Rp 10.000.000 - 14.999.000	13,5	86,5	0,0	100
Di atas Rp 15.000.000	14,3	85,7	0,0	100

Setelah data dianalisis dengan melakukan tabulasi silang, menunjukkan bahwa warga dengan tingkat pengeluaran yang lebih rendah cenderung memandang praktik pemberian hadiah kepada pegawai pemerintah lebih dapat diterima. Titik *cutoff* tampaknya berada pada tingkat pengeluaran rumah tangga 6 juta rupiah per bulan. Mereka yang mengeluarkan kurang dari 6 juta rupiah per bulan cenderung lebih toleran terhadap praktek korupsi dibandingkan dengan mereka yang melakukan pengeluaran lebih tinggi.

Secara teknis, tabulasi silang disusun berdasarkan kolom (*column*) dan barisan (*row*). Kita dapat memilih pertanyaan apapun yang dapat digunakan sebagai variabel kolom lalu di *run* semua pertanyaan yang ditanyakan dalam survei sebagai variabel barisan. Misalnya, untuk mengetahui perbedaan kepemilikan akun sosial media berdasarkan karakter responden milenial dan non-milenial pada beberapa platform sosial media.

**Grafik 4. Tingkat kepemilikan akun media sosial berdasarkan milenial dan non-milenial<sup>6</sup>**



Dalam data tersebut terlihat perbedaan kepemilikan akun sosial media antara milenial dan non-milenial, berdasarkan platform sosial media. Facebook misalnya paling banyak

<sup>6</sup> Lihat Survei Nasional CSIS. (2017). Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik Generasi Milenial.

dimiliki oleh generasi milenial dengan kepemilikan akun mencapai 81,7 persen, dan hanya 23,4 persen dimiliki oleh generasi non-milenial.

Model *column* dan *row* dapat juga diterapkan dicontoh studi korupsi CSIS. Dalam *column* dapat ditanyakan pendapat responden apakah tingkat korupsi dalam dua tahun terakhir meningkat, menurun atau tetap sama. Di bagian *row* dapat ditabulasi silang antara persentase responden yang menjawab menurun, meningkat atau tetap sama dengan variabel laki-laki atau perempuan, dari tingkat pengeluaran, desa-kota, dan bisa juga dari aspek agama. Hal yang sama juga dapat diterapkan pada pertanyaan: apakah wajar memberikan sesuatu untuk memperlancar suatu urusan, di bagian *column* dan di bagian *row* atau barisan dapat ditabulasi silang dengan variabel jenis kelamin, pengeluaran, desa-kota dan lain sebagainya.

### **(B) Perbedaan Signifikansi (*Significant Differences*)**

Masih terkait dengan tabulasi silang, salah satu cara untuk mengetahui perbedaan antar kategori (misalnya, laki-laki dan perempuan) adalah dengan menjalankan uji statistik yang akan menjelaskan tingkat perbedaan dan signifikansinya. Di bagian atas sudah dijelaskan bagaimana responden milenial yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan non-milenial terkait kepemilikan akun sosial media. Jadi, uji signifikansi di sini adalah pengukuran dari suatu probabilitas atau kemungkinan bahwa perbedaan ini akan muncul dalam dunia nyata dan bukan disebabkan karena *error* dalam sampling. Bila perbedaan tidak signifikan secara statistik, maka tidak perlu dilaporkan.

Dalam uji signifikansi biasanya ada tiga uji statistik dasar yang akan dipakai yaitu *difference* dari *proportion test*, *Chi square* dan *t-test*. Disini letak penting dari *software* komputer untuk menganalisis data ini.

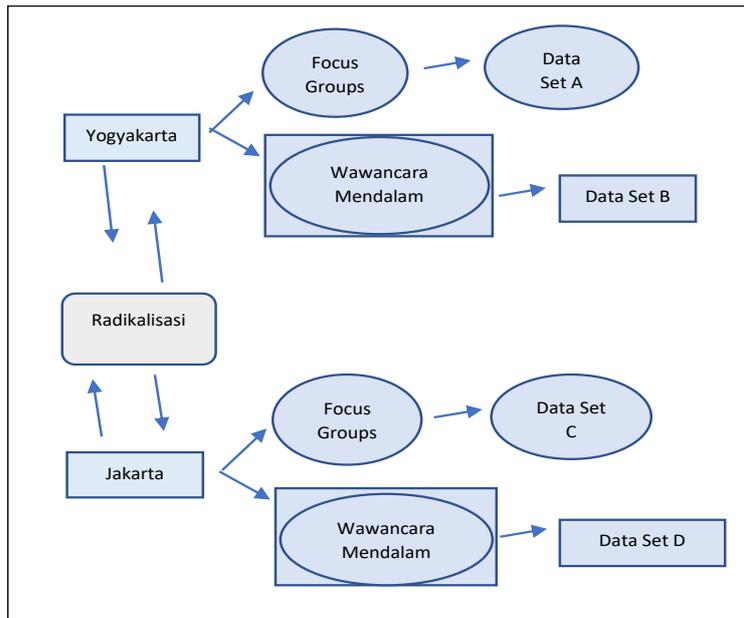
## **B. Analisis Kuantitatif dari Data Kualitatif**

Seperti sudah dijelaskan di bab awal dalam buku panduan ini, seringkali penelitian tentang isu-isu sensitif memerlukan cara menganalisis data melalui kombinasi dari metode kuantitatif maupun kualitatif. Di bab awal tersebut juga sudah dijelaskan kelemahan dan kelebihan dari baik metode kuantitatif maupun kualitatif dalam meneliti tentang isu-isu sensitif ini. Agar validasi dari aspek data atau temuan tercapai maka diperlukan metode 'kombinasi' ini atau seringkali disebut sebagai analisis kuantitatif dari data kualitatif.<sup>7</sup>

Dalam metodologi tersebut, kita tetap berpegangan pada proses pengumpulan data secara kualitatif. Artinya data dikumpulkan melalui FGD (Focus Group Discussion) atau Kelompok Diskusi Terfokus dan juga wawancara mendalam.

---

<sup>7</sup> Michael D Kaplowitz. 2000. Statistical Analysis of Sensitive Topics in Group and Individual Interviews. Quality and Quantity 34: 419-431.



**Grafik 5: Desain Penelitian tentang Isu Sensitif dan Radikalisasi**

Sebagai ilustrasi untuk menggambarkan kombinasi metodologi ini, dapat dibuat contoh sebuah studi tentang isu sensitif ‘radikalisasi’ yang diambil di dua kota besar yaitu di Yogyakarta dan Jakarta. FGD diadakan sebanyak 12 kali dan wawancara mendalam dilakukan dengan 19 informan. Studi ini mengetahui apakah bahasan terkait ‘radikalisasi’ memunculkan isu-isu yang sensitif dimata para peserta FGD maupun wawancara mendalam. Dengan kata lain, secara metodologi kita ingin mengetahui apakah data dari FGD dan wawancara mendalam akan ‘menunjukkan informasi yang sama’ atau tidak terkait persepsi responden/informan terhadap isu radikalisis. Masing-masing aktivitas yang dijalankan yaitu FGD dan wawancara mendalam akan menghasilkan sebuah data set. Setiap kota akan memiliki dua data set, masing-masing dari hasil FGD dan wawancara mendalam.

Untuk menganalisis data kualitatif yang dapat serta untuk menguji hipotesa penelitian, sebuah test statistik dilakukan. Analisis statistik dari data kualitatif dianggap berguna. Data kualitatif ini dapat dikuantifikasi dengan menggunakan frekuensi, *t-test* dan analisis dari variasi (*analysis of variance*).

**Tabel 4: Jumlah FGD dan Wawancara Mendalam yang Membahas Isu Sensitif**

		Tipe Interview		
		FGD	Wawancara Mendalam	Total
Topik sensitif	Ya	1	12	13
	Tidak	11	7	18
Total		12	19	31

Tabel 5: *Test Chi-Square* dari homogenitas dari FGD dan Wawancara Mendalam yang Membahas Isu Sensitif

	Nilai (Value)	df	Asymp.sig (2-sided)
Pearson chi-square	9.079a	1	0.003
N	31		

Hasil dari tabel 4 dan 5 di atas menunjukkan hasil cross-tabulasi dari topik sensitif dan tipe aktivitas penggalan data (FGD dan wawancara mendalam) dikaitkan dengan *test chi-square* dari homogenitas. Topik yang sensitif dibahas baik di FGD maupun wawancara mendalam, namun ada perbedaan dalam frekuensi yang dibahas selama FGD dan wawancara mendalam tersebut. Dalam bahasan mengenai radikalisme dan isu sensitif ada 1 FGD yang mengungkap sensitifitas dari topik tersebut sedangkan dalam 11 FGD yang lain pesertanya tidak melihatnya sebagai suatu topik yang sensitif. Sedangkan selama wawancara mendalam ada 12 informan yang melihat radikalisme sebagai topik yang sensitif, sedangkan 7 yang lain tidak melihatnya sebagai hal yang sensitif. Hasil dari *Pearson test chi-square* tidak mendukung hipotesis bahwa FGD cenderung membahas radikalisme dan isu sensitif daripada wawancara mendalam,  $p=0.003$ . Penjelasan di atas dimaksudkan untuk memberi contoh bagaimana campuran metodologi dalam mendukung suatu validitas dari suatu analisis data. Tentu saja ada berbagai macam metodologi campuran lainnya.

### Statistik dalam Analisis Data Kuantitatif

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, analisis data kuantitatif sangat mengandalkan komputer di mana data disimpan secara elektronik. Banyak *software* yang dipakai untuk membantu menganalisis data kuantitatif seperti SPSS, SAS (Statistical Analysis System), ABtab, AIDA, INTER-STAT dan lain sebagainya.

Statistik-statistik tersebut pada dasarnya akan membantu untuk menghasilkan data sebagai berikut:<sup>8</sup>

- Seperti telah dijelaskan sebelumnya, **frekuensi** mendeskripsikan berapa kali sesuatu muncul dalam interval tertentu, misalnya dalam kategori tertentu atau waktu tertentu
- Suatu **persentase** adalah jumlah dari suatu unit dibagi dengan jumlah total unit dan dikalikan 100. Persentase merupakan cara yang paling efektif untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda atau waktu tertentu. Misalnya,

<sup>8</sup> Evaluation Briefs: Analyzing Quantitative Data for Evaluation No 20 August 2018. US Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention

bila 50 dari 100 peserta pelatihan adalah guru kelas, 50 persen dari peserta training adalah guru kelas

- Suatu **rasio** menjelaskan hubungan numerical antara dua kelompok. Misalnya rasio dari jumlah murid pada suatu sekolah (300) terhadap jumlah guru pada sekolah yang sama (25) adalah  $300/25$  atau 12:1
- **Mean, median dan mode** adalah tiga pengukuran dalam suatu data set. *Mean* atau rata-rata ditentukan dengan menjumlah semua nilai dan dibagi dengan jumlah total unit di dalam sampel tersebut; median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Sedangkan sebuah mode adalah kategori dari nilai yang sering muncul dalam suatu data set

Setelah kita menganalisis data-data yang ada kita perlu untuk mereview hasilnya untuk mencari pola dalam suatu data. Ada persamaan dan perbedaan jawaban dari responden berdasarkan karakteristik yang berbeda. Kita bisa menentukan apakah data yang masuk itu secara signifikan di atas atau dibawah *mean, median* dan *mode*. Data-data yang sudah diolah perlu dipresentasikan dalam suatu diagram, tabel atau *charts*. Tabulasi silang sering dipakai untuk mepresentasikan hasil tersebut.

### Potensi *Error* dalam Analisis Data Kuantitatif

Penelitian kuantitatif yang fokus pada isu-isu sensitif secara inheren mengandung resiko terjadinya kesalahan baik dalam rancangan awal maupun pada tahap analisis data. Meskipun benar bahwa angka tidak berbohong, peneliti yang mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkannya punya potensi untuk membuat kesalahan dalam tahapan-tahapan tadi sehingga akan mempengaruhi validitas dari analisis yang dihasilkan. Di bagian ini akan di bahas beberapa eror yang sering dijumpai dalam proses rancangan awal maupun pada tahap analisis data.<sup>9</sup>

*Pertama*, tidak cukup bertanya dengan orang atau salah menentukan orang yang ditanya (*representative sampling*). Hal ini terkait dengan pengambilan sampel. Untuk mendapatkan wawasan yang signifikan secara statistik, penting untuk merekrut ukuran sampel yang memadai untuk survei kuantitatif yang akan kita jalankan.<sup>10</sup> Semakin besar sampelnya, semakin tidak rentan terhadap *error* dan semakin mewakili populasi yang lebih besar dari penelitian yang akan mendukung keakuratan dari analisis data yang dihasilkan. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi target responden yang sesuai dengan studi tentang isu-isu sensitif ini sehingga mereka paham terhadap substansi dari penelitian ini bila metode yang diambil adalah purposive sampling.

Secara lebih detail, memastikan sampel yang representatif adalah salah satu prinsip paling mendasar dari statistik inferensial. Sampel yang dituju harus mewakili populasi target agar kesimpulannya valid. Skenario yang ideal adalah ketika sampel dipilih

---

<sup>9</sup> Penjelasan tentang eror dalam analisis data diambilkan dari Clay Helberg. Pitfalls of Data Analysis (or How to Avoid Lies and Damned Lies) (<http://www.execpc.com/~helberg/pitfalls/>)

<sup>10</sup> Lihat juga Bab....dalam buku panduan ini yang membahas tentang pelaksanaan survei

dengan memilih anggota populasi secara acak, dengan setiap anggota memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Tetapi seringkali orang biasanya mencoba untuk memastikan bahwa sampel "sejajar" dengan populasi sehubungan dengan karakteristik kunci tertentu yang dianggap penting untuk penyelidikan saat ini, seperti dengan prosedur pengambilan sampel bertingkat (*multistage-random sampling*).

*Kedua*, secara langsung memperlakukan hasil analisis sebagai statistik yang sudah diverifikasi.<sup>11</sup> Sangat menggoda untuk mengasumsikan bahwa karena studi kuantitatif dengan isu-isu sensitif akan diukur dalam angka dan persentase, maka secara otomatis studi tersebut dianggap sempurna. Tetapi banyak yang harus dilakukan sebelum data yang telah dikumpulkan dapat divalidasi sehingga bermakna secara statistik. Harus dipastikan bahwa desain penelitian, skema pengambilan sampel, dan metode pembersihan data teliti dan sesuai, sehingga kita pada awalnya harus memperlakukan hasilnya seperti angka yang pada dasarnya tidak berarti sampai pada keyakinan sudah melakukan proses analisis data dengan benar.

*Ketiga*, melakukan komparasi bertingkat (*multiple comparison*). Ini adalah masalah yang sangat pelik, karena sering kali masalah sosial terkait isu-isu sensitif sifatnya kompleks. Peneliti perlu memeriksa banyak kombinasi faktor yang berbeda untuk melihat apa yang terjadi. Namun, bila melakukannya dengan cara yang sembarangan bisa berbahaya dan akan berpengaruh pada validitas hasil analisis. Misalnya saja, setiap perbandingan yang dibuat (dengan asumsi menggunakan model pengujian hipotesis standar) memerlukan risiko kesalahan Tipe I yang sama dengan alfa yang telah ditentukan sebelumnya.

*Keempat*, kesalahan dalam pengukuran (*measurement error*). Sebagian besar model statistik mengasumsikan bahwa dalam fase pengukuran peneliti bisa bebas kesalahan, setidaknya pada waktu menentukan variabel independen. Namun, pengukuran jarang dilakukan secara sempurna, terutama ketika berhadapan dengan data yang 'berisik' seperti respons kuesioner atau proses yang sulit diukur secara tepat. Untuk itu, peneliti perlu memperhatikan dampak dari suatu kesalahan dalam melakukan pengukuran. Dua karakteristik pengukuran yang sangat penting dalam pengukuran ilmu sosial termasuk dalam meneliti isu-isu sensitif adalah reliabilitas dan validitas. Reliabilitas mengacu pada kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur hal yang sama setiap kali digunakan. Jadi, misalnya, pengukuran yang tepat akan memberikan hasil yang

---

<sup>11</sup> <https://www.gutcheckit.com/blog/5-pitfalls-quantitative-research-avoid/>

serupa jika unit (orang, proses, dll.) yang diukur serupa. Selain itu, jika karakteristik yang diukur stabil dari waktu ke waktu, pengukuran berulang dari unit yang sama akan memberikan hasil yang konsisten. Bila tidak menunjukkan hasil seperti ini berarti ada suatu kesalahan dalam proses pengukuran. Sedangkan, validitas adalah sejauh mana indikator mengukur hal yang dirancang untuk diukur. Validitas biasanya diukur dalam kaitannya dengan beberapa kriteria eksternal, mis. Hasil pada kuesioner pelamar pekerjaan dapat dibandingkan dengan ulasan karyawan berikutnya untuk memberikan bukti yang mendukung validitas dari hasil analisis data.

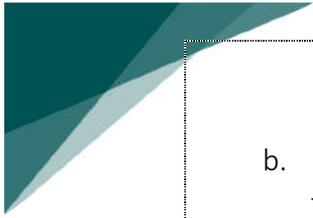
*Kelima*, bingung terhadap hasil yang '*over-significance*'. Ini adalah permasalahan interpretasi data. Seringkali terjadi kebingungan dalam memahami "signifikansi" dalam arti statistik dan "signifikansi" dalam arti praktis. Masih ada kecenderungan kuat bagi orang untuk menyamakan bintang dalam tabel dengan pentingnya hasil. "Oh, nilai p kurang dari 0,001 - itu efek yang sangat besar." Signifikansi (dalam arti statistik) sebenarnya adalah fungsi dari ukuran sampel dan desain eksperimental dan juga fungsi dari kekuatan hubungan. Dengan kekuatan yang rendah (*low power*), peneliti sering mengabaikan hubungan yang sebetulnya sangat penting; dengan kekuatan yang berlebihan (*excessive power*), peneliti sering menemukan efek mikroskopis yang dianggap penting padahal tanpa nilai praktis yang nyata.

*Keenam*, permasalahan presisi dan akurasi analisis data. Ini adalah dua konsep yang tampaknya sangat membingungkan, terutama oleh mereka yang tidak cenderung matematis. Presisi mengacu pada seberapa tepat suatu perkiraan ditentukan (serupa dengan jumlah tempat desimal yang diberikan, misalnya 4,0356 lebih tepat daripada 4,0), sedangkan akurasi mengacu pada seberapa dekat suatu perkiraan dengan nilai sebenarnya. Perkiraan bisa tepat tanpa akurat, suatu fakta yang sering diabaikan saat menafsirkan analisis data dari komputer dimana hasil seringkali ditentukan ke tempat desimal keempat atau keenam atau kedelapan. Solusi untuk menghindari *error* jangan laporkan tempat desimal lebih dari yang kita yakini mencerminkan sesuatu yang berarti. Jadi, jika kesalahan standar dari sebuah mean adalah 1,2, tidak ada gunanya melaporkan tempat desimal ketiga atau keempat dari perkiraan mean. Hal itu akan mempengaruhi validitas dari data yang kita analisis.

*Ketujuh*, menentukan kausalitas. Banyak peneliti tidak memahami dengan jelas tentang kausalitas, padahal kausalitas adalah dasar analisis statistik. Inti dari inferensi kausal adalah peneliti harus memiliki tugas acak. Artinya, pelaku eksperimen haruslah yang menetapkan nilai variabel prediktor untuk kasus. Jika nilai tidak ditetapkan atau dimanipulasi, hal yang perlu dilakukan adalah menunjukkan bukti dari suatu hubungan. Studi observasional sangat terbatas dalam kemampuannya untuk menerangi hubungan sebab akibat.

Dari penjelasan di atas sudah diterangkan berbagai potensi kesalahan dalam proses analisis data. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Pastikan sampel mewakili populasi yang diminati.

- 
- b. Pastikan memahami asumsi prosedur statistik. Secara khusus, waspadalah terhadap data yang diatur secara hierarkis (non-independen); gunakan teknik yang dirancang untuk menghadapinya.
  - c. Pastikan untuk menggunakan alat pengukuran terbaik yang tersedia.
  - d. Waspadaai banyak perbandingan. Jika harus melakukan banyak pengujian, coba replikasi atau gunakan validasi silang untuk memverifikasi hasil data yang ada.
  - e. Ingatlah dengan jelas apa yang coba ditemukan dan jangan tergoda oleh bintang di tabel Anda; lihat besarnya daripada nilai-p.
  - f. Gunakan notasi numerik dengan cara yang rasional. Jangan bingung antara presisi dengan akurasi
  - g. Pastikan memahami kondisi untuk inferensi kausal. Jika perlu membuat kesimpulan kausal, coba gunakan tugas acak. Jika itu tidak memungkinkan, perlu mencurahkan banyak upaya untuk mengungkap hubungan sebab akibat dengan berbagai pendekatan untuk pertanyaan tersebut.
  - h. Pastikan grafik akurat dan mencerminkan variasi data dengan jelas.

## Daftar Pustaka

Analyzing Quantitative Data, Workbook 1

Anupama Pal. 2017. Quantitative Data Analysis and Representation. IJESC Vol 7 Issue No 3

Earl R Babbie. 2010. The Practice of Social Research. 12<sup>th</sup> Ed. Belmont, CA: Wadsworth Cengage.

Evaluation Briefs: Analyzing Quantitative Data for Evaluation No 20 August 2018. US Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention

Helberg, Clay. Pitfalls of Data Analysis (or How to Avoid Lies and Damned Lies) (<http://www.execpc.com/~helberg/pitfalls/>)

Kaplowitz. Michael D. 2000. Statistical Analysis of Sensitive Topics in Group and Individual Interviews. Quality and Quantity 34: 419-431.

Module 4: Data, Analysis and Presentation, WHO on Behalf of the Special Program for Research and Training in Tropical Diseases 2014

Survei Nasional CSIS. (2017). Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik Generasi Milenial.

# Bab 5

## Pengelolaan Data yang Transparan, Akuntabel dan Terpadu

Edbert Gani Suryahudaya

### Pendahuluan

Setiap instansi di pemerintahan pusat dan daerah membutuhkan pengelolaan data yang baik untuk menunjang proses pembuatan kebijakan yang terukur dan akurat. Secara umum, proses pengambilan keputusan oleh pengambil kebijakan saat ini belum sepenuhnya berdasarkan tata kelola data yang baik. Untuk itu, pengelolaan data perlu dilakukan secara sistematis untuk memudahkan dan mengefisienkan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Pengelolaan data tidak dapat dilihat sebatas formalitas semata, melainkan tulang punggung dari rantai pengambilan keputusan secara tepat sasaran. Pasalnya, seringkali pemerintah menghadapi persoalan mendasar seperti ketidakterediaan data dan perbedaan data di antara Kementerian/Lembaga (K/L). Hal tersebut mempengaruhi lambannya proses implementasi kebijakan. Sistem yang ajek dalam pengelolaan data perlu dibangun dan dipelihara sebagai proses bisnis organisasi. Beberapa regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunjang hal tersebut. Setiap K/L tinggal mengatur dan mengimplementasikannya di masing-masing institusi.

### Landasan Tata Kelola Data

Tata kelola data di internal K/L perlu mengikuti semangat inisiatif keterbukaan data (*open data*) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini mengatur pemanfaatan dan pengelolaan data publik untuk pengambilan kebijakan berbasis data dan menunjang kolaborasi dengan masyarakat. Perpres tersebut juga mendorong keterbukaan dan transparansi data dalam perumusan kebijakan pembangunan, serta kebijakan berbagi-pakai data antara instansi pusat dan daerah.

Data di setiap K/L harus dilihat dalam dua sisi, yaitu sebagai aset institusi dan sebagai barang publik. Dua pandangan ini nampak bertolak belakang, namun sesungguhnya saling berkaitan. Setiap K/L, dalam berbagai jenis, menghasilkan data-data dari berbagai kegiatan. Data tersebut merupakan aset setiap K/L untuk menghasilkan pelayanan publik yang terukur. Pada saat yang sama, data yang dihasilkan menggunakan uang negara, harus dapat diakses dan dimanfaatkan publik. Kebijakan mengelola data sebagai aset institusi dan aset publik harus menjadi karakter dalam pengelolaan data di pemerintahan.

Komitmen pemerintah untuk mendorong transparansi dan keterbukaan data tampak dari beberapa regulasi yang mengatur keterbukaan informasi, baik pada level Undang-Undang, Peraturan Presiden atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pertama, pada level undang-undang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik. UU tersebut menjelaskan bahwa memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Pada Pasal 2 angka (1) disebutkan bahwa: setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Kedua, pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini merupakan inisiatif pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Dalam Perpres tersebut, diatur integrasi proses bisnis, data, dan informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE yang diterapkan secara nasional. Selain itu pembahasan soal data dan informasi memiliki porsi khusus dalam Perpres ini. Dengan demikian membangun tata kelola data yang mumpuni ialah salah satu komponen utama dalam mencapai tujuan terselenggaranya SPBE. Sistem pusat data yang dibarengi infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi merupakan masa depan birokrasi yang harus mulai dibangun mulai sekarang.

Langkah pemanfaatan SPBE ini merupakan capaian dari usaha pemerintah untuk mendorong keterbukaan. Pada September 2011, pemerintahan Indonesia menandatangani deklarasi *Open Government Partnership* (OGP) bersama delapan negara lainnya. Semangat untuk lebih terbuka dan partisipatif ini kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III (2015-2019).<sup>12</sup> Untuk mendorong keterbukaan informasi, dalam RPJMN III dibentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 34 kementerian, 36 lembaga negara/lembaga setingkat menteri/LNS/LPP, 23 provinsi, 98 kabupaten dan 36 kota.

Menurut Yanuar Nugroho (2018), mantan Deputy II Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, setidaknya terdapat tiga tantangan utama dalam pengelolaan data di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintahan secara umum. Pertama, tidak adanya format dan metodologi data, ketidaksinkronan data, dan ketiadaan metadata. Kedua, data yang dihasilkan pemerintah sulit diperoleh pengguna, baik itu oleh masyarakat umum maupun pemerintah sendiri. Ketiga, begitu lemahnya koordinasi penyimpanan data oleh para pengelola data.

Terlepas dari ketiga tantangan tersebut, membangun perspektif yang tepat soal keterbukaan data itu sendiri juga bukan perkara mudah. Data terbuka masih menjadi konsep baru yang belum banyak dipahami dengan baik oleh birokrasi di Indonesia. Kondisi ini ditambah masih berlakunya kecenderungan untuk membatasi akses informasi kepada masyarakat. Sehingga data terbuka merupakan titik ekstrem baru yang memerlukan sosialisasi secara mendalam.

## Data, Informasi, Pengetahuan

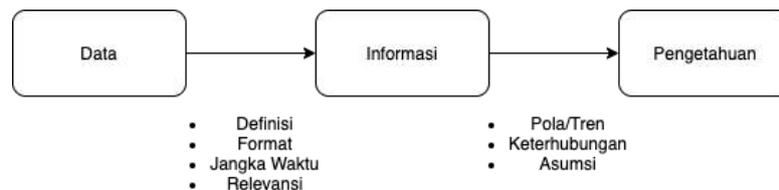
Secara umum, *data* merupakan dokumentasi dari fakta yang direpresentasikan dalam bentuk teks, angka, grafik, gambar, suara, maupun video. Sedangkan *informasi* ialah

---

<sup>12</sup> OECD, 2016. Kajian *Open Government* Indonesia: Hal-Hal Pokok. OECD.

data yang memiliki konteks. Interpretasi konteks dari data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya mendefinisikan setiap elemen data, format dari data, jangka waktu pengambilan data, serta relevansi terhadap kebutuhan data yang diambil. Tujuan pengelolaan dan kontekstualisasi data menjadi informasi, ialah untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Alurnya direpresentasikan pada Figur 1.

**Figur 1. Data, Informasi, dan Pengetahuan.**



Sumber: DAMA International (2009)

Informasi yang terkumpul dari berbagai macam data kemudian akan memproduksi *pengetahuan*. Hal ini yang kemudian dalam konteks pemerintahan mengacu pada pengambilan keputusan maupun kebijakan. Karena alur yang linear ini, maka sangat penting untuk membangun kredibilitas dan reabilitas dari data. Selain itu, nilai tambah dari data hanya bisa ada ketika data itu digunakan. Sehingga proses tata kelola data sangat bergantung pada tata kelola pengetahuan di birokrasi. Poin ini penting untuk memastikan adanya insentif kelembagaan dalam mengelola data secara baik.

Ada berbagai macam bentuk data yang bisa dihasilkan maupun dikelola oleh pemerintah, antara lain:

- a. Data statistik  
Data statistik meliputi angka dari karakteristik suatu populasi. Pembina sekaligus produsen data statistik negara ialah Badan Pusat Statistik (BPS).
- b. Data geospasial  
Data geospasial meliputi informasi geografis sebuah lokasi, termasuk karakteristik objek alam dan non-alam yang ada di atas permukaan bumi. Pembina data geospasial sekaligus produsen data geospasial negara ialah Badan Informasi Geospasial (BIG).
- c. Data keuangan  
Data keuangan disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- d. Data teks dan administrasi

Jenis data ini meliputi segala macam bentuk pencatatan yang berkaitan dengan kegiatan administratif K/L, mulai dari kepegawaian hingga pengarsipan.

e. Data gambar, audio, dan video

Seiring dengan perkembangan teknologi, data gambar dan audio visual semakin banyak bisa diproduksi maupun diambil dari berbagai *platform digital*. Sehingga data tidak terbatas hanya pada bentuk teks, angka, maupun grafik.

Beberapa jenis data yang tersaji di atas merupakan perluasan dari berbagai jenis data yang ada saat ini, yang kemungkinan besar sebagian masih belum dikategorisasikan sebagai data. Instansi pemerintahan masih cenderung menyempitkan definisi data pada jenis statistik dan geospasial. Padahal data berbentuk teks, dokumen, gambar dan audiovisual akan sangat berguna jika dikelola secara baik. Bila mengacu pada Figur 1, pengelolaan data dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang valid dan terukur.

### Prinsip Data Terbuka dan Satu Data.

Inisiatif Satu Data Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah pusat berlandaskan kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai data yang bersumber dari negara untuk memudahkan bagi-pakai data antar K/L dan juga menunjang kolaborasi dengan masyarakat. Kemudahan bagi-pakai data dan kesempatan berkolaborasi ini ialah fondasi utama untuk mencapai kebijakan publik yang efisien dan tepat sasaran. Karena harapannya tidak ada lagi ketidakcocokan data antar K/L karena ada satu referensi data yang sama. Duplikasi data juga bisa ditekan dengan adanya pengelolaan yang disatukan.

Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa prinsip yang perlu untuk dipenuhi. Beberapa prinsip tersebut harus mengacu pada konsep data terbuka (*open data*) yang berlaku secara universal. *Open Knowledge Foundation*, lembaga non-profit yang mempromosikan keterbukaan data, mendefinisikan data terbuka dengan sederhana sebagai berikut:

*“Open data is data that can be freely used, re-used and redistributed by anyone - subject only, at most, to the requirement to attribute and sharealike.”*

Dengan demikian data terbuka secara universal memuat tiga artian utama, yakni data tersedia dan dapat diakses kapanpun, data dalam format yang memungkinkannya untuk dipakai kembali (*reuse*) dan didistribusikan kembali, dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses, menggunakan dan mendistribusikan data itu.

Dalam prakteknya di berbagai negara, data terbuka telah memberikan dampak positif baik untuk ekonomi, demokratisasi politik, evaluasi kebijakan, serta menunjang efisiensi kebijakan. Kolaborasi dalam kebijakan juga dapat terjadi karena ada kesempatan untuk mempergunakan kembali setiap data yang diproduksi oleh negara untuk menghasilkan analisa-analisa maupun inovasi.

Isu yang dianggap sensitif seringkali menjadi penghambat semangat keterbukaan data. Akan tetapi selama kaidah diikuti dengan seksama, dan sistem dibangun dengan terukur, data terbuka menjanjikan potensi yang begitu luas untuk pengembangan tata kelola pemerintahan. Birokrasi yang juga semakin dituntut untuk transparan dalam iklim demokratis dewasa ini tidak bisa lagi menunda ide keterbukaan ini. Mengenai kerahasiaan data juga bisa diatur dengan proporsional, dengan tetap menjunjung semangat kolaborasi. Pemisahan data dengan akses terbatas dan penentuan data publik bisa tetap dilakukan.

Prinsip data terbuka dalam konteks pemerintahan sendiri sebenarnya sudah banyak diadopsi dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Perpres tersebut bahkan sudah melangkah lebih jauh dengan mengatur Satu Data. Dalam regulasi tersebut, ada empat prinsip yang perlu untuk diimplementasikan di setiap K/L. Keempatnya yaitu:

#### **a. Standar Data**

Agar pemanfaatan data bisa maksimal, maka data tersebut harus terstandarisasi. Apabila mengacu pada Perpres No.39 tahun 2019, standar data meliputi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Dalam prakteknya, Pembina Data di tingkat nasional memiliki wewenang untuk mengatur standardisasi data. Seperti, standar data statistik diatur oleh BPS, dan standar data geospasial diatur oleh BIG. Akan tetapi, standar data untuk berbagai data lainnya punya peluang untuk diatur oleh Pembina Data tingkat nasional lainnya. Standar data di tingkat daerah harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pembina Data di tingkat nasional.

#### **b. Metadata**

Definisi sederhana dari metadata ialah informasi dalam bentuk struktur dan format baku untuk menggambarkan, menjelaskan, memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data. Struktur baku ini diatur oleh Pembina Data tingkat pusat.

#### **c. Kaidah interoperabilitas**

Kaidah interoperabilitas data paling tidak mencakup tiga komponen utama, yakni, konsistensi struktur penyajian, disimpan dalam format terbuka, dan bisa dibaca oleh sistem elektronik (*machine readable*). Dua komponen terakhir adalah tantangan utama dalam pengelolaan data. Seringkali data yang tersedia berbentuk dokumen cetak ataupun elektronik, dimana data mentah (*raw data*) tidak bisa diakses. Kondisi ini menyebabkan kerja yang tidak efisien di antara K/L maupun instansi. Terbiasa membagikan data dengan format terbuka akan banyak mengurangi tenaga dan waktu yang dibutuhkan dalam analisa kebijakan maupun perencanaan kegiatan. Untuk itu sebuah data format terbuka berarti minimal sekali harus bisa diakses dalam bentuk CSV, Excel, ataupun HTML.

#### **d. Kode Referensi**

Setiap data yang diproduksi harus memiliki kode referensi yang didiskusikan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Ketentuan penggunaan data dengan mencantumkan sitasi ialah kaidah ilmiah yang harus diterapkan dalam setiap produk analisa menggunakan data. Cara itu sudah secara baik mencegah klaim yang tidak berdasar soal data. Karena justru dengan data terbuka semua pihak bisa mengawasi penggunaan data karena akses yang terbuka bagi banyak pihak.

## Penyelenggaraan

Operasional penyelenggaraan tata kelola data secara umum, maupun di internal K/L, setidaknya memuat empat tahapan utama. Pertama, proses perencanaan data. Kedua, tahap pengumpulan data. Ketiga, tahap pemeriksaan data. Keempat, tahap penyebarluasan data.

Dari keempat tahapan ini, setiap K/L sebaiknya membentuk Forum Data untuk mempermudah proses pengelolaan data. Formatnya bisa mengikuti Forum Satu Data Indonesia tingkat nasional yang telah diamanatkan oleh Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Berbagai pengambilan keputusan terkait pengelolaan data perlu diambil atau diputuskan dalam forum tersebut. Hal ini untuk mencapai kesepakatan antar unit maupun departemen di dalam K/L, sesuai dengan semangat bagi-pakai data.

### (A) Perencanaan data

Idealnya, setiap unit di dalam K/L merumuskan segala bentuk dan cakupan data yang dibutuhkan dalam kegiatan setiap tahunnya. Tahapan ini perlu diselaraskan dalam penyusunan program kegiatan, di mana salah satu unsur pentingnya ialah soal anggaran yang tersedia.

Langkah pertama yang perlu dilakukan ialah identifikasi kebutuhan data. Setiap unit atau departemen perlu mengidentifikasi segala macam data yang dibutuhkan untuk berbagai rencana kegiatan selama satu tahun ke depan. Begitu pula termasuk kegiatan-kegiatan rutin. Setelah identifikasi dilakukan, langkah selanjutnya ialah melakukan pemeriksaan ketersediaan data tersebut di internal K/L.

Apabila data tidak tersedia, proses berlanjut dalam pendaftaran rencana data. Dari daftar kebutuhan tersebut, lalu menentukan unit atau departemen yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan kegiatan pengumpulan atau memproduksi data. Hasil dari proses ini kemudian bisa dicatat sebagai dokumen daftar kebutuhan data. Di dalam dokumen tersebut perlu dipisahkan juga data yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan dan urgensi rencana kegiatan.

Proses ini sangat penting dilakukan agar kolaborasi data di internal K/L bisa terbangun dengan baik. Pengutaraan kebutuhan data antar unit dalam forum data sangat penting untuk meminimalisir duplikasi data yang membuat pekerjaan tidak efisien dan terstruktur. Ini juga berguna untuk memastikan seluruh unit atau departemen di dalam K/L mendapatkan kualitas dan akses data yang sama.

## **(B) Pengumpulan data**

Tahapan ini memuat proses pengumpulan data berdasarkan daftar data yang sudah disepakati pada tahapan sebelumnya, baik secara tidak langsung dan langsung.

Pengumpulan data tidak langsung artinya ialah melakukan permintaan data kepada K/L maupun pihak terkait lainnya yang memiliki data tersebut. Untuk itu, setiap K/L perlu memeriksa dokumentasi penyelenggaraan riset yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. BPS telah memiliki Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) sebagai portal yang memudahkan dalam pencarian data statistik pemerintah. Tujuan penting dari portal tersebut ialah meminimalisir duplikasi data, terutama dalam kegiatan statistik.

Sedangkan pengumpulan data langsung berarti melakukan kegiatan riset secara langsung. Pilihan ini dilakukan apabila data masih belum tersedia ataupun belum pernah diproduksi oleh K/L manapun. Ruang melakukan kegiatan ini tentu saja bergantung kepada kebutuhan data dan kemampuan anggaran dalam melakukan kegiatan produksi data. Kegiatan ini tentunya harus mengikuti ketentuan dan panduan yang telah diatur oleh Pembina Data di tingkat pusat.

## **(C) Pemeriksaan data**

Data-data yang telah dikumpulkan baik secara langsung maupun tidak langsung perlu dikumpulkan dan diolah untuk menyamakan kesesuaiannya dengan prinsip satu data. Masing-masing data yang telah distandardisasi, dikumpulkan oleh wali data di internal K/L untuk kemudian disebarluaskan kembali di internal K/L untuk dipergunakan.

Selain standardisasi data, ada baiknya juga dilakukan proses identifikasi mana data yang perlu dibatasi aksesnya dan mana yang bisa disalurkan untuk akses lebih luas. Identifikasi ini tentu saja perlu memperhatikan semangat keterbukaan data dan juga bagi-pakai data.

## **(D) Penyebarluasan data**

Salah satu persoalan pengelolaan data di level pemerintahan ialah portal yang tidak terintegrasi. Setiap K/L maupun instansi cenderung tergiur membuat portal masing-masing tanpa koordinasi yang memadai dan semangat penyatuan data. Inisiatif Satu Data Indonesia merupakan langkah positif untuk memotong hal ini.

Untuk itu pola yang perlu dibangun ialah mengedepankan penyebaran data secara terpusat. Dibutuhkan infrastruktur data yang memadai agar konektivitas antar K/L maupun antar unit dan departemen di dalam setiap K/L bisa berlangsung. Tujuannya agar data yang telah dikumpulkan tidak menjadi kepemilikan satu pihak tertentu dan bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama untuk data yang sifatnya data publik.

Keempat tahapan di atas ada baiknya diatur dalam produk regulasi di tingkat kementerian, dan diturunkan secara lebih detail dalam sebuah petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis. Penyusunannya tentu saja perlu mempertimbangkan keunikan proses bisnis di setiap K/L sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Sebagai contoh, Kementerian Bappenas telah memiliki Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan. Permen ini telah mengadaptasi inisiatif dari Satu Data Indonesia.

## Kewenangan dan Kriteria Wali Data

Dalam setiap tahapan penyelenggaraan pengelolaan data, aktor yang memiliki peran paling krusial ialah wali data. Merujuk pada struktur birokrasi di dalam K/L, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) ialah yang bertugas sebagai wali data.

Posisi wali data menjadi strategis karena prinsip satu pintu. Apabila masing-masing unit di dalam K/L memiliki tugas sebagai wali data masing-masing, maka semangat keterbukaan dan bagi-pakai data akan sulit terwujud. Untuk itu, Pusdatin perlu ditunjuk sebagai wali data dan diberikan tugas untuk mengelola data dan keseluruhan penyelenggaraan pengelolaan data.

Untuk bisa efektif, Pusdatin perlu dilengkapi dengan beberapa perangkat yang bisa mendukung tanggungjawab yang diembannya. Hal krusial pertama ialah wewenang untuk menyelenggaraan penyelenggaraan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Kewenangan ini diperlukan agar Pusdatin memiliki kekuatan dalam mengelola data di setiap unit dan departemen sehingga integrasi data bisa terwujud. Desain kelembagaan Pusdatin ini dengan demikian memegang peranan kunci. Apabila selama ini Pusdatin dirasa perannya masih sangat terbatas hanya pada penyimpanan data, ia perlu diberikan kekuasaan lebih untuk mengelola data.

Kedua, Pusdatin perlu dilengkapi oleh sumber daya manusia yang memadai. Poin ini perlu dipenuhi agar tanggungjawab besar yang diembankan kepada Pusdatin bisa benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya. Ada beberapa kriteria dasar yang diperlukan, antara lain:

- Memahami dasar-dasar metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.
- Memahami cara kompilasi data.
- Memahami teknik pembersihan data (*data cleaning*).
- Memahami metode pengolahan data statistik dan data lainnya.

Meskipun kegiatan memproduksi data tidak sesering itu dilakukan oleh masing-masing K/L. Beberapa K/L lebih berfungsi sebagai pemanfaat data, ketimbang memproduksi data. Akan tetapi keempat keahlian di atas tetap perlu untuk dimiliki oleh Pusdatin. Alasannya ialah untuk memastikan bahwa wali data yang akan banyak berinteraksi dengan sirkulasi data dapat menjalankan dengan baik prinsip dan kaidah satu data. Selain itu, literasi teknologi dan data setidaknya perlu dilakukan di setiap K/L secara umum. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan secara rutin dengan mengundang para ahli.

## Isu sensitif terkait data.

Pada bagian V telah disinggung bahwa tetap diperlukan adanya pemilahan dari tingkat kerahasiaan data. Data-data yang berupa rahasia negara perlu untuk dibatasi aksesnya. Tantangannya kemudian ialah bagaimana menciptakan standar atas kerahasiaan sebuah data yang bersumber dari negara. Dilema ini akan selalu ditemui dalam jenis data di berbagai bidang pemerintahan. Ada baiknya, keterbukaan data publik harus dimulai dengan pendekatan yang demokratis ketimbang keamanan. Pasalnya apabila pendekatan keamanan yang diambil, maka kecenderungan yang akan muncul ialah tertutupan ketimbang keterbukaan. Keterbukaan data publik sendiri dengan sendirinya terlahir dari semangat demokrasi. Titik tengah yang bisa diambil ialah fokus pada semangat kolaborasi dan disiplin dalam menjaga kerahasiaan data.

Pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia bisa menjadi pelajaran berharga terkait sensitivitas data. Kasus penyebaran virus korona awalnya menjadi momok, tidak hanya bagi masyarakat, namun juga bagi pemerintah. Pada awal kasus COVID-19 muncul di Indonesia, pemerintah Indonesia cenderung untuk menutupi diri dengan akses data yang minim untuk publik. Faktor keamanan dan stabilitas politik menjadi alasan kerahasiaan data COVID-19 oleh pemerintah di momen-momen awal pandemi berlangsung (Suryahudaya, 2020). Alhasil, kritik tajam berdatangan ke pemerintah Indonesia dan kredibilitas penanganan pandemi tidak terbangun di saat kepercayaan publik sangat dibutuhkan.

Setelah mendapat tekanan dari banyak pihak, akhirnya pemerintah membuka diri dan membangun portal informasi terkait pandemi yang bisa diakses oleh publik. Pembuatan situs web [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) adalah langkah yang sangat baik diambil pemerintah pusat. Kasus kematian yang merupakan isu sensitif bisa secara terbuka ditunjukkan ke publik, hari per hari. Tentu saja masih terdapat banyak kekurangan dari upaya keterbukaan ini. Dalam konteks data terbuka, kekurangan itu bisa dilacak berdasarkan prinsip yang telah diulas dalam tulisan ini.

Salah satu semangat data terbuka ialah kolaborasi. Dalam situasi serba tidak menentu saat pandemi, sejatinya pemerintah membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mencari solusi yang efektif menangani virus COVID-19. Untuk bisa membantu memberikan masukan kebijakan yang tepat, maka lembaga di luar pemerintah perlu mengakses data kesehatan yang tentu saja dimiliki oleh pemerintah. Poin ini yang masih perlu untuk dimaksimalkan karena data yang diberikan ke publik oleh pemerintah pusat bukanlah dalam format data terbuka. Akan tetapi, inisiatif justru datang dari pemerintah daerah. Pemprov DKI Jakarta misalnya berinisiatif untuk melakukan *open data* terhadap data harian COVID-19 di ibu kota, di mana masyarakat bisa mengunduh file Excel langsung dari *website* pemprov. Cara ini sangat membantu para peneliti, khususnya epidemiolog, untuk membantu melacak gerak harian penyebaran virus dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Dengan patokan data yang sama, kolaborasi bisa berjalan dengan lebih efektif.

Terkait data kasus COVID-19, kita juga bisa belajar soal level kerahasiaan data. Data yang bisa diakses oleh publik dari *website* pemprov DKI misalnya sifatnya adalah data agregat. Artinya publik tidak bisa mengakses data pribadi pasien korona. Data yang tersedia antara lain jumlah orang positif, jumlah orang meninggal, pasien yang sedang mengisolasi diri, dan lain sebagainya. Agregasi data dilakukan pada level kelurahan sehingga unitnya cukup kecil untuk membantu analisa yang tajam. Data agregat tersebut sangat cukup untuk melakukan banyak analisa dan bisa melahirkan rekomendasi kebijakan. Tugas pemerintah dengan demikian ialah menjaga agar kerahasiaan data pasien bisa tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Terlebih ketika data pasien di saat pandemi bilamana tersebar bisa menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan.

Kebijakan keterbukaan data COVID-19 bisa menjadi percontohan ke depannya agar bisa diaplikasikan secara lebih meluas. Pemerintah dapat merasakan sendiri dampak positif dari keterbukaan data tersebut dengan begitu banyaknya analisa yang bisa dibuahkan oleh akademisi, lembaga *think-tank*, maupun media. Publik ada baiknya diberikan akses terhadap data yang berhubungan langsung dengan hajat hidup mereka. Keterbukaan itu bisa tetap dilakukan dengan tanpa membahayakan kerahasiaan data pribadi yang memiliki sensitifitas tinggi.

## Penutup

Di atas semua kaidah dan teknis pengelenggaraan, hal yang harus memayungi semuanya ialah upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik. Tata kelola kebijakan yang baik tentu harus memuat nilai transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi.

Mengelola data dengan baik memerlukan perubahan perilaku kerja yang fundamental. Merubah kebiasaan birokrasi tentulah tidak mudah. Mengadaptasi prinsip keterbukaan data misalnya bukanlah persoalan sederhana dalam birokrasi yang sudah terlalu ajek. Namun tuntutan-tuntutan kerja birokrasi yang semakin beragam dan kecepatan serta keakuratan dibutuhkan akan dengan sendirinya memaksa kerja-kerja baru di dalam tubuh birokrasi.

Kepemimpinan memegang peranan penting untuk membawa kerja baru ini. Diperlukan pimpinan yang memiliki visi ke depan untuk membenahi berbagai aspek terkait pengelolaan, transparansi dan sistem data yang terpadu. Perkembangan persoalan di masyarakat dewasa ini menuntut langkah-langkah teknokratis dari pemerintah. Memanfaatkan data dengan baik hanyalah salah satu fondasinya.

## Daftar Pustaka

DAMA International. 2009. *The DAMA Guide to The Data Management Body of Knowledge*. © DAMA International.

Nugroho, Yanuar. 2018. 'Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Data', *Kompas*, 17 Oktober.

OECD. 2016. *Kajian Open Government Indonesia: Hal-Hal Pokok*. © OECD.

Open Data Handbook. 2017. *Why Open Data?*. [online] Available at: <http://opendatahandbook.org/guide/en/why-open-data/>

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.14 tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Suryahudaya, E.G. 2020. 'Transparansi, Kolaborasi, dan Resiliensi Kota di Tengah Pandemi COVID-19', *CSIS Commentaries*, DMRU-004-ID, 19 Maret.

## Bab 6

# Beberapa Contoh Riset Sensitif dan Tantangannya

Medelina K. Hendytio dan Beltsazar A. Krisetya

### Pendahuluan

Dengan pengertian isu sensitif yang mencakup topik, konsekuensi, dan situasi serta sejumlah isu yang mengandung ancaman bagi orang yang terlibat dalam penelitian itu (Dickson-Swift et al., 2007), maka sebenarnya semua jenis penelitian mempunyai konsekuensi, dan berpotensi menjadi sensitif. Akan tetapi, tema-tema tertentu mempunyai konsekuensi dan risiko lebih besar. Dalam beberapa tema tertentu, intensitas keterlibatan serta profil individu dan/atau kelompok yang menjadi subjek penelitian sangat mendalam. Demikian pula jika obyek penelitian merupakan kegiatan ilegal yang dapat mempersulit peneliti serta pihak yang dilibatkan. Skenario ekstremnya, penelitian ini dapat membawa akibat yang tidak diharapkan—seperti mempengaruhi emosi secara intensif atau berkonsekuensi hukum.

Bagian ini akan memberikan beberapa contoh riset isu sensitif beserta tantangan penelitian yang muncul, terutama terkait interaksi dengan obyek penelitian dalam proses pengumpulan data dan bukti. Fahie (2014) menyatakan tantangan dalam melaksanakan riset dengan isu sensitif adalah soal etika dan metodologi, yang meliputi aspek ukuran dan banyaknya sampel serta akses, desain riset, cara mengajukan pertanyaan yang benar, serta akurasi data yang dapat dipercaya.

Contoh penelitian isu sensitif diambil dari bidang reformasi birokrasi dalam rekrutmen ASN, korupsi, serta radikalisme yang melibatkan perempuan. Contoh-contoh tersebut dikategorikan sebagai riset isu sensitif karena konsekuensi atau implikasi dari riset ini muncul secara langsung baik terhadap partisipan di dalam riset maupun terhadap peneliti (Condomines and Hennequin, 2014). Partisipan juga punya kemungkinan untuk “melindungi” pihak-pihak lain yang disebutkan di dalam riset, sehingga mempengaruhi keterbukaan partisipan terhadap peneliti. Contoh-contoh penelitian ini pun menunjukkan beberapa tantangan yang selalu muncul dalam beragam tema dan konteks, antara lain kesulitan menemukan narasumber yang tepat, membangun rasa saling percaya dengan narasumber tersebut, serta tantangan dalam verifikasi data dan bukti.

### Identifikasi Sensitivitas Isu dalam Riset

Dalam riset dengan luaran utama rekomendasi kebijakan, data dan informasi sangat diperlukan. Selain untuk mengidentifikasi dan menunjukkan permasalahan/isu yang terjadi di lapangan, juga untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan kebijakan atau pendekatan yang tersedia, dan akhirnya menentukan pilihan kebijakan yang tepat. Dengan demikian, fungsi riset kebijakan adalah mempengaruhi pembuatan kebijakan—juga dapat dimanfaatkan sebagai proses pencerahan, memberikan pemahaman fungsi, dan memberi pengertian dan interpretasi data serta situasi yang penting bagi pembuatan kebijakan.

Riset kebijakan di bidang tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*), dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi secara ekstensif menyentuh proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan, disiplin, maupun persoalan “*reward and punishment*” bagi pegawai pemerintah. Dari deskripsi tersebut, dapat digambarkan bahwa lingkup riset kebijakan dalam tata kelola dan reformasi birokrasi dapat mencakup tantangan, inovasi, maupun reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Tantangan reformasi birokrasi yang lain adalah perencanaan kepegawaian yang tidak jelas, kegagalan dalam pelaksanaan rencana, atau *road map*, maupun prosedur pelayanan publik yang tidak efisien ataupun kebijakan yang tumpang tindih. Riset yang dilakukan terhadap hal-hal di atas bisa menjadi hal yang sensitif, karena berpotensi membawa konsekuensi pada kelompok atau individu yang terkait dengan isu-isu tersebut. Misalnya, pemimpin atau elit yang berwenang sering tidak dapat menerima kritik ataupun merasa dirugikan jika hasil riset dipublikasikan.

Selain mengedepankan relevansi isu, riset isu sensitif juga harus diletakkan konteks dan latar belakang yang tepat. Misalnya, mempertanyakan siapa yang akan terkena dampak dari riset tersebut? Apakah masalah yang dibahas merupakan masalah lama atau problem yang baru ditemukan? Apakah ada solusi yang sudah ditawarkan? Perdebatan apa yang saat ini timbul terkait masalah tersebut? Tingkat sensitivitas isu akan menentukan desain riset dan metodologi yang digunakan. Adapun tingkat sensitivitas isu di bidang reformasi birokrasi dapat digolongkan sebagai berikut.

Sensitivitas Isu		
Rendah	Sedang	Tinggi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan <i>e-government</i></li> <li>• Perbaikan proses bisnis organisasi</li> <li>• Penataan peraturan perundangan</li> <li>• Pengelolaan sistem informasi publik</li> <li>• Inovasi pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja dan profesionalitas ASN</li> <li>• Variasi kualitas pelayanan publik per unit/bagian</li> <li>• Manajemen kepegawaian</li> <li>• Peringkat dan harga jabatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korupsi pejabat tinggi lembaga</li> <li>• Nepotisme dalam sistem rekrutmen kepegawaian</li> <li>• Radikalisme ASN</li> <li>• Evaluasi kinerja pejabat tinggi</li> </ul>

Sedangkan riset tentang radikalisasi, Menurut Davies (2016) ditujukan untuk mengeksplorasi mengapa, bagaimana dan di mana orang menjadi radikal, mengidentifikasi “faktor risiko” dan membedakan siapa yang lebih rentan terhadap proses radikalisasi. Dimensi kedua adalah konsep tentang bagaimana memberikan

perhatian khusus dan perlindungan terhadap orang yang berada dalam ancaman radikalisme atau kekerasan ekstremisme. Muluk (2019) memberi penjelasan mengapa diperlukan riset pada tataran motif dan sikap untuk mendeteksi kecenderungan radikalisme dan juga ekstremisme kekerasan. Sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa gejala ekstremisme kekerasan sebagian besar lebih banyak berada pada taraf motif (*motives*) dan sikap (*attitudes*) yang tidak terobservasi secara nyata (*publicly unobservable*).

Meskipun sering dipakai secara bergantian antara radikalisme, kekerasan ekstremisme, maupun terorisme, menurut Jayadi (2019) ketiganya mempunyai perbedaan. Dengan mengutip Taylor and Horgan (2006), definisi radikalisme yang secara umum lebih diterima adalah suatu proses di mana sistem keyakinan dan ideologi seseorang berubah dari waktu ke waktu dari yang sifatnya *mainstream* dan moderat menuju ke keyakinan dan ideologi yang ekstrem (Smith, 2009).

Riset dengan tema radikalisme juga dikategorikan sensitif karena beberapa sebab. Pertama, subyek penelitian ini melakukan kegiatan yang dianggap ilegal yang dapat berdampak pada tindakan hukum. Kedua, tidak mudah mencari responden atau narasumber yang bersedia diwawancarai untuk memberikan informasi terkait isu radikalisme, terutama jika calon narasumber harus memberikan informasi sensitif (latar belakang, motivasi, tujuan, jaringan atau hubungan dengan kelompok lain) yang mereka miliki. Peneliti akan kerap menemui tantangan dalam menggali fakta atau mengamati perilaku, atau bila ingin mengetahui kondisi psikologis, sikap, atau tingkat pengetahuan narasumber. Ketiga, interaksi dengan subyek yang sering kali dikategorikan melawan hukum dapat mempersulit peneliti, karena berpotensi membawa konsekuensi sosial, ekonomi, politik, dan pada kasus ekstrem, fisik. Karena topik ini sering melahirkan kontroversi yang menimbulkan penilaian masyarakat yang beragam, termasuk penilaian terhadap peneliti.

Konsekuensi dan risiko juga dapat timbul bagi masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Sebuah penelitian tentang radikalisme di kalangan kelompok migran di Rusia, misalnya, memicu perhatian tidak hanya dari kelompok-kelompok ekstrem tetapi juga dari pemerintah. Polisi tiba-tiba meningkatkan pengawasan karena adanya penelitian tentang radikalisme dan terorisme (Winterbotham dan Pearson, 2020). Peningkatan perhatian dan juga pengawasan pemerintah lokal juga ditujukan kepada tim peneliti atau pihak lain yang terlibat dalam penelitian itu.

### Contoh kasus 1. Rekrutmen dan Seleksi ASN

Tema nepotisme di kalangan ASN pun masuk dalam kategori sensitif ketika masyarakat menganggap hal tersebut berkonotasi negatif atau perilaku yang menyimpang (Condomines and Hennequin, 2014). Pelaksanaan *merit sistem* dalam rekrutmen dan seleksi PNS guna mengedepankan prinsip netralitas, persamaan, dan keadilan dapat menjadi bahasan yang sensitif ketika dikaitkan dengan isu KKN, radikalisme, ataupun netralitas dalam birokrasi. Sensitivitas juga dapat muncul dalam riset yang membahas birokrasi pemerintah yang tidak efisien, suap, maupun etika kerja birokrasi. Isu-isu

tersebut mempunyai potensi untuk melahirkan konsekuensi pada aktor yang terlibat maupun organisasi yang terkait.

Studi tentang rekrutmen dan seleksi ASN dibangun dari ditetapkannya UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini menjadi pilar penting dalam reformasi sumber daya manusia (*civil service reform*). Undang-undang didasarkan pada prinsip *merit system*, yaitu upaya untuk memperkuat kompetensi dan kinerja (*competence and performance based civil service system*) dalam proses bisnis manajemen sumber daya manusia. Upaya ini dijalankan menyeluruh mulai dari rekrutmen, penempatan dalam jabatan, promosi jabatan, pengembangan kompetensi, hingga pengukuran kinerja dan sistem penggajian. Sistem merit menjadi basis rekrutmen dan seleksi Jabatan Tinggi Negara.

Meskipun sudah memiliki landasan hukum, masih perlu dilihat apakah sistem merit telah dipraktikkan dalam rekrutmen dan seleksi, dan bagaimana kesiapan kementerian dan Lembaga menjalankan budaya baru dalam birokrasi yang berorientasi pada kinerja. (Baldanova, 2014) Penelitian dilakukan terhadap Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Pemda Kota Bandung, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menjadi sensitif ketika praktik Kolusi dan Nepotisme masih tajam mewarnai proses seleksi dan penempatan pejabat tinggi. Diskriminasi gender pun masih sarat terjadi dalam proses seleksi.

Padgett and Morris (2005) menjelaskan praktik nepotisme sebagai praktik favoritisme dalam proses rekrutmen karena hubungan keluarga atau pasangan dengan pejabat yang bekerja dalam organisasi tersebut (Gustafsson and Norgren, 2014; Padgett and Morris, 2005). Dalam konteks masyarakat Indonesia, hubungan sosial diikat dengan hubungan keluarga dan keluarga besar yang saling mendukung, serta lingkaran kesetiakawanan sosial yang termanifestasi dalam berbagai bentuknya. Bentuk hubungan ini berlangsung dan hidup dalam organisasi hingga mendominasi birokrasi. Pun terus menguat di berbagai level, hingga pada akhirnya mengabaikan sistem merit.

Ketika wawancara dilakukan terhadap beberapa pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan seleksi, hampir semua menjelaskan prosedur dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan. Mereka memang menjelaskan beberapa hambatan tetapi sebagian besar terkait hal teknis seperti kurangnya SDM yang menangani atau perlunya penyesuaian tahapan seleksi serta keterbatasan biaya. Sulit memperoleh penjelasan misalnya mengapa tim sukses Bupati atau Walikota terpilih banyak yang kemudian diangkat sebagai pejabat pemerintahan. Menurut Jones (2002), nepotisme memang merupakan topik sensitif yang biasanya dihindari untuk didiskusikan. Sementara, nepotisme merupakan fenomena sosial yang melekat dalam banyak budaya dan tumbuh dalam keluarga, dan sering diberi label sebagai praktik diskriminasi dalam organisasi birokrasi modern.

Untuk memperoleh informasi dengan perspektif yang berbeda kemudian dilakukan wawancara dengan peserta yang pernah mengikuti seleksi, dengan panitia seleksi serta dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hasil studi ini akhirnya menghasilkan

beberapa temuan yang terkait dengan praktik diskriminasi, nepotisme, maupun intervensi politik dalam proses rekrutmen dan seleksi dan ASN.

Seorang narasumber perempuan menceritakan bahwa dia sudah berkali-kali mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tetapi gagal. Bahkan dia mengetahui ketika dikalahkan oleh calon lain yang sebetulnya nilai tesnya lebih rendah. Akhirnya responden ini mengontak kenalannya yang menduduki jabatan penting di suatu daerah. Kepada kenalannya, narasumber tersebut mengatakan ingin menduduki suatu posisi di daerah tersebut yang waktu itu sedang dibuka untuk proses seleksi. Setelah narasumber tersebut mengikuti seleksi, ia berhasil memperoleh posisi yang diinginkan. Menurut narasumber, posisi dan peran kenalannya sangat membantunya sehingga lolos dalam seleksi. Cerita ini terkonfirmasi oleh responden lain yang kebetulan mengetahui kasus tersebut.

Salah satu pembelajaran dari pengalaman riset ini adalah keengganan para narasumber untuk memberikan informasi tentang terjadinya nepotisme di lingkungan organisasi mereka dikarenakan kekhawatiran bahwa informasi yang dikemukakan bisa mengancam kedudukan, kredibilitas organisasi, serta mempermalukan pihak lain. Selain itu juga terdapat keinginan untuk mempertahankan kredibilitas kelompok, memelihara *morale* (jiwa korsa), dan menegakkan loyalitas dan integritas. Responden cenderung lebih berhati-hati ketika wawancara direkam dengan alat perekam. Sedangkan dari sisi peneliti, rekaman diperlukan untuk triangulasi hasil wawancara. Narasumber biasanya menyatakan “*off the record*” atau tidak mau direkam jika perlu memberikan informasi yang sensitif. Atau ketika responden memberi kritik terhadap sistem atau prosedur yang ada dan menyebut nama individu yang dianggap bermasalah. Hal ini menunjukkan posisi aktor akan menentukan kualitas informasi yang diberikan dan menentukan tingkat keterbukaan narasumber. Aktor yang bukan pejabat aktif, bukan pegawai pemerintah, maupun pihak-pihak yang mempunyai perhatian dan keprihatinan terhadap lemahnya Tata Kelola biasanya akan lebih terbuka dan kritis dalam memberikan informasi.

Dengan melakukan triangulasi dan teknik wawancara dengan narasumber terpilih, beberapa temuan penting studi ini antara lain:

- a. Kesetaraan secara normatif telah dijamin dalam persyaratan Rekrutmen dan Seleksi, namun dalam praktik masih perlu ditingkatkan khususnya terkait dengan persyaratan-persyaratan spesifik yang hanya bisa dipenuhi oleh peserta yang berasal dari internal organisasi, dan mendiskriminasi peserta dari luar organisasi. Keikutsertaan perempuan juga harus didorong dalam rekrutmen JPT karena rendahnya tingkat partisipasi maupun keterpilihan mereka.
- b. Masih terbuka peluang terjadinya pengaruh/intervensi politik dan kekuasaan yang sering terselip di dalam proses seleksi terbuka. Hal ini sulit dihindarkan ketika penentu atau pengguna akhir sering menggunakan pertimbangan politik/kepentingan kelompok untuk menentukan calon terpilih dari tiga orang yang diajukan.

- c. Beberapa kelompok dalam organisasi mencoba menolak berlakunya sistem merit ini, terutama karena tidak ada proses evaluasi yang menunjukkan bahwa proses baru ini menjamin keterpilihan calon yang terbaik. Selain karena tidak menjamin semua calon terbaik ikut melamar, juga karena adanya praktik-praktik di luar *merit system*.

## Contoh kasus 2: Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia

Jika seorang peneliti, terlebih peneliti internal K/L, meminta seorang narasumber menceritakan atau memberikan bukti tentang terjadinya korupsi di lingkungan tempat dia bekerja, atau menanyakan apakah narasumber pernah terlibat kasus korupsi, ada kemungkinan narasumber tersebut tidak mau menjawab atau malahan memberikan informasi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Mengapa? Kemungkinan, bagi narasumber tersebut pertanyaan yang diajukan adalah isu yang sensitif.

Studi tentang korupsi dikategorikan sebagai isu sensitif ketika metodologi riset tidak hanya ditujukan untuk menangkap persepsi masyarakat secara umum, tetapi juga memahami insiden korupsi yang dialami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemberian layanan publik.

Fokus penelitian korupsi antara lain:

- Bagaimana masyarakat memersepsikan tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia?
- Bagaimana pengalaman masyarakat terkait dengan praktik korupsi?
- Apakah ada kelompok yang lebih baik dalam menghadapi praktik korupsi, dan mengapa?
- Bagaimana pendapat masyarakat menilai upaya-upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi?

Pengalaman empiris masyarakat diperlukan, dibandingkan sekedar bukti anekdot. Diperlukan bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab melakukan upaya-upaya dalam memberantas korupsi secara langsung melalui peningkatan akuntabilitas. Riset yang berdasarkan bukti mengandalkan data primer atau pengalaman langsung dari pihak-pihak yang terlihat. Dengan demikian, studi ini berfokus pada kenyataan di lapangan yang melibatkan banyak aktor dan fenomena.

Studi mengenai persepsi masyarakat terhadap korupsi yang pernah dilakukan oleh CSIS menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menangkap tren dan kecenderungan dalam persepsi masyarakat. Pertanyaan yang diajukan lebih bersifat umum dan terbuka, sehingga respons responden terhadap survei cukup tinggi, yaitu di atas 95%. Partisipasi dalam survei pun cukup tinggi karena survei menyediakan pilihan-pilihan jawaban sehingga lebih mudah dalam menjawab.

Pengumpulan data kualitatif dari riset ini dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus. Semi-struktur interviu dipilih untuk menggabungkan diskusi tentang tema riset spesifik sambil memberi ruang untuk berbagai variasi interviu tambahan dengan



mengubah, menambah, atau menyesuaikan interviu. Hal ini dimanfaatkan untuk menangkap konteks serta pengalaman aktual korupsi. Tiga belas FGD diselenggarakan: lima FGD dengan PNS/birokrat; lima FGD dengan kelompok sipil masyarakat; dan tiga FGD dengan masyarakat biasa. Untuk FGD dengan PNS/birokrat, lembaga-lembaga strategis (dinas) telah dipilih yang umumnya rentan korupsi atau telah sering kali dilaporkan oleh media terkait kasus-kasus korupsi, seperti dinas kesehatan, pendidikan, pertambangan, perdagangan dan industri, kehutanan, tenaga kerja dan transmigrasi dan perhubungan. Untuk FGD organisasi sipil masyarakat, kami mengundang akademisi, tokoh agama, LSM, aktivis anti-korupsi, asosiasi pengusaha, dan organisasi wanita. Untuk FGD dengan anggota masyarakat, kami mengundang ibu rumah tangga, petugas keamanan, pengemudi angkutan publik, petugas kebersihan, pekerja bangunan dan pengendara *ojek*.

Sebagai tema yang sensitif, studi ini menemukan bahwa responden umumnya enggan untuk berbagi pengalaman terkait korupsi dengan orang yang tidak mereka kenal. Korupsi, bagi sebagian besar masyarakat, dianggap sebagai suatu kejahatan. Mengingat hal tersebut, pertanyaan disusun secara hati-hati dan tidak secara langsung. Misalnya, untuk mengetahui tentang pengalaman terkait korupsi, pertanyaan yang diajukan adalah apakah warga pernah diminta atau ditawarkan untuk memberikan hadiah atau melakukan pembayaran di luar kewajiban yang diatur di dalam peraturan. Meskipun cerita dan pengalaman masyarakat terkait praktik korupsi banyak terekam selama studi, akan tetapi fakta tersebut cukup sulit diperoleh. Warga tidak bersedia menceritakan semua pengalaman yang mereka alami dan terlihat sangat hati-hati. Selain itu studi ini juga menemukan bahwa kurang dari lima persen warga yang menjadi responden bersedia melapor jika berhadapan dengan praktik korupsi. Untuk mendorong responden terbuka dan bercerita tentang pengalaman mereka, peneliti perlu mengkomunikasikan kepada narasumber bahwa peneliti dan penelitian menjamin kerahasiaan nama responden dengan menyamarkan nama dalam laporan penelitian, serta menghapus rekaman jika sudah tidak diperlukan.

Keadaan ini agak berbeda dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa 31,5 persen responden survei melaporkan bahwa mereka pernah diminta oleh pejabat pemerintah untuk memberikan sesuatu di luar apa yang diwajibkan oleh peraturan, ketika mereka meminta dokumen resmi seperti KTP atau akta kelahiran. Namun demikian, juga terjadi faktor penarik, karena 28,9 persen responden melaporkan bahwa mereka secara sukarela memberikan uang tambahan kepada pegawai publik. Hal ini menunjukkan bahwa metode pengumpulan data perlu dipilih secara hati-hati karena menentukan jenis data yang dapat dikumpulkan.

Pengelompokan responden berdasarkan jenis data yang dikumpulkan juga menjadi penting. Dalam studi ini, misalnya, kelompok diskusi terfokus dengan para pejabat pemerintah dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang strategi pencegahan dan penanganan korupsi, yang memperoleh respons cukup baik. Sedangkan informasi yang terkait dengan pengalaman pribadi tentang kasus korupsi para pejabat perlu dilakukan melalui wawancara tertutup dengan menggunakan

berbagai teknik yang telah dijelaskan sebelumnya. Alternatif pendekatan yang lain adalah meminta responden menuliskan pengalamannya berdasarkan panduan wawancara, sehingga wawancara dilaksanakan secara tertulis alih-alih lisan. Pertimbangan ini menjadi bagian etika pelaksanaan riset sosial yang harus menegakkan prinsip tidak merugikan, bersifat sukarela, menjaga ruang privat, dan mengedepankan kejujuran. (Bryman 2008, 118).

### Contoh Kasus 3: Radikalisasi dan Gender

Riset yang dilakukan pada tahun 2017 oleh tim CSIS berjudul *Intolerance and Radicalism Amongst Women* atau “Intoleransi dan Radikalisasi Di kalangan Perempuan” mengungkap keterlibatan perempuan dalam proses radikalisasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa perempuan termotivasi untuk terlibat dalam serangan teroris, dan akhirnya mencari cara bagaimana melepaskan perempuan dari kelompok atau gerakan ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan telah terlibat dalam kelompok teroris di Indonesia lebih dari satu dekade, dan perannya terus meningkat. Misalnya, saat munculnya Jamaah Islamiyah (JI) di awal tahun 2000-an, istri para teroris bungkam terkait aktivitas terorisme suami mereka—termasuk perjalanan dan perjuangan di Afghanistan. Atas tuduhan membantu terorisme dalam kurun waktu 2004-2016, beberapa perempuan kemudian ditahan, alasannya antara lain adalah karena tidak mau bekerja sama dengan polisi. Peran perempuan dalam JI adalah mencari pemasukan untuk menopang keluarga teroris, menjadikan anak-anak mereka sebagai calon jihadis atau pejuang Syariah di masa depan, serta memfasilitasi transfer keuangan dan logistik antar anggota (*The Jakarta Post*, 12 Mei 2018). Perempuan juga menjadi kombatan, ikut dalam simulasi perang dan berpartisipasi dalam percobaan serangan teroris.

Isu dari penelitian ini sensitif karena perempuan yang menjadi fokus penelitian ini terlibat dalam gerakan ilegal yaitu terorisme yang mempunyai konsekuensi hukum cukup serius. Dari hasil wawancara terhadap perempuan yang pernah ikut dalam organisasi kelompok radikal, ditemukan dua motivasi yang mendorong mereka bergabung dalam kelompok tersebut, yaitu, mereka sudah sampai pada titik jenuh dan tidak dapat menemukan arti kehidupan sehingga merasa tidak berharga dan mempertanyakan tujuan hidupnya. Responden lain, seorang manajer asuransi, menyatakan bahwa mereka kehilangan arti hidup karena pekerjaannya dan kekayaannya tidak memberikan makna dan tujuan hidup hingga dia mencoba hijrah ke Suriah.

Berdasarkan informasi dari responden tersebut, studi ini menemukan dua faktor penting penyebab individu tertarik pada kelompok radikal. Pertama, ikatan sosial. Misalnya melalui referensi teman atau keluarga bergabung dengan kelompok agama yang pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman agama. Kedua ikatan sosial yang mengikat individu untuk melakukan tindakan demi ideologi tertentu, karena adanya rasa memiliki terhadap individu dalam kelompok. Studi ini juga menemukan perbedaan ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam kelompok radikal. Ikatan sosial laki-laki terbentuk karena ajakan teman yang terpercaya atau

keluarga, sedangkan perempuan biasanya karena perkawinan (*The Jakarta Post*, 12 Mei 2018).

Tantangan utama adalah memperoleh narasumber utama. Peneliti tidak dapat menemui dan mewawancarai perempuan yang sedang aktif dalam gerakan radikal atau terorisme. Informasi tentang keterlibatan perempuan diperoleh dari beberapa mantan anggota teroris serta anggota kelompok-kelompok radikal. Meskipun informasi yang didapat mungkin dapat menjawab pertanyaan penelitian, akan tetapi pandangan, pengalaman hidup, dan harapan terhadap eksistensi organisasi mungkin berbeda dengan para perempuan yang hingga saat ini masih aktif bergabung dengan kelompok radikal atau teroris.

Karena merupakan isu yang sensitif, tanpa pengenalan yang mendalam atau hubungan baik, responden atau narasumber mungkin enggan berbagi informasi dengan peneliti karena dianggap sebagai orang luar. Kesulitan untuk mencari narasumber dalam riset isu sensitif seperti dalam riset radikalisme menurut Malthaner dan Waldman (2014) dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan *radical milieu* atau lingkungan radikal. Pendekatan ini memanfaatkan komunitas yang paling dekat dengan situasi di mana proses radikalisme terjadi, yang berbagi nilai-nilai dengan anggota kelompok radikal. Pendekatan ini berusaha untuk mengenali pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal lingkungan di mana kelompok radikal berada dapat digali melalui diskusi kelompok terfokus. Dalam hal ini, sangat penting untuk melibatkan peneliti (asisten) lokal yang dikenal dan dipercaya oleh komunitas lokal dan narasumber. Selain itu, peneliti lokal dapat hadir dan berada di lokasi tersebut dalam jangka waktu lama, sehingga dapat mengumpulkan data-data sensitif yang relatif lama waktu perolehannya karena membutuhkan rasa percaya dan hubungan baik.

Kepercayaan dan hubungan baik menjadi kunci bagi penelitian isu sensitif untuk mendapat informasi dari responden atau narasumber yang ditarget. Dalam hal ini, perlu mengondisikan ruang bicara yang lebih terbuka bagi narasumber. Dalam hubungan yang semakin baik, wawancara dapat dipakai oleh responden untuk melepaskan keprihatinan atau ganjalan yang selama ini ditutup atau dipendam sendiri (Glazer, 1982). Akan tetapi dalam menerima informasi dari responden perlu kehati-hatian. Data yang diberikan oleh narasumber dapat bias karena keinginan narasumber memperoleh kesan baik dari peneliti dengan memberikan tanggapan seperti yang diharapkan peneliti, meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Karena gerakan radikal atau ekstremis dan bahkan terorisme adalah terlarang, maka sering kali responden tidak memberikan jawaban yang benar karena berbagai alasan. Responden mungkin ragu untuk memberikan tanggapan yang jujur tentang sikap dan perilaku mereka karena merasa malu, dihakimi, dan dalam beberapa kasus terjadi penganiayaan. Adanya bias sering kali tidak disadari. Untuk mengatasi hal ini, peneliti harus tetap sadar bahwa bias dapat selalu terjadi.

Dalam kasus lain, tantangan yang muncul adalah bahwa responden memang tidak ingin menjawab sama sekali karena alasan tertentu, seperti takut dinilai sebagai ekstremis, atau responden sebenarnya bersedia menjawab, tetapi tidak bersedia identitasnya

diketahui. Kekhawatiran akan identitas yang terbuka akan membuat narasumber menjadi cenderung tidak terbuka. Responden boleh jadi memberi jawaban yang hanya bersifat normatif, tidak detail, dan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya (McCosker, Barnard, and Gerber 2001). Dalam beberapa contoh ekstrem, bisa saja berbohong maupun menyampaikan informasi yang bertolak belakang dengan fakta. Dengan demikian identitas narasumber harus dirahasiakan atau tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Untuk itu, sangat penting memisahkan Informasi Identitas Pribadi (IIP) dari semua sumber data lainnya sedini mungkin.

## Mengatasi Tantangan

Dari ketiga contoh riset dengan isu sensitif di atas, terdapat tantangan yang selalu muncul, yaitu dalam mendapatkan responden/narasumber yang tepat serta memperoleh bukti yang kuat dan meyakinkan. Berikut ini adalah pemetaan dan solusi bagi tantangan tersebut. Untuk memperoleh responden atau narasumber yang tepat, peneliti perlu memastikan bahwa langkah-langkah pra-wawancara, saat wawancara, dan pasca-wawancara berikut dijalankan.

Tahap	Langkah	Tujuan
Pra-wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat <i>actor mapping</i> yang memetakan posisi responden/narasumber dalam struktur organisasi.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pejabat aktif</li> <li>○ Pegawai pemerintah</li> <li>○ Mantan pejabat</li> <li>○ Tokoh informal di lapangan</li> <li>○ Tokoh informal teknis</li> </ul> </li> <li>• Perempuan Kombatan</li> <li>• Perempuan Mantan Kelompok Radikal</li> <li>• Masyarakat sekitar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan jenis informasi yang diperlukan</li> <li>• Menentukan strategi pendekatan, menentukan pertanyaan dan cara bertanya yang tepat</li> <li>• Melakukan uji coba dan kalibrasi protokol penelitian (Johnson and Clarke, 2003)</li> <li>• membantu peneliti untuk menyesuaikan dan melakukan modifikasi pertanyaan guna meningkatkan keterbukaan responden</li> </ul>
Wawancara	Menjelaskan latar belakang penelitian kepada narasumber.	Membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan responden
	Menegaskan bahwa meskipun riset kebijakan,	Menempatkan peneliti dalam posisi netral sehingga

tetapi ditelaah secara akademis	memberikan rasa nyaman dan aman responden
Mendorong responden untuk menyampaikan hal yang ingin disampaikan, <u>bukan</u> memaksa mengatakan apa yang ingin kita tahu (Fahie, 2014)	Menciptakan relasi antar peneliti dan narasumber yang tidak hierarkis, namun setara, di mana keduanya dapat bercerita tentang pengalaman masing-masing (Liamputtong and Ezzy, 2005)
Komunikasi risiko. Menyampaikan kepada narasumber bahwa peneliti sadar dan mengetahui mengenai potensi risiko bagi narasumber yang mungkin muncul dari hasil wawancara.	Responden perlu mendapat kesan bahwa bagi peneliti risiko yang muncul dari informasi yang dia berikan lebih penting dibandingkan pelaksanaan riset itu sendiri.
Resiprositas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kesempatan kepada responden untuk bertanya tentang riset yang sedang dijalankan</li> <li>• Membuka diri berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang masalah yang dibahas</li> <li>• Menegaskan bahwa yang disampaikan bukan satu-satunya yang terjadi, tetapi juga terjadi di banyak tempat</li> </ul>	Menciptakan komunikasi dan transfer pengetahuan dua arah antara peneliti dan responden. Selain memperkuat rasa percaya, dapat membantu menggali <i>known unknowns</i> dari kedua pihak sembari pembicaraan bergulir
Memberikan empati, respek, dan apresiasi terhadap informasi ataupun cerita yang disampaikan oleh responden	Memberikan persepsi bahwa peneliti memahami responden lebih dari sekedar objek analisis

*Pasca-wawancara*

Melakukan pengecekan, baik dengan dokumen maupun interviu dengan pihak lain	Memperkuat validitas hasil wawancara
Membuat catatan lapangan yang akurat (termasuk keterangan tempat dan waktu wawancara), kutipan narasumber yang tepat dan lengkap	Meminimalisasi kemungkinan misinterpretasi hasil wawancara, serta menggantikan identitas pribadi narasumber saat mengidentifikasi kutipan

## Meningkatkan Keabsahan Data dan Bukti

Pengalaman dan data yang diperoleh dari sumber pertama memang lebih diutamakan dibandingkan data-data statistik, karena memberi *insight* atau wawasan, latar belakang, dan informasi lain yang tidak terekam dalam dokumen fisik. Namun, kelemahan dari data primer adalah persepsi responden yang terbatas, yang mungkin disampaikan berdasarkan rumor, atau hanya mendengar dari orang lain. Pun tidak lepas dari asumsi atau prasangka. Winterbotham dan Pearson (2020), mengkritik bahwa informasi dari seorang narasumber bisa bias terhadap kecenderungan masyarakat. Juga dipengaruhi keinginan untuk dianggap mampu dan disukai peneliti dengan memberi respons yang memadai, baik secara sosial maupun politik.

Sebaliknya, data dan bukti berupa statistik dan dokumen fisik memang diperlukan untuk menguji keabsahan informasi yang didapatkan dari wawancara, FGD, atau survei sehingga dapat memperkuat validitas informasi yang diperoleh. Data dan bukti sekunder dapat diperoleh dari dokumen kebijakan, manual, peraturan perundangan, terbitan internal, maupun laporan implementasi kebijakan. Akan tetapi, dokumen-dokumen fisik ini tidak banyak yang benar-benar terbuka menyajikan informasi. Sehingga, perlu dilengkapi dengan mengumpulkan data primer melalui riset lapangan (Deva, 1986). Kedua sumber tersebut—primer dan sekunder—memiliki kelemahannya tersendiri. Cara pengumpulannya pun—wawancara, diskusi, observasi, maupun survei—pun menentukan hasil yang didapat. Karenanya, penting untuk melakukan pendekatan triangulasi.

Triangulasi merupakan kombinasi beragam metodologi dalam studi mengenai suatu topik (Denzin, 2009). Informasi dan analisis yang dilakukan dalam riset perlu selalu diverifikasi dan dikontrol melalui data yang diperoleh dari sumber lain. Triangulasi bisa menjadi metode yang menunjang riset isu sensitif karena sering kali informasi didapatkan secara parsial atau malah berkonflik. Proses triangulasi memungkinkan peneliti menemukan informasi yang pada awalnya dianggap akurat ternyata kemudian keliru dan menjadi tidak penting. Triangulasi juga dapat mengecek inkonsistensi data dan memperkecil bias. Terdapat empat tipe triangulasi: triangulasi sumber data,

triangulasi peneliti, triangulasi metode, dan triangulasi teori (Denzin, 2017; Patton, 1999).

Kendati memberikan beragam manfaat dalam penelitian, triangulasi juga memiliki konsekuensi. Pertama, triangulasi boleh jadi menambah kompleksitas riset isu sensitif karena lebih banyak memakan waktu dan sumber daya. Kedua, triangulasi bisa saja menghasilkan dua kesimpulan atau temuan yang inkonsisten antar dua metode penelitian, atau bahkan berseberangan. Sehingga peneliti perlu menjelaskan secara komprehensif penyebab perbedaan hasil tersebut.

Meskipun demikian, kedua konsekuensi tersebut sebaiknya tidak dihindari, melainkan dipersiapkan. Lagi pula, menurut Patton (2002), kesalahpahaman umum dalam melakukan triangulasi adalah bila dilakukan dengan tujuan memperoleh konsistensi dari beragam sumber data atau pendekatan. Padahal, inkonsistensi lebih mungkin ditemui bila ragam pendekatan yang dipakai sama kuatnya. Bagi Patton, inkonsistensi ini bukan berarti bukti melemah, namun sebaliknya, menjadi suatu kesempatan untuk mengungkap makna yang lebih dalam dari informasi yang didapatkan.

Pada akhirnya, tantangan besar dalam memanfaatkan data yang sensitif adalah meningkatkan validitas data, memisahkan antara kebenaran dari asumsi, bias, dan dugaan maupun spekulasi. Peneliti harus dapat memilah informasi dan bukti apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai bukti dan data tanpa mengganggu prinsip kerahasiaan dan anonimitas sumber data. Dengan demikian, seleksi dan analisis data menjadi bagian penting dari upaya menghasilkan data yang berkualitas untuk memastikan keabsahan bukti, orisinalitas, obyektivitasnya maupun nilainya untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian.

## Penutup

Meskipun banyak tantangan ketika dijalani, riset isu sensitif tetap perlu dilakukan dalam upaya perubahan masyarakat. Berbagai tantangan dalam pencarian narasumber maupun pengumpulan bukti, menuntut persiapan riset dilakukan secara hati-hati karena adanya kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak dapat diprediksi—seperti penolakan responden untuk diinterview secara tiba-tiba, atau munculnya implikasi sosial-politik lain atas pengungkapan informasi sensitif yang bisa merugikan peneliti maupun responden.

Dalam hal ini, perumusan pertanyaan maupun cara menyampaikan pertanyaan menjadi krusial, karena bisa saja pertanyaan yang sama akan diinterpretasikan secara berbeda oleh responden. Jika pertanyaan tidak cukup spesifik, akan menimbulkan interpretasi dari beragam perspektif. Dengan demikian, pengungkapan data dan informasi dari narasumber berdasarkan perspektif, persepsi, pengalaman, pemahaman, interpretasi maupun interaksi terkait data sensitif perlu dicek ulang untuk menghindari bias dan memperoleh objektivitas. Membangun kedekatan dengan narasumber menjadi kunci keberhasilan pengumpulan bukti dalam riset dengan tema sensitif. Ini menunjukkan bahwa diperlukan keterampilan, pengalaman, dan



kompetensi untuk melakukan pengumpulan bukti termasuk interviu di atas kemampuan menanyakan pertanyaan yang baik.

Pemahaman konteks dan budaya masyarakat yang berpengaruh dalam penilaian terhadap berbagai isu termasuk isu yang dianggap sensitif, sangat penting untuk merumuskan strategi pelaksanaan penelitian terutama untuk memperoleh *insight* yang tepat dan obyektif sehingga membantu perumusan kebijakan yang tepat.

## Daftar Pustaka

- Baldanova, Aldara. 2014. "Exploring Recruitment Policies In International Aid Organizations In Kyrgyzstan". The Arctic University of Norway.
- Battaglini, Marco, and Eleonora Patacchini. 2019. "Social Networks In Policy Making". *Annual Review Of Economics* 11 (1): 473-494. doi:10.1146/annurev-economics-080218-030419.
- Belkahla Driss, Olfa, Sehl Mellouli, and Zeineb Trabelsi. 2019. "From Citizens To Government Policy-Makers: Social Media Data Analysis". *Government Information Quarterly* 36 (3): 560-570. doi:10.1016/j.giq.2019.05.002.
- Bryman, Alan. 2008. *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
- Carter, Nancy, Denise Bryant-Lukosius, Alba DiCenso, Jennifer Blythe, and Alan J. Neville. 2014. "The Use Of Triangulation In Qualitative Research". *Oncology Nursing Forum* 41 (5): 545-547. doi:10.1188/14.onf.545-547.
- Condomines, Bérangère, and Emilie Hennequin. 2013. "Studying Sensitive Subjects: Advantages Of A Mixed Approach". *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.2212034.
- Cowles, Kathleen V. 1988. "Issues In Qualitative Research On Sensitive Topics". *Western Journal Of Nursing Research* 10 (2): 163-179. doi:10.1177/019394598801000205.
- Davies, Lynn. 2015. "Security, Extremism And Education: Safeguarding Or Surveillance?". *British Journal Of Educational Studies* 64 (1): 1-19. doi:10.1080/00071005.2015.1107022.
- Dickson-Swift, Virginia, Erica L. James, Sandra Kippen, and Pranee Liamputtong. 2007. "Doing Sensitive Research: What Challenges Do Qualitative Researchers Face?". *Qualitative Research* 7 (3): 327-353. doi:10.1177/1468794107078515.
- Diprose, Rachael, Primatia Wulandari, Elena Williams, and Levrina Yustriani. 2020. "Bureaucratic Reform In Indonesia: Policy Analyst Experiences". Jakarta: Knowledge Sector Initiative. <https://www.ksi-indonesia.org/id/knowledge/detail/1249-bureaucratic-reform-in-indonesia-policy-analyst-experiences>.
- Fahie, Declan. 2014. "Doing Sensitive Research Sensitively: Ethical And Methodological Issues In Researching Workplace Bullying". *International Journal Of Qualitative Methods* 13 (1): 19-36. doi:10.1177/160940691401300108.
- Fahie, Declan. 2014. "Nepotism Perceived By Managers In Northern Sweden: An Explorative Study On Attitudes Towards Nepotism And Its Usage". Bachelor, Umeå School of Business and Economics.

- Fox, William S., and Norman K. Denzin. 1979. "The Research Act: A Theoretical Introduction To Sociological Methods". *Contemporary Sociology* 8 (5): 750. doi:10.2307/2065439.
- Johnson, Barbara, and Jill Macleod Clarke. 2003. "Collecting Sensitive Data: The Impact On Researchers". *Qualitative Health Research* 13 (3): 421-434. doi:10.1177/1049732302250340.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2019. "Permenpan RB No. 25/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024". Jakarta. <https://jdih.menpan.go.id/puu-1047-Peraturan Menpan.html>.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2019. "Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024."
- Liamputtong, Pranee, P Liamputtong, and D Ezzy. 2005. *Qualitative Research Methods*. South Melbourne, Vic.: Oxford University Press.
- McCosker, Heather, Alan Barnard, and Rod Gerber. 2001. "Undertaking Sensitive Research: Issues And Strategies For Meeting The Safety Needs Of All Participants". *Dx.Doi.Org*. <http://dx.doi.org/10.17169/fqs-2.1.983>.
- Mergel, Ines. 2017. "Building Holistic Evidence For Social Media Impact". *Public Administration Review* 77 (4): 489-495. doi:10.1111/puar.12780.
- Mertens, Donna M., and Sharlene Hesse-Biber. 2012. "Triangulation And Mixed Methods Research". *Journal Of Mixed Methods Research* 6 (2): 75-79. doi:10.1177/1558689812437100.
- Padgett, Margaret Y., and Kathryn A. Morris. 2005. "Keeping It "All In The Family:" Does Nepotism In The Hiring Process Really Benefit The Beneficiary?". *Journal Of Leadership & Organizational Studies* 11 (2): 34-45. doi:10.1177/107179190501100205.
- Patton, Michael Quinn. 1999. "Enhancing The Quality And Credibility Of Qualitative Analysis". *Health Services Research* 34.
- Patton, Michael Quinn. 2002. "Two Decades Of Developments In Qualitative Inquiry". *Qualitative Social Work: Research And Practice* 1 (3): 261-283. doi:10.1177/1473325002001003636.
- Quan-Haase, Anabel, Luke Sloan, Rob Kitchin, and Kelsey Beninger. 2017. *The SAGE Handbook Of Social Media Research Methods*. University of Aberdeen.
- Ragozini, Giancarlo, and Maria Prosperina Vitale. 2020. *Challenges In Social Network Research*. Cham: Springer.



Sieber, Joan E., and Barbara Stanley. 1988. "Ethical And Professional Dimensions Of Socially Sensitive Research.". *American Psychologist* 43 (1): 49-55. doi:10.1037/0003-066x.43.1.49.

Winterbotham, Emily, and Elizabeth Pearson. 2020. *The Radical Milieu: A Methodological Approach To Conducting Research On Violent Extremism*. Washington, D.C.: RESOLVE Network.

## Bab 7

# Tantangan dan Pengalaman Survei Opini Publik di Indonesia

Arya Fernandes

Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana tantangan dan pengalaman sejumlah lembaga dalam melakukan survei di Indonesia terutama survei dengan isu-isu sensitif. Secara singkat juga dijelaskan perkembangan survei opini publik di Indonesia yang menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap survei, baik dari sisi partai, kandidat atau pengambil kebijakan.

Di negara demokrasi baru, survei menjadi penting untuk mengukur tingkat persepsi dan harapan masyarakat terhadap pemerintahan serta mengevaluasi sejumlah paket kebijakan pemerintah. Tradisi survei opini publik relatif masih 'baru' dalam penelitian ilmu sosial di Indonesia. Survei mulai berkembang pada akhir tahun 1990an saat LP3ES melaksanakan survei di pulau Jawa dan hitung cepat (*quick count*) pada pemilu 1997 di Jakarta (Mietzner, 2009; Ufen, 2010). Pendekatan kualitatif melalui studi-studi antropologi dan sosiologi banyak digunakan penelitian ilmu sosial pada masa Orde Baru dibandingkan pendekatan kuantitatif.

Munculnya para ilmuan baru dari tradisi kuantitatif dan perkembangan akademis di kawasan mengubah pendekatan riset di Indonesia menjadi lebih empiris dan berbasis riset perilaku pemilih. Riset-riset opini publik di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk melihat tingkat demokratisasi penyelenggaraan pemilu dan mendeteksi kecurangan pemilu. Sebelumnya di kawasan, pendekatan ini sudah dilakukan oleh *National Citizens' Movement for Free Election* (NAMFREL) dalam pemilu di Filipina, tahun 1986. NAMFREL mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pendukung Marcos dengan memantau di 90 ribu lebih TPS sebagai sampel dalam hitung cepat (NDI, 2002).

Sejak 2004, survei menjadi pilihan yang cepat untuk mengukur persepsi pemilih terhadap kandidat atau partai. Dengan digelarnya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada tahun 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005, riset perilaku pemilih menjadi penting dan strategis. Bila ditilik, kehadiran lembaga survei yang mengalami perkembangan signifikan setelah tahun 2004 disumbang oleh sejumlah akademisi yang baru menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Diantaranya keberadaan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang didirikan oleh Saiful Mujani dan Denny Januar Ali pada awal tahun 2000. LSI dapat dipandang sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kapasitas secara metodologi dan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan survei dengan saintifik.

Perkembangan survei juga didukung oleh kontribusi alumnus Ilmu Statistika dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang tersebar di banyak lembaga survei di Indonesia. Dari sisi pembiayaan untuk mendukung kegiatan riset, keberadaan donor seperti JICA memberikan pengaruh dalam mendukung studi-studi kuantitatif untuk melihat



perkembangan demokrasi Indonesia. JICA misalnya memberikan donasi kepada Pusat Kajian Politik UI (Puskapol) untuk melakukan survei dan hal tersebut dapat dianggap sebagai lompatan penting dalam tradisi pelaksanaan survei di Indonesia (Mietzer, 2009).

Tumbuhnya *pollster* juga dipengaruhi oleh adanya reformasi pemilihan sejak tahun 2004 di mana presiden dan wakil presiden dipilih untuk pertama kalinya dan pelaksanaan pilkada secara langsung pada tahun 2005 (Ufen, 2010). Berdasarkan catatan Ufen, kebutuhan partai dan kandidat untuk mendesain kampanye yang memikat dan memahami perilaku pemilih membuat ketergantungan kepada lembaga survei dan konsultan politik meningkat sejak 2004, terutama setelah meningkatnya penggunaan televisi dalam kampanye. Kebutuhan partai terhadap pemetaan situasi lapangan dan kecenderungan pemilih menjelang Pilkada membuat survei masih punya pangsa pasar tersendiri dalam politik di Indonesia. Sejumlah partai misalnya mensyaratkan adanya hasil survei untuk bisa mendapatkan rekomendasi pencalonan dalam pilkada. Hasil survei juga berguna bagi partai untuk membangun koalisi dalam pilkada serta melakukan *fundraising* politik (Trihartono, 2014).

Perubahan mekanisme penetapan calon di Partai Golkar memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan lembaga survei. Peran *pollster* meningkat setelah Partai Golkar menerbitkan Petunjuk Teknis pencalonan, di mana kandidat yang mempunyai tingkat elektabilitas tinggi dalam survei berpotensi dicalonkan Golkar dalam Pilkada. Kebijakan internal Golkar tersebut berhasil meningkatkan keterpilihan calon-calon yang diusung Golkar pada tahun 2005. Tingkat kemenangan Golkar sebelum dan setelah menerapkan Juklak No.5 pada level kabupaten/kota meningkat dari 37,33 persen sebelum Juklak dan 47,13 persen pada setelah Juklak, dan dari 25 persen ke 45,45 persen (Mietzner, 2009).

Faktor situasi politik juga mempengaruhi perkembangan kelembagaan dari organisasi lembaga survei. Tomsa (2020) membagi tiga periodisasi pertumbuhan lembaga survei yaitu, fase formasi (1998-2004), ekspansi dan fragmentasi (2004-2014), serta polarisasi dan profesionalisme lembaga survei (2014-sekarang). Polarisasi politik menurut Tomsa membuat terjadi perubahan peran *pollster* menjadi terafiliasi dalam kontestasi politik, terutama pada tahun 2014 dan 2019. Namun, di periode tersebut juga terjadi peningkatan kemampuan *pollster* untuk memprediksi pemenang pemilu secara tepat baik melalui survei atau hitung cepat.

Dibandingkan pemilu 2004, pada pemilu 2014 dan 2019 perkembangan teknologi dan metodologi membuat proses pelaksanaan survei dan hitung cepat menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Hasil hitung cepat juga sudah presisi yang ditunjukkan dengan kecilnya selisih antara hasil hitung cepat dengan hasil penghitungan manual oleh KPU yang memakan waktu lebih dari sebulan, dibandingkan hasil hitung cepat yang dapat diketahui pada hari pemungutan suara (lihat Tabel 1).

**Tabel 1: Perbedaan Hasil Hitung Cepat dengan Penghitungan Manual oleh KPU pada Pemilu Presiden 2019**

	Joko Widodo - Maaruf Amin	Prabowo Subianto - Sandiaga Uno	Selisih dari KPU
KPU	55,50	44,50	
CSIS-Cyrus Network	55,62	44,38	0,12
Poltracking	54,98	45,02	0,52
SMRC - LSI	54,89	45,11	0,61
Charta Politika	54,71	45,29	0,79
Indikator Politik	54,59	45,41	0,91
Litbang Kompas	54,52	45,48	0,98
Indo Barometer	54,31	45,69	1,19
Populi Center	54,03	45,97	1,47

Sejak hitung cepat pertama yang dilakukan pada tahun 2004 tidak terjadi perbedaan antara penyelenggara hitung cepat. Pada pemilu 2009, empat lembaga hitung cepat berhasil memprediksi kemenangan pasangan SBY-Boediono, dengan selisih yang tipis dengan penghitungan KPU. Berdasarkan penghitungan KPU, pasangan SBY-Boediono mendapat suara sebesar 60,8 persen. Sementara berdasarkan penghitungan hitung cepat oleh LSI Lembaga sebesar 60,85 persen dengan selisih sebesar 0,05 persen (Lihat Tabel 2).

**Tabel 2: Perbedaan Hasil Hitung Cepat dengan Penghitungan Manual oleh KPU pada Pemilu Presiden 2009**

Lembaga	Megawati- Prabowo	SBY-Boediono	Jusuf Kalla- Wiranto
KPU	26,79	60,8	12,41
LSI (Lembaga)	26,56	60,85	12,59
LSI (Lingkaran)	27,34	60,12	12,54
LP3ES	27,33	60,36	12,3
Cirus Surveyors Group	27,49	60,2	12,31

Perbedaan hasil hitung cepat mulai terjadi pada Pemilu 2014 saat polarisasi politik berimbas pada polarisasi lembaga survei dan media (Lihat Tabel 3). Hal lainnya yang

terjadi adalah karena terdapatnya lembaga-lembaga survei abal-abal yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis jangka pendek untuk merilis hasil survei yang berbeda dari lembaga yang sudah mapan (Espinall, 2020).

**Tabel 3: Perbedaan Hasil Hitung Cepat dengan Penghitungan Manual oleh KPU pada Pemilu Presiden 2014**

Lembaga	Prabowo-Hatta	Jokowi-JK	Selisih dengan KPU
KPU	46,85	53,15	
SMRC	47,09	52,91	0,2
RRI	47,29	52,71	0,4
CSIS-Cyrus Network	47,9	52,1	0,8
Litbang Kompas	47,66	52,34	0,8
Indikator Politik Indonesia	47,2	52,47	0,9
LSI (Lingkar)	46,43	53,37	1,3
Populi Center	49,05	50,95	1,5
Puskaptis	52,05	47,95	5,2
Lembaga Survei Nasional (LSN)	50,56	49,44	3,3
Indonesia Research Centre (IRC)	51,11	48,89	3,2
Jaringan Survei Indonesia (JSI)	50,14	49,86	3,1

Sumber : Kompas, 2014

Di tengah menguatnya survei-survei politik, survei-survei berbasis kebijakan sebenarnya masih belum menjadi arus besar di Indonesia. Biasanya survei kebijakan lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga riset dan universitas. Sementara lembaga survei profit lebih banyak melakukan survei-survei politik (pilkada, pemilu dan pilpres). Rendahnya pelaksanaan survei berbasis kebijakan, bisa jadi dipengaruhi oleh kebutuhan atau permintaan kementerian dan lembaga yang rendah terhadap survei. Faktor lainnya bisa terjadi karena penggunaan survei mungkin belum menjadi arus utama dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintah.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mulai terjadi perubahan di sisi pemerintah yaitu menguatnya model pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Sebagai contoh misalnya, untuk menguji persepsi atau dukungan publik terhadap kebijakan yang punya dampak besar, seperti RUU Cipta Kerja, kebijakan *New Normal* dan kebijakan strategis lainnya—pemerintah mendasarkannya pada survei opini publik.

Selain itu, riset kuantitatif melalui survei dengan tema-tema sensitif juga belum banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga survei di Indonesia. Hal tersebut membuat belum terdapat pembelajaran (*lesson learned*) yang banyak dari proses pelaksanaan survei dengan tema sensitif. Terdapat beberapa contoh yang bisa dikemukakan. Misalnya pada tahun 2018, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat intoleransi dan radikalisme guru di Indonesia. Karena tema tersebut tergolong tema yang sensitif, dalam proses pengumpulan data, PPIM menggunakan tiga alat ukur atau mode pengumpulan data yaitu: kuesioner *self-report computer assisted instruction, implicit association test* (IAT-Intoleransi), dan *implicit association test* (IAT-Radikalisme) (PPIM, 2018).

Untuk tema sensitif yang relatif sama terkait pandangan publik terhadap toleransi dan radikalisme, pada tahun 2019, CSIS melakukan uji-coba dalam survei di tingkat lokal pada 600 sampel dengan memformulasikan desain pertanyaan berdasarkan tingkat pengenalan responden terhadap peristiwa kekerasan dan non-kekerasan yang telah terjadi, dan kemudian mengukur tingkat dukungan atau persetujuan publik terhadap motif dan cara yang dilakukan (Fernandes, 2019).

#### Contoh Formulasi Pertanyaan terkait Bom WTC 9/11

Aspek	Contoh Pertanyaan
Pengenalan (Berdasarkan Peristiwa yang Telah Terjadi)	Pada tanggal 11 September tahun 2001 terjadi serangkaian serangan bunuh diri yang dilakukan Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden di Menara Kembar World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat. Apakah Ibu/Bapak pernah mendengar/mengetahui rangkaian aksi bom tersebut? (Pernah mendengar, Tidak pernah mendengar)
Sikap terhadap Motif (Berdasarkan Peristiwa yang Telah Terjadi)	Al Qaeda menyatakan bahwa motif pengeboman WTC adalah merupakan reaksi atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yakni dukungan terhadap Israel, keberadaan tentara AS di Arab Saudi, sanksi AS terhadap Irak. Bagaimana sikap bapak/ibu terhadap MOTIF pengeboman tersebut? (Setuju, tidak setuju)
Sikap terhadap Cara (Berdasarkan Peristiwa yang Terjadi)	Apakah Bapak/Ibu setuju/tidak setuju dengan CARA Al-Qaeda melakukan serangan bunuh diri terhadap menara kembar World Trade Center

	(WTC) di New York, Amerika Serikat tersebut? (Setuju, Tidak Setuju)
--	--

Sumber: Fernandes (2019)

## Tantangan Internal

Meskipun dari tahun ke tahun terjadi profesionalisasi di kalangan lembaga survei, secara teknis masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan survei opini publik untuk tingkat nasional. Pertama, tidak tersedianya data penduduk yang lengkap berdasarkan nama, alamat, dan jenis kelamin, usia—sehingga proses pengacakan harus dilakukan secara berjenjang menggunakan metode penarikan sampling secara bertahap (*multi-stage random sampling*). Untuk mendapatkan jumlah dan distribusi populasi pada level propinsi, lembaga survei memanfaatkan Data Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam DPT tersebut sudah tersedia jumlah pemilih yang berusia di atas 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Selain menggunakan data KPU, lembaga survei biasanya juga menggunakan data kependudukan yang diterbitkan oleh BPS melalui buku Indonesia Dalam Angka yang dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada setiap tahunnya. Buku tersebut juga tersedia pada level provinsi, kabupaten, atau kota.

Kedua, adanya perizinan yang berlapis dalam melakukan survei mulai dari tingkat pusat di Kementerian Dalam Negeri, lalu Kesbangpol atau Badan Perijinan Satu Pintu pada setiap Provinsi. Lembaga survei juga harus mengurus perizinan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Setelah itu, pewawancara lapangan juga harus melakukan proses perizinan di tingkat desa/kelurahan. Panjangnya birokrasi perizinan survei membuat proses pelaksanaan survei bisa menjadi lama.

Ketiga, tantangan internal lainnya adalah masih rendahnya apresiasi lembaga pelaksana survei kepada responden yang diwawancarai. Hal tersebut bisa terjadi karena biaya survei yang tidak banyak berubah dalam 10 tahun terakhir, sementara pembiayaan survei mengalami peningkatan. Insentif berupa souvenir yang diberikan kepada responden masih belum sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan responden untuk proses wawancara. Dan keempat, honorarium enumerator juga masih belum memenuhi standar yang cukup serta tidak adanya asuransi kesehatan yang diberikan. Dalam beberapa kasus, di beberapa lembaga juga tidak terjadi transparansi pemberian honorarium oleh koordinator lapangan. Ditemukan juga ada koordinator lapangan yang ‘menyunat’ honor bagi enumerator. Hal-hal teknis tersebut harus dikelola secara baik dan transparan agar meningkatkan kesungguhan enumerator untuk melaksanakan pengumpulan data dan menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan dalam survei. Di beberapa lembaga, faktor honorarium yang kecil dan tidak transparan membuat potensi kecurangan menjadi tinggi.

## Peningkatan Literasi Survei

Secara eksternal juga terdapat tantangan yang harus dibenahi ke depan, terutama membangun kerjasama dengan media massa untuk meningkatkan literasi media dan publik soal publikasi hasil survei. Literasi media juga masih lemah dalam melaporkan survei opini publik. Dalam dua pemilu terakhir (2014 dan 2019), di tengah polarisasi politik yang tinggi juga membuat terjadinya polarisasi media yang tinggi. Pembuatan berita berdasarkan standar jurnalistik yang akurat, valid dan berimbang menjadi tantangan yang serius di meja redaksi. Sejumlah media juga tidak melakukan *cross-check* sebelum menaikkan berita. Hal tersebut tampak dari masih tingginya pemberitaan terhadap survei-survei yang tidak memiliki basis metodologi yang ketat, dilakukan oleh lembaga yang tidak kredibel dan hasil survei yang meragukan.

Kelemahan reportase media terkait publikasi hasil survei menyebabkan hasil survei-survei yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel dipersepsikan secara negatif oleh masyarakat. Bahkan kadang disebut sebagai survei pesanan. Selain faktor media, faktor lembaga survei mungkin juga berkontribusi dalam mempengaruhi kualitas pemberitaan. Terutama terkait kemampuan lembaga survei untuk dapat membuat bahan rilis media yang dapat dimengerti oleh wartawan.

Ketidakpercayaan terhadap lembaga survei juga terbentuk karena terjadinya perbedaan hasil antara satu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya. Padahal, sebenarnya perbedaan tersebut lumrah terjadi, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan jumlah sampel, waktu penelitian yang berbeda, pertanyaan yang berbeda (*wording*), urutan pertanyaan (*question order*) yang berbeda, dan nama-nama yang diuji yang berbeda.

Tantangan lainnya adalah bagaimana membangun profesional, integritas dan independensi dalam menjalankan aktivitas riset. Menurut Tomsa (2020) lembaga survei memiliki tantangan dalam membagi peran sebagai pollster dan konsultan politik, dan soal *disclosure* pendanaan dan penggunaan data survei untuk kepentingan kampanye.

Untuk menjawab kondisi tersebut, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) dalam Munas tahun 2019 memutuskan perlunya standarisasi pelaporan survei opini publik dan adanya kewajiban dalam melaporkan *raw data* survei kepada asosiasi. Untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap survei dan hitung cepat. PERSEPI melakukan “Ekspose Data Quick Count” tidak lama setelah pemilu April 2019. Ekspose tersebut diikuti oleh anggota PERSEPI yang melakukan QC.

Faktor kebijakan lainnya adalah di tengah tingginya kompetisi diantara lembaga-lembaga survei dan bermunculannya lembaga survei lokal membuat harga survei menjadi di bawah standar nasional.

## Inovasi Survei Kebijakan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu 2014 dan 2019 lalu membuat inovasi dengan mewajibkan pendaftaran lembaga survei dan hitung cepat yang dapat

melaporkan hasil survei dan rilis hasil hitung cepat. Pembaruan metodologi dan profesionalitas yang dilakukan oleh lembaga survei terutama dalam merekam hasil pemilu membuat *gap* antara hasil hitung cepat dengan hasil penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU, semakin sedikit.

Ke depan, untuk dapat mendukung proses pembuatan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), pemerintah melalui kementerian dan lembaga dapat menjalin kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian swasta, lembaga survei atau lembaga riset universitas. Ditetapkannya pengelolaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe III memberikan kewenangan bagi setiap K/L untuk dapat bekerjasama dengan lembaga eksternal. Namun, sebagai masukan harus dipikirkan model penganggaran yang baru, karena Standar Biaya Masukan (SBM) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sangat berbeda dengan standar keuangan pelaksanaan survei, sehingga akan menyulitkan dalam proses implementasi kegiatan. Begitu juga dalam hal mekanisme pembayaran yang juga akan kesulitan bila dilakukan dengan model *pre-funding*.

Selain bekerjasama, kementerian/lembaga juga dapat meningkatkan kapasitas internal untuk dapat melaksanakan survei secara mandiri, meskipun dari sisi efektivitas dan kualitas—lebih baik diserahkan kepada lembaga yang sudah mapan dalam melaksanakan survei.

## Penutup

Di Indonesia, pertumbuhan lembaga survei yang fokus pada pengkajian dan riset dalam bidang kebijakan publik masih sangat terbatas. Sebagian besar lembaga survei masih beroperasi dalam pelaksanaan survei-survei politik dan pemilihan, baik di tingkat nasional atau daerah.

Lembaga di luar negeri dapat menjadi contoh bagaimana model kerjasama antara pemerintahan daerah dengan lembaga riset/survei. *Center for Local, State and Urban Policy* di Michigan mungkin dapat menjadi rujukan (<http://closup.umich.edu/>). Lembaga yang berbasis kampus tersebut rutin melakukan survei untuk mendukung pembuatan kebijakan yang berbasis bukti. Lembaga tersebut juga mendorong munculnya komunikasi yang efektif diantara pengambil kebijakan, peneliti, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah tata kota dan problem perkotaan. Di Indonesia, kemampuan lembaga berbasis universitas masih terbatas dalam melakukan survei opini publik. Survei yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pejabat di tingkat lokal tentang program-program prioritas yang akan diambil, alternatif/pilihan kebijakan yang bisa diambil, serta mendorong pemerintah lokal menjadi lebih transparan dan akuntabel.

## Daftar Pustaka

Estok, Melissa et.al. 2002. "The Quick Count and Election Observation, An NDI Handbook for Civic Organizations and Political Parties". National Democratic Institute for International Affairs (NDI).

Fernandes, Arya. 2019. "Pengalaman Indonesia dalam Melakukan Riset terkait *Violent Extremism*" dalam Asking Sensitive Questions: Panduan Pelaksanaan Survei dengan Tema Tindakan Ekstrem Berbasis Agama dan Non-Agama." Jakarta: CSIS.

Mietzner, Marcus. 2009. "Political Opinion Polling in Post-Authoritarian Indonesia, Catalyst or Obstacle to Democratic Concolidation?." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) 165-1 (2009):95-126.*

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta dan Convey Indonesia. 2018. "Pelita yang Meredup, Potret Keberagaman Guru di Indonesia". Laporan Survei Nasional.

Tomsa, Dirk. 2020. "Public Opinion Polling and Post-truth Politics in Indonesia." *Comtemporary Southeast Asia*. 42, 1, 1-27.

Trihartono, Agus. 2014. "Beyond Measuring the Voice of the People: The Evolving Role of Political Polling in Indonesia's Local Leader Elections." *Southeast Asian Studies*. 3, 1, 151-82.

Ufen, Andreas. 2010. "Electoral Campaigning in Indonesia: The Professionalization and Commercialization after 1998." *Journal of Current Southeast Asian Affair*. 29, 4, 11-37.



 [csis.or.id](https://csis.or.id)

 [csis@csis.or.id](mailto:csis@csis.or.id)

  [@csindonesia](https://www.instagram.com/csindonesia)

  [CSIS Indonesia](https://www.facebook.com/CSISIndonesia)

**Centre for Strategic and  
International Studies  
(CSIS Indonesia)**

Jl Tanah Abang III No 23-27  
Gambir, Jakarta Pusat 10160  
Indonesia